PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2035



MATERI TEKNIS

KATA PENGANTAR

Materi Teknis ini merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika. Dimana materi dari laporan ini menggambarkan latar belakang, Tinjauan Kebijakan daerah, Tinjauan Umum Kabupaten Mimika, Potensi obyek wisata Kabupaten Mimika, Konsep Pembangunan Kepariwisataan, Kebijakan dan strategi serta rencana dan insikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika.

Akhir kata, tim perencana mengharapkan bantuan kepada semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Timika, November 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR PETA ..... **xi**

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang I-1
B. Tujuan dan Sasaran I-6
C. Manfaat I-7
D. Ruang Lingkup Pekerjaan I-8
E. Landasan Hukum I-10
F. Sistematika Pembahasan I-14

BAB II
KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
A. Tinjauan Rencana Induk Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) II-1
B. Tinjauan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mimika II-1
1. Visi Pembangunan Kabupaten Mimika II-10
2. Misi Pembangunan Kabupaten Mimika II-10
3. Arah Kebijakan II-15

C. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Mimika II-24
1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Mimika II-24
2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Mimika II-25
3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Mimika II-26
4. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Mimika II-31

BAB III
KONDISI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Mimika III-1
B. Sejarah Kabupaten Mimika III-4
C. Kondisi Fisik Kabupaten Mimika III-6
1. Topografi III-6
2. Kemiringan Lereng III-8
3. Kondisi Geologi III-11
4. Kondisi Jenis Tanah III-13
5. Kondisi Hidrologi III-16
D. Kondisi Penggunaan Lahan III-20
E. Kondisi Sosial dan Kependudukan III-23
1. Pertumbuhan Penduduk III-23
2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk III-24
F. Budaya dan Adat Istiadat III-27
1. Suku Amungme III-27
2. Suku Kamoro III-30
G. Perkembangan Perekonomian III-31
1. Produk Domestik Regional Bruto III-31

BAB IV
POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA

A. Potensi Wisata Kabupaten Mimika IV-1

1. Potensi Obyek Wisata Alam IV-3
2. Potensi Obyek Wisata Budaya IV-17
3. Potensi Obyek Wisata Buatan IV-24

B. Ketersediaan Akomodasi Wisata Kabupaten Mimika IV-31

C. Penduduk Sebagai Potensi Sumberdaya Manusia Pariwisata IV-35

BAB V
KELEMBAGAAN PARIWISATA

A. Sumber Daya Manusia Pariwisata V-2

B. Kelembagaan Terkait Pariwisata V-5

BAB VI
PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataan.. VI-1
1. Tantangan dalam pembangunan pariwisata VI-1
2. Isu Strategis dalam pembangunan pariwisata VI-3

B. Prinsip Pembangunan Kepariwisataan VI-6

C. Konsep Pembangunan Kepariwisataan..... VI-8

D. Rumusan Konsep Kepariwisataan VI-12

E. Konsep Spasial Pengembangan Pariwisata..... VI-14

F. Konsep Pengembangan Sistem Destinasi..... VI-15

G. Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan VI-18

H. Konsep Pengembangan Ekowisata VI-19

I. Konsep Pembangunan Pemasaran Pariwisata VI-20

J. Konsep Pengembangan Produk VI-22

K. Visi Misi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Mimika VI-25

L. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata Kabupaten..... VI-27

BAB VII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Pembangunan Daya Tarik Wisata VII-1
B. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Kabupaten VII-2
C. Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Wisata VII-7
D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan VII-8
E. Investasi Bidang Pariwisata Kabupaten VII-9
F. Pemasaran Pariwisata VII-10
G. Pembangunan Industri Pariwisata VII-12
H. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata VII-15

BAB VIII
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

A. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Mimika VIII-4
B. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata VIII-20

BAB IX
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. Lokasi, Sumber Dana, dan Instansi Pelaksana IX-2
B. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan IX-2
C. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mimika IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perwilayahan Destinasi Pariwisata Nasional	II-6
Tabel 3.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika, Dirinci Tiap Distrik, Tahun 2017	III-2
Tabel 3.2	Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika	III-11
Tabel 3.3	Daerah Aliran Sungai dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika	III-17
Tabel 3.4	Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika Berdasarkan Jenisnya, Tahun 2017	III-21
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mimika	III-23
Tabel 3.6	Kepadatan Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2015	III-24
Tabel 3.7	Jumlah Penduduk Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Mimika	III-25
Tabel 3.8	PDRB atas dasar harga berlaku…	III-32
Tabel 3.9	PDRB atas dasar harga konstan….....	III-33
Tabel 3.10	Produksi Tanaman Pangan Menurut Distrik …	III-34
Tabel 3.11	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Distrik ….....	III-35
Tabel 3.12	Jumlah Rumah Tangga Perikanan …	III-35
Tabel 3.13	Jumlah Populasi Ternak Menurut Distrik …....	III-36
Tabel 4.1	Potensi Obyek Wisata Alam di kabupaten Mimika …	IV-4

Tabel 4.2 Potensi Obyek Wisata Budaya di kabupaten Mimika … IV-18

Tabel 4.3 Potensi Obyek Wisata Buatan di kabupaten Mimika … IV-24

Tabel 4.4 Sebaran Hotel di kabupaten Mimika …..... IV-33

Tabel 4.5 Keadaan Penduduk Distrik Agimuga berdasarkan kampung … IV-35

Tabel 4.6 Keadaan Penduduk Distrik Amar berdasarkan kampung … IV-36

Tabel 4.7 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Barat berdasarkan kampung … IV-36

Tabel 4.8 Keadaan Penduduk Distrik Iwaka berdasarkan kampung … IV-37

Tabel 4.9 Keadaan Penduduk Distrik Kuala Kencana berdasarkan kampung … IV-38

Tabel 4.10 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Barat Tengah berdasarkan kampung … IV-39

Tabel 4.11 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Baru berdasarkan kampung … IV-39

Tabel 4.12 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Tengah berdasarkan kampung … IV-40

Tabel 4.13 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Timur berdasarkan kampung … IV-40

Tabel 4.14 Keadaan Penduduk Distrik Mimika Timur Jauh berdasarkan kampung … IV-41

Tabel 4.15 Keadaan Penduduk Distrik Wania berdasarkan kampung … IV-41

Tabel 4.16 Keadaan Penduduk Distrik Tembagapura berdasarkan kampung … IV-42

Tabel 5.1 Jumlah penduduk jenis kelamin dan sex ratio Kabupaten Mimika … V-3

Tabel 5.2 Jumlah penduduk jenis kelamin dan Umur Kabupaten Mimika … V-4

Tabel 5.3 Jumlah penduduk menurut jenis kegiatan … V-5

Tabel 8.1 Pembangunan DTW pada DPK Timika … VIII-8

Tabel 8.2 Pembangunan DTW pada DPK Mimika Tengah dan Sekitarnya …..... VIII-10

Tabel 8.3 Pembangunan DTW pada DPK Amar dan Sekitarnya … VIII-13

Tabel 8.4 Pembangunan DTW pada DPK Agimuga dan Sekitarnya VIII-15

Tabel 8.5 Pembangunan DTW pada DPK Tembagapura dan Sekitarnya …..... VIII-17

Tabel 8.6 Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten … VIII-22

Tabel 9.1 Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mimika Tahun 2018-2032 … IX-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ruang Lingkup Ripparnas.....	II-2
Gambar 2.2	Peta DPN Timika-Lorentz dan Sekitarnya	II-6
Gambar 2.3	Peta Sebaran 50 Destinasi Pariwisata Nasional	II-7
Gambar 2.4	Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional	II-8
Gambar 2.4	Peta Sebaran Destinasi,Kawasan Pengembangan dan Kawasan Strategis pariwisata Nasional.....	II-9
Gambar 3.1	Grafik Perbandingan Luas Wilayah Distrik.....	III-2
Gambar 3.2	Bentang Alam Kabupaten Mimika	III-8
Gambar 3.3	Kondisi Geologi dan Jenis Tanah.....	III-14
Gambar 3.4	Kondisi Sungai Kabupaten Mimika	III-17
Gambar 3.5	Hutan di Kabupaten Mimika	III-20
Gambar 3.6	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mimika	III-23
Gambar 3.7	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	III-26
Gambar 3.8	Penduduk Kabupaten Mimika.....	III-26
Gambar 3.9	Penduduk Suku Amungme.....	III-27
Gambar 3.10	Masyarakat Amungme dengan Tradisinya	III-27
Gambar 3.12	Perempuan Suku Amungme.....	III-28
Gambar 3.13	Perang Adat Suku Amungme	III-29
Gambar 3.14	Penduduk Suku Kamoro	III-30
Gambar 3.15	Seni Ukir Patung Suku Kamoro.....	III-31
Gambar 4.1	Pulau Bidadari.....	IV-5
Gambar 4.2	Pulau Puriri.....	IV-5

Gambar 4.3 Pantai Kampus Biru IV-6
Gambar 4.4 Pantai Kawar..... IV-7
Gambar 4.5 Pantai Keakwa IV-7
Gambar 4.6 Pantai Mikapi..... IV-8
Gambar 4.7 Pantai Ipaya IV-8
Gambar 4.8 Kali Kiura IV-9
Gambar 4.9 Kali Mayon..... IV-9
Gambar 4.10 Kali Iwaka IV-10
Gambar 4.11 Hutan Mangrove Keakwa..... IV-11
Gambar 4.12 Hutan Mangrove Perikanan IV-11
Gambar 4.13 Kampung Pigapu IV-12
Gambar 4.14 Taman Nasional Lorentz..... IV-12
Gambar 4.15 Puncak Cartenz IV-14
Gambar 4.16 Pulau Yapero IV-15
Gambar 4.17 Air Terjun Urumuka..... IV-15
Gambar 4.16 Kampung Keakwa IV-18
Gambar 4.17 Festival Kamoro Kakuru IV-19
Gambar 4.18 Tugu Perdamaian Eme Neme IV-20
Gambar 4.19 Taman Mapurupuwau IV-21
Gambar 4.20 Kota Tua Kokonao IV-21
Gambar 4.21 Padang Golf Rimba Irian IV-25
Gambar 4.22 Kolam Renang Kuala Kencana..... IV-26
Gambar 4.23 Taman Kuala Kencana..... IV-27
Gambar 4.24 Waterboom Karang Senang..... IV-27
Gambar 4.25 Wisata Air Pelangi IV-27
Gambar 4.26 Taman Rekreasi IV-28
Gambar 5.1 Grafik Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut distrik di Kabupaten Mimika V-3
Gambar 6.1 Sistem Perencanaan Pariwisata..... VI-16

DAFTAR PETA

Peta 2.1.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mimika	II-35
Peta 2.2.	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mimika	II-36
Peta 2.3.	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Mimika	II-37
Peta 2.4.	Peta Lokasi Wisata Kabupaten Mimika berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Mimika	II-38
Peta 3.1.	Peta Administrasi Kabupaten Mimika	III-3
Peta 3.2.	Peta Topografi Kabupaten Mimika	III-9
Peta 3.3.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mimika	III-10
Peta 3.4.	Peta Kondisi Geologi Kabupaten Mimika.....	III-12
Peta 3.5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Mimika	III-15
Peta 3.6.	Peta Kondisi Hidrologi Kabupaten Mimika	III-18
Peta 3.7.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Mimika	III-22
Peta 4.1.	Peta Sebaran Potensi DTW Alam Kabupaten Mimika	IV-16
Peta 4.2.	Peta Sebaran Potensi DTW Budaya Kabupaten Mimika	IV-23
Peta 4.3.	Peta Sebaran Potensi DTW Buatan Kabupaten Mimika	IV-29
Peta 4.4.	Peta Sebaran Potensi Obyek Wisata Kabupaten Mimika	IV-30
Peta 4.5.	Peta Sebaran Lokasi Akomodasi Hotel.....	IV-34
Peta 8.1.	Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Timika dan Sekitarnya.....	VIII-9
Peta 8.2.	Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Mimika Tengah dan Sekitarnya.....	VIII-12
Peta 8.3.	Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Amar dan	

Sekitarnya VIII-14
Peta 8.4. Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Agimuga dan Sekitarnya VIII-16
Peta 8.5. Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Tembagapura dan Sekitarnya VIII-18
Peta 8.6. Peta Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabuaten Mimika VIII-19
Peta 8.7. Peta Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Kabupaten Mimika VIII-23
Peta 8.8. Peta Rencana Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Mimika VIII-24
Peta 8.9. Peta Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kabupaten Mimika VIII-25

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika pada dasarnya dititikberatkan pada pengembangan wisata alam, kawasan pesisir pantai, wisata sejarah, dan obyek wisata lainnya berdasarkan karakteristik dan segmentasi obyek yang dimiliki. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika akan berhasil dalam pelaksanaannya jika dibarengi dengan dasar dan landasan yang rasional dengan menerapkan mekanisme dan konsep perencanaan komprehensif dalam satu sistem lingkage berdasarkan potensi dan dinamika perubahan sosial ekonomi masyarakat yang menempati lokasi kawasan yang akan dijadikan obyek wisata. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dan arahan pola pemanfaatan ruang termasuk penentuan zona-zona kawasan wisata meliputi; zona kawasan inti dan zona kawasan penunjang dan daerah hinterland dalam satu kesatuan system pengembangan wilayah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika bukan merupakan keinginan yang idealistik akan tetapi didasarkan pada kemampuan, potensi, kendala/permasalahan, keinginan para pelaku pembangunan dan aspirasi masyarakat yang telah berkembang.

Pengembangan kawasan wisata dan konteks pengembangan wilayah, memiliki kompleksitas dalam pengelolaan terutama dalam mengarahkan pola pemanfaatan ruangnya. Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain; pengaruh ekonomi global, daya tarik segmentasi obyek dan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang baik kawasan wisata alam, wisata bahari pantai, lautan termasuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan kawasan wisata sejarah yang dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata. Faktor penyebab ekternal yang paling menonjol adalah eksploitasi kawasan wisata yang melampaui daya dukung lingkungan, dan kerusakan habitat pantai dan sungai, kawasan hutan, kawasan wisata agro dan kawasan wisata lainnya, sehingga memerlukan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Disisi lain, kegiatan usaha khususnya daerah yang bernilai ekonomi akan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini BAPPEDA, telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program pembangunan termasuk berbagai sistem pembangunan yang terpadu sesuai arahan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Mimika., salah satu diantaranya ialah pengembangan sistem prasarana wilayah terutama pada kawasan fungsional strategi yang ditujukan untuk memberikan arahan fungsi dan peran masing-masing kawasan dalam satu kesatuan wilayah Kabupaten Mimika. Penanganan pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi tuntutan pertumbuhan wilayah Kabupaten Mimika maupun kebijaksanaan pembangunan yang ada, sehingga secara terus menerus dikaji, dievaluasi, dan dilengkapi.

Pembangunan wilayah Kabupaten Mimika dalam menjawab tantangan kebutuhan masyarakat telah banyak dilaksanakan, akan tetapi pembangunan tersebut lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar saja (basic need approach) dan kurang mengarah pada peletakan dasar pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan fisik dalam konsep dasar permbangunan Kabupaten Mimika saat ini, termasuk pengembangan kawasan fungsional strategis banyak mengalami hambatan oleh karena pelaksanaan yang belum terintegrasi antara satu sektor dan sektor lainnya dan kondisi sumberdaya alam yang berbeda antara bagian kawasan yang satu dan bagian yang lain, khususnya dalam rangka penyiapan berbagai aktivitas pembangunan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu strategi penanganan pembangunan, khususnya penyiapan berbagai perangkat kebijakan pembangunan yang tidak saja berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dasar, akan tetapi pemenuhan kebutuhan untuk terselenggaranya fungsi wilayah Kabupaten Mimika dalam suatu kesatuan sistem, sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari obyek wisata dapat di optimalkan.

Perkembangan wilayah yang kian dinamis tersebut, mengakibatkan wilayah atau kawasan mengalami perubahan akibat intensitas penyelenggaraan pembangunan. Perluasan wilayah dan kawasan berimplikasi pada munculnya kawasan-kawasan pengembangan baru akibat tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat tiap tahun. Akibat ekspansi atau perluasan wilayah akan memicu pertumbuhan yang sulit untuk dikendalikan. Alternatif yang dapat dilakukan adalah mengembangkan kawasan fungsional strategis



termasuk dalam hal ini pengembangan wisata yang difokuskan pada optimalisasi potensi yang ada saat ini guna menunjang arus wisatawan menuju ke Kabupaten Mimika.

Untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dalam rangka penanganan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika akan membutuhkan konsep penanganan secara bersama dan terintegrasi dalam penyiapan berbagai kegiatan pembangunan sebagai akibat perkembangan segmentasi obyek, sehingga tidak bisa berdiri sendiri akan tetapi saling berinteraksi dan bersinergis dengan obyek wisata lainnya yang ada di sekitarnya sesuai potensi yang dimiliki masing-masing kawasan termasuk potensi dan jenis obyek wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Memunculkan konsep besar (grand concep) yang lebih dikenal dengan istilah Daerah Tujuan Wisata (DTW) secara tidak langsung akan memberikan implikasi teknis terhadap pengembangan kawasan wisata sehingga di identifikasi intensitas kegiatannya cukup tinggi. Dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Mimika ternyata menghadirkan berbagai permasalahan baik fisik, sosial dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi kawasan wisata secara terpadu (Integrated Zone Management) yang merupakan kegiatan manusia didalam mengelola ruang, sumberdaya, dan mengalokasikan berbagai kegiatan pembangunan termasuk didalamnya pengembangan kawasan wisata yang dianggap belum terintegrasi dan bersinergi antara satu kawasan biwata dengan kawasan wisata lainnya dalam wilayah Kabupaten Mimika yang umumnya mencakup beberapa jenis obyek.

Pengelolaan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) untuk kegiatan pengembangan wisata dilakukan dengan cara penilaian potensi secara menyeluruh (comprehensive assessment) tentang kawasan wisata yang terdapat didalamnya, serta menentukan besaran tujuan dan sasaran pemanfaatan, untuk selajutnya menyusun formulasi perencanaan kegiatan pemanfaatan, sehingga dicapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan termasuk didalamnya optimalisasi dan ide dasar pengembangan segmentasi obyek wisata berdasarkan potensinya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan dan mempersyaratkan untuk memanfaatkan berbagai potensi sumberdaya alam baik yang berada di laut, udara, maupun di daratan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan saling terkait dan berintereaksi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian proses pengelolaan sumberdaya alam untuk tujuan pengembangan wisata bahari diharapkan dilaksanakan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek; sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat (stakeholders) serta menghindari konflik kepentingan dalam pemanfaatan potensi serta segmentasi obyek wisata yang mungkin terjadi dan tumpang tindih dimasa yang akan datang.

Dasar pemikiran tersebut melalui alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini BAPPEDA Tahun Anggaran 2017 memandang perlu untuk menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Mimika untuk digunakan sebagai instrumen pengandalian pemanfaatan ruang dengan fokus kajian diarahkan pada pengembangan kawasan fungsional strategis dalam hal ini pengembangan dan penetapan zonasi kawasan wisata yang terdiri atas; kawasan wisata inti dan kawasan wisata penunjang berdasarkan

potensi, permasalahan dan segmentasi potensi obyek yang dapat dikembangkan dalam satu kesatuan wilayah.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika sebagai berikut:

- Untuk mengembangkan potensi kawasan wisata berdasarkan segmentasinya dalam rangka mendukung konstribusi penerimaan PAD pada sektor pariwisata;
- Mengoptimalkan sistem pemasaran kawasan wisata, untuk dinikmati oleh arus kunjungan wisata, baik lokal maupun mancanegara;
- Mengembangkan segmentasi obyek wisata melalui mekanisme perencanaan komprehensif dan berkelanjutan;
- Menetapkan zona kawasan inti dan penunjang obyek wisata di Kabupaten Mimika untuk bersinergi, sehingga memiliki interkoneksitas dengan kawasan wisata lainnya, sebagai satu kesatuan daerah tujuan; dan
- Mengembangkan dan miningkatkan aksesibilitas menuju ke kawasan wisata guna mendukung penanaman investasi.

2. Sasaran

Sesuai tujuan pekerjaan di atas, maka sasaran pekerjaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika sebagai berikut:

- Merumuskan jenis-jenis potensi obyek wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Mimika;

- Merumuskan penanganan kawasan wisata di Kabupaten Mimika berdasarkan segmentasi obyek dan karakteristik yang dimiliki;
- Merumuskan formulasi perencanaan komprehensif untuk mengembangan kawasan wisata di Kabupaten Mimika; dan
- Menjabarkan dan mengendalikan kawasan wisata Kabupaten Mimika yang berkelanjutan (sustainable development).

C. MANFAAT

1. Bagi Pemerintah

Manfaat yang dapat di peroleh bagi pemerintah sebagai berikut:

- Meningkatkan konstribusi penerimaan PAD yang bersumber dari sektor pariwisata;
- Memudahkan dalam koordinasi pembangunan khususnya dalam rangka penanganan sektor pariwisata di Kabupaten Mimika;
- Memudahkan dalam penjabaran mekanisme perencanaan kawasan wisata sebelum pelaksanaan dilapangan;

2. Bagi Masyarakat Sekitarnya

Manfaat yang diperoleh masyarakat sebagai berikut:

- Meningkatan pendapatan bagi masyarakat; dan
- Membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada sektor pariwisata.

3. Bagi Investor (swasta)

Manfaat yang diperoleh pihak investor dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata sebagai berikut:

- Memudahkan bagi pihak swasta untuk menanamkan modal dan investasi pada sektor pariwisata; dan
- Menggalakkan investasi wisata bagi pihak investor.

D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan dalam Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika sebagai berikut :

1. **Lingkup Wilayah**

   Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Mimika .

2. **Lingkup Kegiatan**

   Uraian Kegiatan "Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika", meliputi hal-hal berikut :

   a. Melakukan pengumpulan data tentang kondisi dan potensi pariwisata di Kabupaten Mimika;
   b. Melakukan pengumpulan data terkait kebijakan dan peraturan serta penerapannya di bidang-bidang pengembangan pariwisata daerah;
   c. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait tata ruang kawasan sekitar lokasi kegiatan, khususnya terkait status tanah, penggunaan lahan dan rencana tata ruang kawasan, berikut dengan peta lokasi kawasan sekitar yang menjadi lokasi kegiatan;
   d. Melakukan pemilahan dan penggolongan data serta tabulasi yang sistematis dan terstruktur untuk memudahkan analisis;
   e. Melakukan analisis pendahuluan yang mengambarkan situasi, kondisi, potensi, tendensi dan prediksi yang mungkin terjadi.

3. **Tahap Persiapan Survey**

   Pada tahap persiapan survey beberapa hal yang akan dilakukan sebagai berikut :

a. Pemahaman substansi Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika yang akan di implementasikan sesuai kerangka acuan yang telah ditetapkan.
b. Persiapan peta dasar yang menjadi acuan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika.
c. Pembuatan model daftar data yang akan dicari di lapangan.
d. Pembuatan model-model untuk pengumpulan data di lapangan.
e. Penyusunan program survey.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Pengamatan lapangan dan pengukuran terhadap lokasi yang telah ditetapkan untuk mengetahui letak dan posisi kawasan pariwisata yang menjadi obyek perencanaan.
b. Pengumpulan data sekunder pada instansi terkait.
c. Wawancara kepada masyarakat dan pejabat setempat.
d. Interview terhadap informan untuk mengetahui kondisi dan situasi kawasan pariwisata yang menjadi obyek perencanaan.

5. Metode Kompilasi Data

Metode kompilasi data Pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika sebagai berikut :

1. Model tabulasi dikembangkan dengan tujuan menyajikan informasi kondisi kawasan.
2. Peta digitasi dikembangkan untuk memaksimumkan peranan model pertama sebagai media informasi dengan mengidentifikasi posisi lokasi.

3. Untuk memperkuat formulasi data disajikan dalam bentuk grafik, diagram dan deskriftip data.

E. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindungan Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Usaha Kepariwisataan;
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
25. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
26. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

27. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;
28. Peraturan Menbudpar Nomor KM-67/UM.001/MKP/2004 tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-pulau Kecil;
29. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
31. Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
33. Peraturan Menteri Pariwisata RI No. 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033
35. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2031.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014 – 2019.

F. JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Mimika direncanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas tahun) dalam bentuk rencana indikasi program.

G. SISTEMATIKA PELAPORAN

Pada sub bahasan ini merupakan sistematika pembahasan dimana menjelaskan tentang bagian-bagian pembahasan yang termuat pada bab-bab bahasan, sehingga secara garis besar memberikan pemahaman singkat tentang isi pada setiap bab pembahasan. Untuk lebih jelasnya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bahasan ini memuat tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, Lingkup Pekerjaan, Landasan Hukum serta sistematika pelaporan.

BAB II KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA DALAM TINJAUAN KEBIJAKAN

Berisikan tentang tinjauan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) terhadap Kabupaten Mimika, visi misi pembangunan Kabupaten Mimika, Arah kebijakan implementasi pembangunan, kaidah pelaksanaan, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Mimika.

BAB III KONDISI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

Berisikan tentang gambaran umum Kabupaten Mimika berupa Letak geografis dan administrasi wilayah, kondisi fisik dasar, Sejarah Kabupaten Mimika, kondisi sosial kependudukan, kondisi perekonomian di Kabupaten Mimika.

BAB IV POTENSI WISATA KABUPATEN MIMIKA

Berisikan tentang berbagai potensi obyek pariwisata berupa obyek wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan di Kabupaten Mimika.

BAB V KELEMBAGAAN PARIWISATA

Berisi kondisi sumberdaya manusia, asosiasi pariwisata serta kelembagaan yang terkait dengan sektor pariwisata di Kabupaten Mimika

BAB VI KONSEP PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA

Pada bahasan ini memuat tangan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan, Prinsip pembangunan kepariwisataan, konsep pembangunan kepariwisataan, visi-misi serta tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika.

BAB VIII KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pada bahasan ini memuat tentang berbagai strategi dalam menentukan pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika saat ini maupun dimasa mendatang.

BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN KABUPATEN MIMIKA

Pada bahasan ini memuat tentang rencana perwilayahan wisata serta pengaturan elemen-elemen kegiatan yang menjadi dasar perencanaan kepariwisataan yang lebih.

BAB IX PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pada bahasan ini memuat tentang berbagai kegiatan atau program dalam pembangunan parwisata di kabupaten Mimika dimasa mendatang.

BAB II
KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

A. TINJAUAN RENCANA INDUK KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPPARNAS)

RIPPARNAS (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional) menjadi bagian penting dalam pengembangan kepariwisataan nasional dan daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. RIPPARNAS memiliki arti strategis bagi bangsa Indonesia karena pembangunan pariwisata Indonesia memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrument peningkatan perolehan devisa.

Dalam penjelasan PP Nomor 50 Tahun 2011 itu disebutkan, bahwa RIPPARNAS menjadi sangat penting bagi pembangunan kepariwisataan Indonesia karena :

1. Memberikan arahan pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumberdaya manusia, manajemen, dan sebagainya. Sehingga pariwisata Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengatur peran setiap stakeholder terkait baik lintas sektor, lintas pelaku maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

PP No 50 Tahun 2011 ini menegaskan arah pembangunan kepariwisataan nasional yang menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program kepariwisataan nasional dalam kurun waktu 2010-2015 yang meliputi pembangunan :

1. Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
2. Pemasaran Pariwisata Nasional;
3. Industri pariwisata nasional;
4. Kelembagaan Kepariwisataan Nasional.



Gambar 2.1 Ruang Lingkup Ripparnas

PP Nomor 50 Tahun 2011 memuat visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagi negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh 4 (empat) strategi pembangunan kepariwisataan, yang meliputi :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, dan mudah dicapai;
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab;
3. Industri pariwisata yang berdaya saing;
4. Organisasi pemerintah, Pemda, swasta dan masyarakat yang efektif dalam mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam PP No 50 tahun 2011 adalah meningkatkan :

1. Jumlah kunjungan WisataWan mancanegara;
2. Jumlah pergerakan Wisatawan nusantara;
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
4. Jumlah pengeluaran Wisataaan nusantara dan;
5. Produk domestic bruto di bidang kepariwisataan.

PP No 50 tahun 2011 ini juga membagi perwilayahan DPN, yaitu 50 DPN yang tersebar di 33 provinsi, dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 DPN. Secara keseluruhan, Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan Nasional tahun 2010-2015 ini mencakup :

1. Pembangunan Kepari$isataan Nasional;
2. Pembangunan Destinasi Pariwisata (DPN);
3. Pembangunan Pemasaran Pariwasata Nasional;
4. Pembangunan industri Pariwisata Nasional;
5. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Nasional;
6. Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
7. Pengawasan dan Pengendalian RIPPARNAS.

Berdasarkan dimensi kebijakan dan pendekatan perencanaan, kerangka strategis untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mempunyai empat strategi yaitu :

1. Strategi kunci 1 : Perubahan Pola Pikir semua pemangku kepentingan.
2. Strategi kunci 2 : Pengembangan indikator Pariwisata berkelanjutan, penyesuaian dan pemberlakuan.
3. Strategi kunci 1 : Pembiasaan diri terhadap Pola Pikir baru tentang Pekerjaan Layak yang ramah Lingkungan (green jobs) dan Pariwisata berkelanjutan.
4. Strategi kunci 1 : Memperkenalkan berbagai mekanisme pengelolaan strategis dan Penegakannya.

Setelah Kerangka Strategis, 10 strategi implementasi untuk melaksanakan dimensi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Strategi implementasi 1 : Mengarusutamakan dan memromosikan Pekerjaan Layak yang ramah Lingkungan (green jobs) melalui Pariwisata berkelanjutan.
2. Strategi implementasi 2 : Memprioritaskan Pengurangan Kemiskinan dalam Kepariwisataan.
3. Strategi implementasi 3 : Memperkuat Peluang Lapangan Kerja bagi Pemuda dalam Sektor Kepariwisataan dan Pariwisata (untuk) Anak Muda.
4. Strategi implementasi 4 :Mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberantas isu-isu terkait jender dan Perlindungan terhadap Anak.
5. Strategi implementasi 5 : Menerapkan Sistem dengan berbagai Aturan/Standar Sukarela/Minimal (voluntary Standard) untuk Pariwisata berkelanjutan.

6. Strategi implementasi 6 : Menetapkan Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian terkait pariwisata sebagai prioritas dalam Agenda Pendidikan dan Penelitian Nasional.
7. Strategi implementasi 7 : Identifikasi mitra Lokal (daerah) yang potensial dan mempunyai komitmen.
8. Strategi implementasi 8 : Melakukan Pemasaran yang Selektif dan Kreatif.
9. Strategi implementasi 9 : Menerapkan Pendekatan berkelanjutan dalam Perencanaan Kepariwisataan.
10. Strategi implementasi 10 : Membentuk satu Badan Koordinasi Tunggal untuk Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

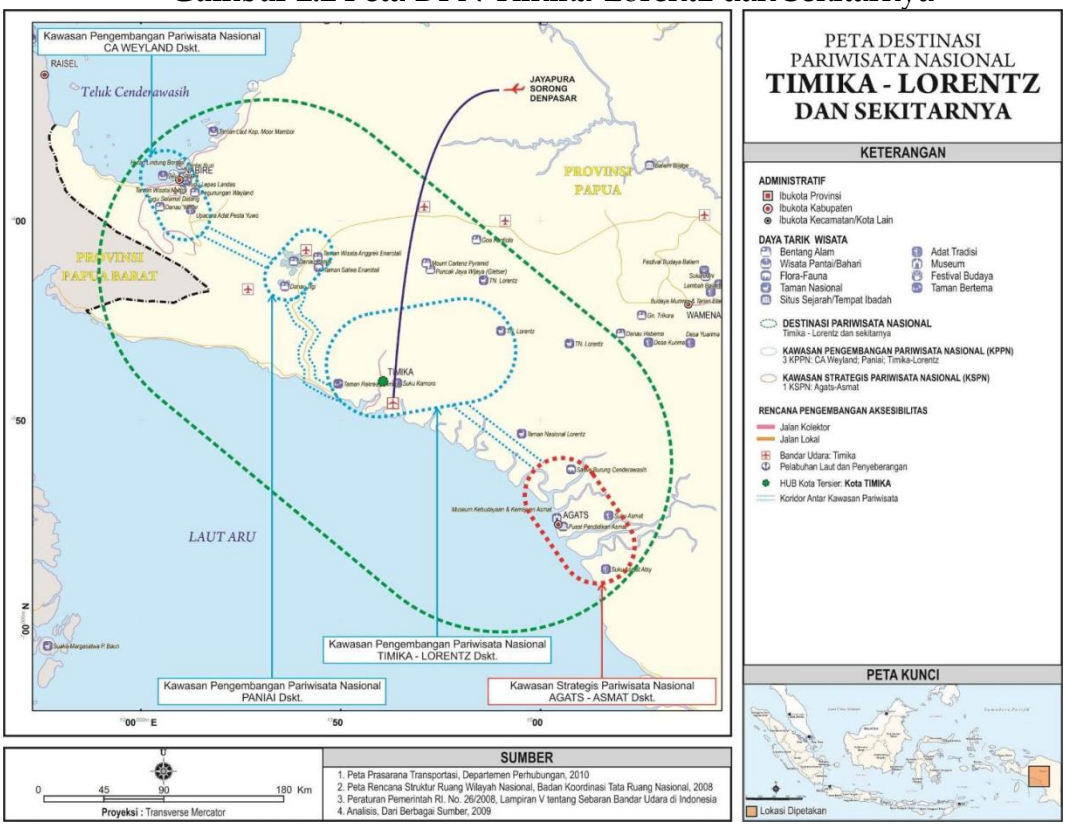
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan maka diperlukan korelasi antara kebijakan daerah Kabupaten Mimika dengan kebijakan dan arahan pembangunan kepariwisataan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 Kabupaten Mimika memiliki peran penting dalam upaya pembangunan kepariwisataan nasional. Dalam Perwilayahan Destinasi Pariwisata Nasional, terdapat 222 (Dua ratus dua puluh dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dI 50 (Lima Puluh) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)dan 88 (Delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kabupaten Mimika masuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Naional (KPPN) dengan Destinasi Pariwisata Naional (DPN) Timika-Lorentz dan Sekitarnya.

Tabel 2.1
Perwilayaham Destinasi Pariwisata Naional

No.	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)	Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)
1.	KPPN Biak dan sekitarnya	DPN BIAK–NUMFOR dan sekitarnya
2.	KPPN Supiori dan sekitarnya	
3.	KPPN Serui dan sekitarnya	
4.	KPPN Numfor dan sekitarnya	
5.	KPPN Numfor dan sekitarnya	DPN SENTANI–WAMENA dan sekitarnya
6.	KPPN Jayapura Kota dan sekitarnya	
7.	KPPN Sentani dan sekitarnya	
8.	KPPN Wamena dan sekitarnya	
9.	KPPN Jayawijaya dan sekitarnya	
10.	KPPN Timika –Lorenzt dan sekitarnya	DPN TIMIKA–LORENZT dan sekitarnya
11.	KPPN Agats–Asmat dan sekitarnya	
12.	KPPN Paniai dan sekitarnya	
13.	KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya	
14.	KPPN Wazur–Merauke dan sekitarnya	DPN MERAUKE–WAZUR dan sekitarnya
15.	KPPN Danau Bian dan sekitarnya	
16.	KPPN Kimaan dan sekitarnya	

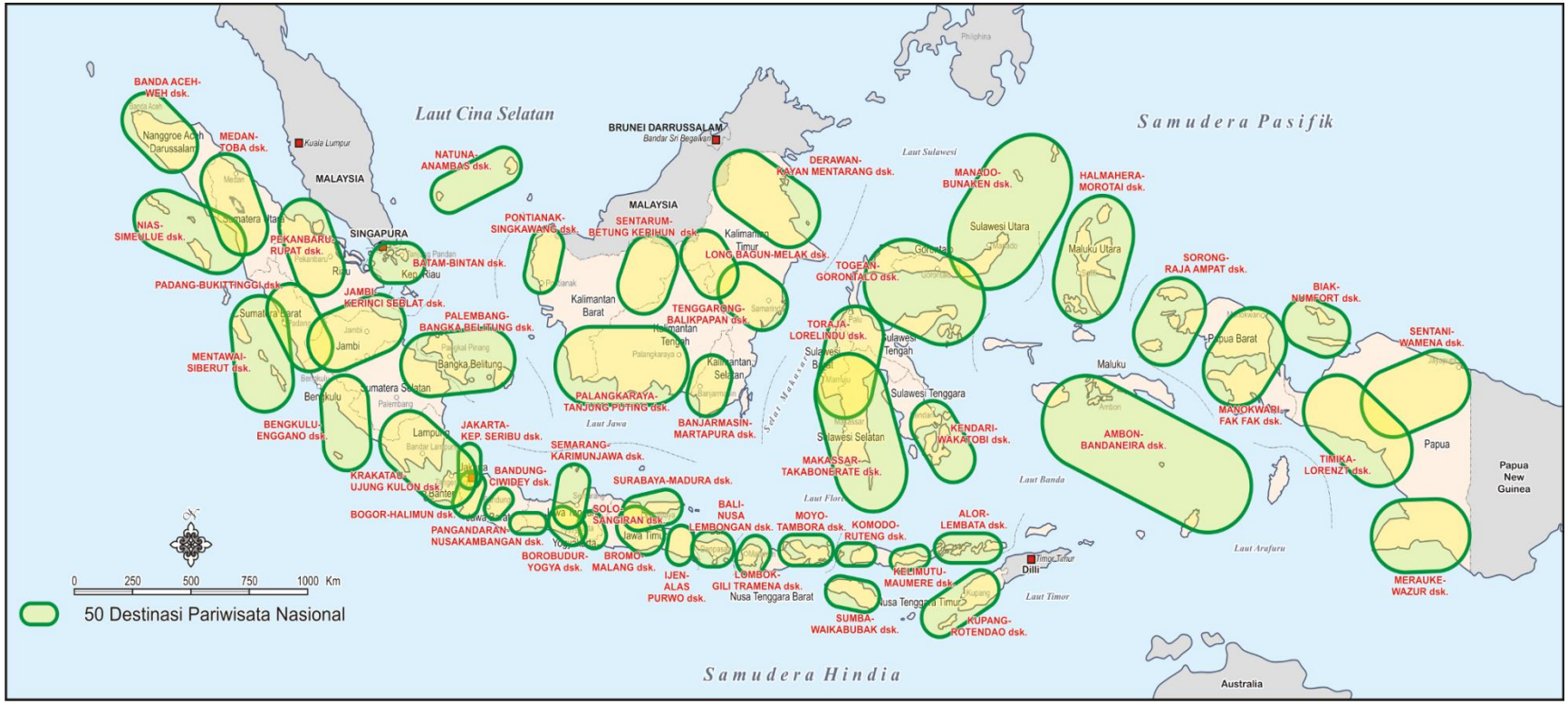
Sumber : Lampiran PP No. 50 tahun 2011

Gambar 2.2 Peta DPN Timika-Lorentz dan Sekitarnya



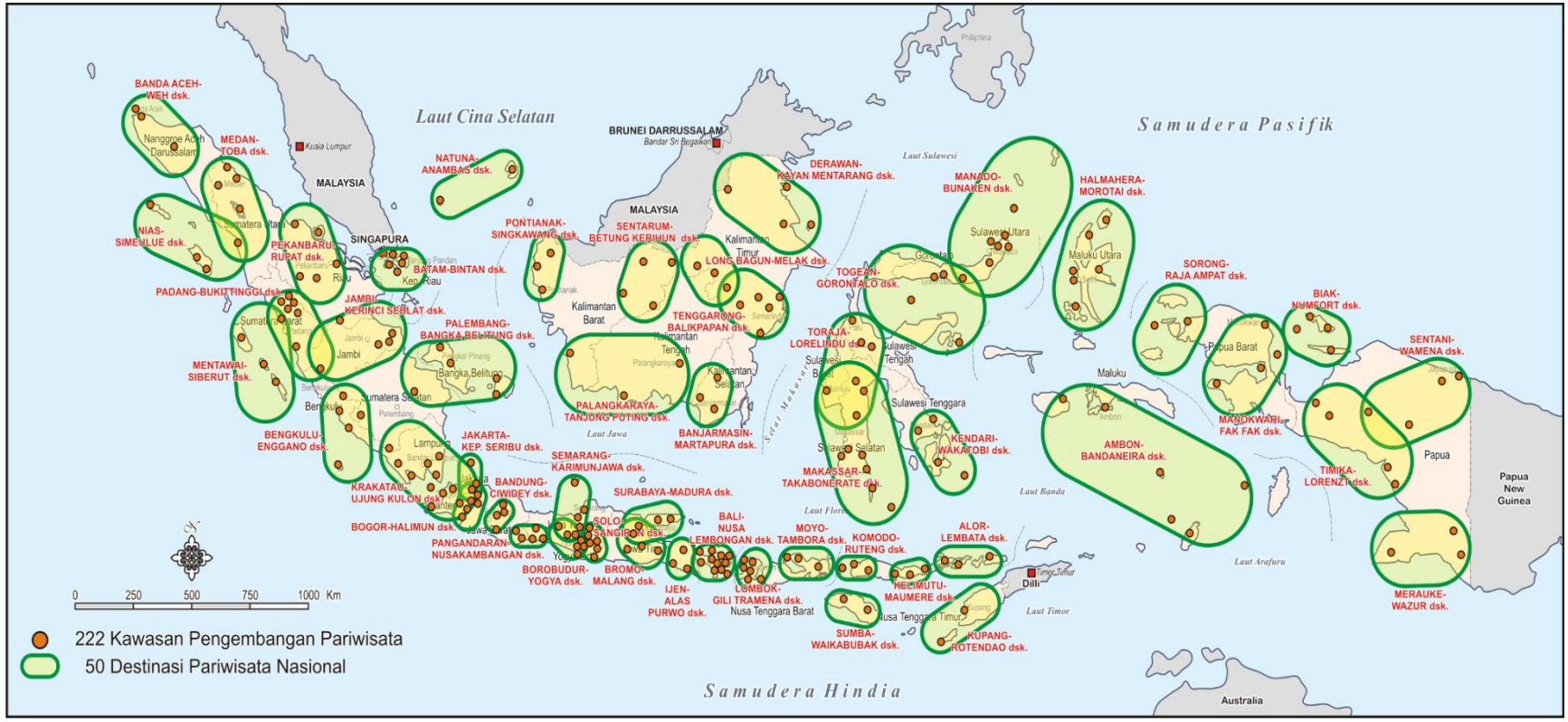
Gambar 2.3

Peta Sebaran 50 (Lima Puluh) Destinasi Pariwisata Nasional



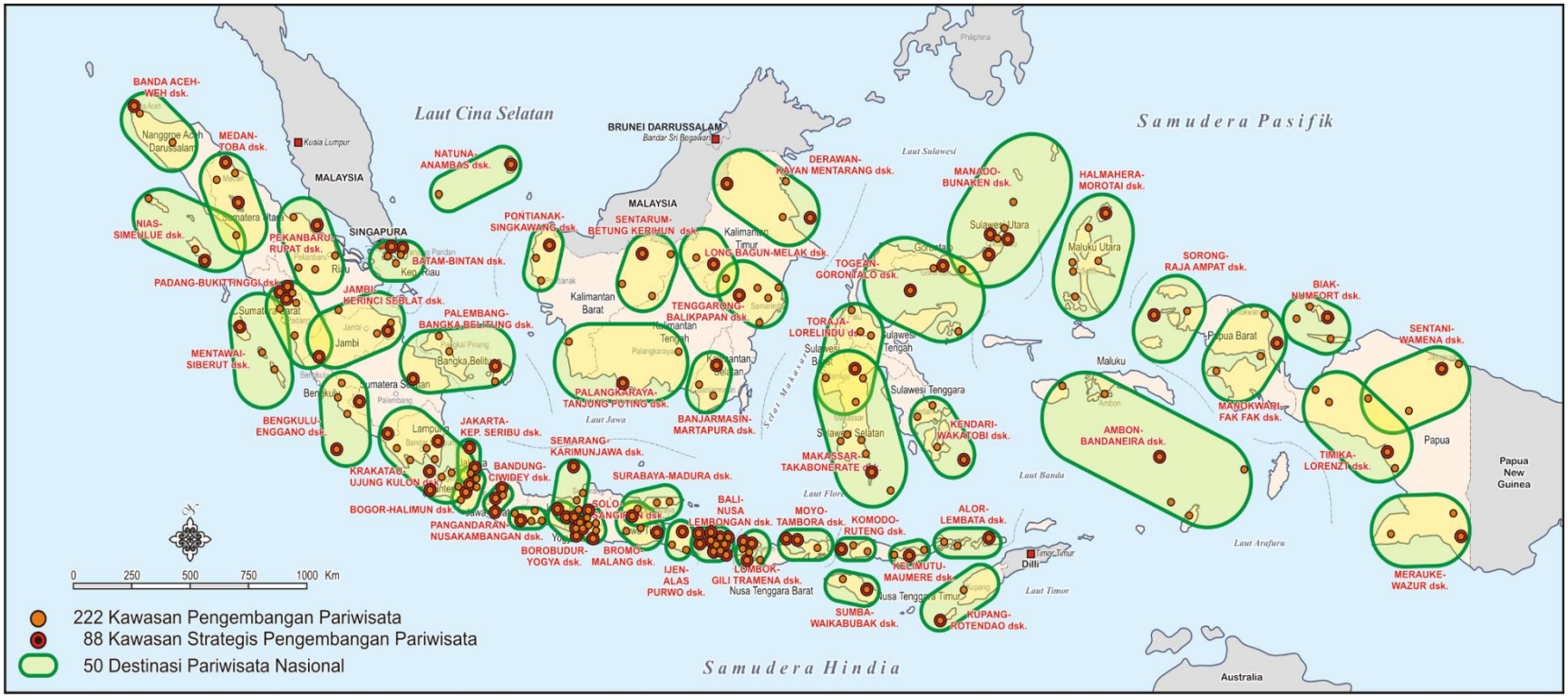
Gambar 2.4

Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Nasional dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional



Gambar 2.5

Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



B. TINJAUAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJPD) KABUPATEN MIMIKA

1. Visi Pembangunan Kabupaten Mimika

Mengacu pada kondisi Kabupaten Mimika saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun ke depan, serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Mimika, maka Visi Kabupaten Mimika Tahun 2005 - 2025 adalah:

" Pada Tahun 2025, Mimika Menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan Industri Global Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Madani"

Visi tersebut mengarah pada pengembangan potensi Kabupaten Mimika yang bertumpu pada sektor jasa dan industri guna terwujudnya Masyarakat Mimika yang Madani. Karakteristik sumberdaya alam Kabupaten Mimika sangat prospektif sebagai kekayaan daerah yang dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal. Keragaman sumberdaya alam yang kaya potensi tersebut dapat diekspolorasi dan dikembangkan menjadi suatu produk industri dalam rangka memasuki pasar global.

2. Misi Pembangunan Kabupaten Mimika

Guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mimika tersebut, terdapat 5 (lima) misi pembangunan daerah yang diemban, sebagai berikut:

a. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia

Untuk menghantarkan masyarakat Kabupaten Mimika ke suatu kondisi masyarakat yang madani berperadaban dan berkeadilan berdasarkan prinsip kesetaraan, diperlukan upaya-

upaya seperti : pemenuhan kebutuhan dasar individu dan keluarga, berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (social capital) yang kondusif bagi terbentuknya kapasitas masyarakat dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok.; adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan dan saling percaya; terselenggaranya tata pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

Dengan upaya-upaya tersebut, kapasitas sumberdaya manusia dan ma-syarakat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan sehingga dapat me-nguasai IPTEK, memiliki ketahanan IMTAQ, mampu mewujudkan potensi-nya dalam menciptakan lapangan kerja untuk menghasilkan pendapatan yang layak dalam rangka mencukupi kebutuhan dasar kehidupan, serta dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas pelayanan publik.

b. Mewujudkan kualitas sistem pelayanan prima

Pemerintah Kabupaten Mimika harus memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam menyediakan pelayanan publik di berbagai bidang dengan mengedepankan keberdayaan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Manajemen pembangunan diselenggarakan secara sistematis dan terarah berdasarkan pedoman baku dengan standar pelayanan minimal. Tercipta-nya iklim usaha dan investasi yang kondusif sangat diperlukan sebagai basis pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu dari kekuatan lokal. Jaring kemitraan internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama

yang saling menguntungkan terus dipupuk dan ditumbuhkan bagi kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Mimika.

Sistem pelayanan prima, sangat terkait dengan kapasitas pemerint-ahan sebagai aktor penyedia pelayanan publik, tak terkecuali berkenaan dengan regulasi diberbagai bidang. Oleh karena itu, sangat penting me-nyediakan sistem regulasi yang mampu membuka akses dan peluang bagi masyarakat dan investor dalam menerima pelayanan di berbagai bidang, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, air dan listrik, serta perekonomian.

c. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik

Untuk mendukung pengembangan sumberdaya manusia dan pengem-bangan pelayanan prima kepada masyarakat melalui, penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance). Dalam kaitan itu didorong terciptanya paradigma baru dalam pemerintahan yaitu pemerintah yang melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat serta pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat dengan lebih meng-utamakan prinsip-prinsip pembangunan manusia secara partisipatif.

Cerminan tata pemerintahan yang baik, terindikasikan oleh suatu kondisi, di mana terdapat kemampuan mewujudkan saluran komunikasi yang partisipatif sebagai instrument multiarah. Di dalamnya terdapat saluran aspirasi masyarakat dan informasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, maka tercipta trust secara timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, prinsip keadilan, dijunjung tinggi dengan memberkan peluang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, tanpa ada

pembedaan dengan segala dimensinya. Hal ini telah menjadi bagian integral dari cita-cita Pemerintah Kabupaten Mimika melalui proses pembangunan berbasis kemasyarakatan yang peka terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemanfaatan seluruh potensi daerah dilakukan secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, serta menggalakkan sistem pengawasan masyarakat secara intensif. Dengan demikian, ke depan citra pemerintahan menjadi professional, berwibawa dan bermoral, serta bebas dari praktek penyalah gunaan kekuasaan.

d. Mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif dan berkesinambungan

Pengembangan sumberdaya alam dilakukan secara selektif yaitu dengan memperhatikan dan memperhitungkan serta memilah-milah cara-cara pengelolaannya terutama terhadap sumberdaya alam yang tidak terbaharui (unrenewable resources). Sejalan dengan itu maka pengelolaan sumberdaya alam juga dilakukan dengan cara-cara kompetitif yaitu dengan memper-hitungkan tingkat kelangkaan dan permintaan akan sumberdaya alam yang tersedia. Secara keseluruhan pertimbangan-pertimbangan terhadap peman-faatan sumberdaya alam adalah dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaannya, mengelola dalam batas-batas daya dukung bagi sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan mengelola dengan pentahapan yang jelas dan menguntungkan bagi sumberdaya alam yang tidak terbaharui.

Dengan demikian sumberdaya alam yang dikelola secara optimal ber-hoherensi dengan kapasitas manusia dan masyarakat yang madani, terakumulasi sebagai potensi daerah yang unggul dalam lingkungan yang sehat, sehingga dapat ikut serta berpanetrasi di tingkat regional, nasional maupun internasional. Data saing daerah yang merupakan agregasi dari optimalisasi seluruh potensi dan modal daerah secara totalitas, terangkat ke permukaan untuk mencitrakan keunggulan Kabupaten Mimika yang berdayasaing tinggi. Keunggulan dimaksud, terutama sekali berbasiskan jasa dan industri yang mendukung sektor lainnya. Dalam hal ini, perlu adanya kondisi prasyarat yang dapat menjamin terpeliharanya pertum-buhan ekonomi yang seimbang dengan memperkuat landasan ekonomi sektor riil menuju penguatan ekonomi makro.

e. Mewujudkan penegakan hukum, peradilan dan HAM

Dalam memajukan Kabupaten Mimika, landasan tekad untuk me-wujudkan masyarakat madani dengan bertumpu pada kegiatan-kegiatan pelayanan jasa dan industri, maka dimensi-dimensi penegakan hukum, pelaksanaan peradilan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan menjunjung Hak Azasi Manusia, harus memperoleh garansi permanen dalam rangka mem-berikan perlindungan masyarakat terdapat segala bentuk rasa tidak aman dan rasa tidak nyaman. Pemerintah sangat memahami urgensi dari kesetaraan antara kesejahteraan dan keamanan sebagai bagian dari tujuan pemba-ngunan yang harus diwujudkan secara seiring, harmonis, dan seimbang. Adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika, untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tata hukum nasional serta mempertahankan

dan melestarikan eksistensi hukum adat sebagai bagian dari tata hukum masyarakat yang harus dihormati dan dijaga kemurniannya.

3. Arah Kebijakan

a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pengembangan sumberdaya manusia merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan upaya-upaya pengembangan sumberdaya manusia bersifat intengible sehingga sering kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan pembangunan fisik lainnya. Oleh karena itu, dari masa ke masa persoalan pengembangan sumberdaya manusia tidak pernah terselesaikan. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akan dicapai, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Sektor agama
  - Mengembangkan kesadaran umat beragama dalam rangka pembangunan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan umat beragama;
  - Meningkatkan dan mengembangkan toleransi antar umat beragama;
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana peribadatan; dan



- Mengembangkan dan mendukung aktifitas organisasi keagamaan yang bekerja pada masyarakat.

- Sektor kesehatan
  - Meningkatkan pemahaman terhadap kesadaran pemeliharaan kehamilan dan persalinan;
  - Meningkatkan gizi ibu hamil dan balita;
  - Meningkatkan dan mengembangkan pos pelayanan terpadu;
  - Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
  - Meningkatkan & mengembangkan sarana & prasarana kesehatan masyarakat;
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat;
  - Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
  - Meningkatkan dan mengembangkan serta menempatkan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan;
  - Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pangan dan gizi masyarakat;
  - Meningkatkan upaya-upaya terhadap pemberantasan penyakit menular (HIV/AIDS) dan penyakit endemik; dan
  - Pencegahan pengaruh miras dan narkoba dalam masyarakat Mimika.
- Sektor pendidikan
  - Mengembangkan pendidikan anak usia dini;
  - Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah;



- Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil; dan
- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

- Sektor tenaga kerja dan kesempatan kerja
  - Mengembangkan dan menciptakan kesempatan kerja.
- Sektor pengembangan investasi
  - Mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan peluang usaha dan investasi;
  - Mengembangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber keuangan;
  - Mengembangkan regulasi proteksi terhadap sumber-sumber pendapatan masyarakat lokal; dan
  - Mengembangkan sumber-sumber pendapatan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah sumberdaya yang dikuasai.
- Sektor hukum
  - Meningkatkan kesadaran hukum dan kehidupan demokrasi masyarakat; dan
  - Mencegah terjadinya konflik horizontal dan meningkatkan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Sektor Iptek dan Statistik
  - Mengembangkan dan memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak dini;
  - Meningkatkan dan mengembangkan teknologi informatika dalam berbagai aktifitas masyarakat;

- Mengembangkan sumber data informasi berbasis teknologi; dan
- Mengembangkan inovasi iptek pada masyarakat.

▪ Sektor Budaya, Seni dan Olahraga;

Meningkatkan dan mengembangkan karakter masyarakat (caracter building); dan

- Peningkatan pembinaan organisasi, seni dan olahraga.

b. Mewujudkan kualitas sistem pelayanan prima

Sebagaimana dikemukakan dalam modal dasar pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika adalah letak strategis daerah yang merupakan pintu gerbang Kawasan Pegunungan Tengah dan Selatan Papua serta berada pada suatu konstalasi strategis secara regional, nasional maupun internasional, maka ke depan Kabupaten Mimika dapat memposisikan diri sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global terdepan di Tanah Papua.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah nyata yang sistematis dan strategis sehingga Kabupaten Mimika dapat berperan sebagai pusat pelayanan jasa dan industri global. Dalam rangka penyelesaian permasalahan dan upaya-upaya pencapaian sasaran dalam mewujudkan sistem pelayanan prima di Kabupaten Mimika, maka ditetapkan arah pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

▪ Sektor aparatur pemerintahan

- Mengembangkan regulasi yang mendukung penerapan sistem pelayanan prima; dan
- Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelayanan prima.

- Sektor pengembangan investasi
  - Meningkatkan upaya-upaya jaminan keamanan bagi pengembangan investasi;
  - Mengembangkan kepastian penggunaan ruang dan sumberdaya dalam berinvestasi;
  - Meningkatkan perilaku aparat pemerintah daerah yang mendukung upaya-upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif; dan
  - Mengembangkan industri yang berbasis pada pengelolaan sumberdaya alam yang tersedia.
- Sektor kewilayahan dan kekuatan rakyat
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan pra-sarana transportasi untuk membuka akses kewilayahan.
- Sektor pelayanan infrastruktur dasar
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-rana energi listrik;
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-rana air bersih;
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasa-rana kebersihan dan sanitasi lingkungan permukiman; dan
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi.

c. Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Salah satu fungsi pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sejak era reformasi paradigma kepemerintahan lebih menekankan pada melayani masyarakat ketimbang dilayani oleh masyarakat. Dalam kaitan itu, maka penerapan tata kepemerintahan yang baik merupakan

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengembangkan paradigma baru pemerintahan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya nyata dan konsisten dalam perubahan perilaku birokrat, kelembagaan dan struktur pemerintahan serta alokasi anggaran pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian misi mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, maka dilakukan upaya-upaya penyelesaian ma-salah dan pencapaian sasaran yang dirumuskan dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika sebagai berikut:

- Sektor aparatur pemerintahan
  - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan;
  - Mengembangkan sistem tata kepemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance);
  - Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemerintahan;
  - Meningkatkan kemitraan dalam mendukung pelayanan publik;
  - Restrukturisasi kelembagaan pemerintahan daerah pada semua tingkatan Pemerintahan;
  - Mengembangkan analisa jabatan sehingga sesuai dengan kebutuhan kelembagaan pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan;
  - Mengembangkan unit-unit pelaksanaan fungsional untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik;

- Meningkatkan dan mengembangkan sistem mikro spasial;
- Meningkatkan dan mengembangkan sistem makro sektoral;
- Meningkatkan dan mengembangkan sinkronisasi sistem sumber daya manusia;
- Mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja dengan memperhatikan standar pelayanan minimum;
- Meningkatkan proporsi alokasi anggaran yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- Mengembangkan sistem hibah secara penuh untuk alokasi dana ke distrik dan kampung sesuai dengan variabel anggaran; dan
- Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan.

d. Mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya alam secara selektif, kompetitif dan berkesinambungan

Tanah Papua pada umumnya dan Kabupaten Mimika khususnya memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Kekayaan tersebut seharusnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika. Oleh karena itu perlu adanya cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara selektif, kompetitif dan berkesinambungan.

Untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Mimika dan juga dalam rangka penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta pencapaian sasaran yang diharapkan, maka ditetapkan arah kebijakan

pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika sebagai berikut:

- Sektor tenaga kerja
  - Meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan SDA;
- Sektor tata ruang
  - Mengembangkan pemetaan sumberdaya alam dalam rangka mendukung pelaksanaan obligasi daerah.
- Sektor ketahanan pangan
  - Meningkatkan sumber-sumber lokal ketahanan pangan massyarakat;
  - Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sumberdaya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui;
  - Mengembangkan sistem pengawasan berbasis masyarakat secara berkesinambungan;
  - Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi kekayaan sumberdaya hayati;
  - Mengembangkan kawasan-kawasan konservasi dalam rangka pelestarian sumberdaya hayati (plasma nutfah);
  - Meningkatkan dan mengembangkan konsep One Distrik One Product; dan
  - Peningkatan pengelolaan SDA yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

e. Mewujudkan penegakan hukum, peradilan dan HAM

Pengembangan bidang hukum, peradilan dan Hak Azasi Manusia (HAM) di Kabupaten Mimika merupakan bagian penting dalam pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta menciptakaan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Berkaitan

dengan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka perlu adanya suatu persepsi dan platform yang sama diantara pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karena itu, penegakan hukum, peradilan dan HAM harus dijadikan sebagai landasan utama pembangunan Kabupaten Mimika ke depan.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mimika untuk mewujudkan penegakan hukum, peradilan dan HAM, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Sektor hukum
  - Mengembangkan sistem peradilan yang memberikan kepastian hukum;
  - Mengembangkan sistem peradilan yang mampu mengadopsi sistem peradilan adat;
  - Meningkatkan dan mengembangkan pemahaman terhadap HAM;
  - Mengembangkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan dalam penegakan HAM; dan
  - Menciptakan dan mengembangkan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Sektor peranan wanita
  - Mengembangkan sistem yang mendukung pengarusutamaan gender.
- Sektor Budaya dan Seni
  - Mengembangkan regulasi tentang hak cipta orang Mimika.

C. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN MIMIKA

1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Mimika

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

a. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan;
c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
b. Karakteristik wilayah kabupaten;
c. Isu strategis; dan
d. Kondisi objektif yang diinginkan.

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
b. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan ruang Kabupaten Mimika bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Mimika yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berbasis pada pengolahan sumber daya

alam didukung pengembangan sumber daya buatan dan sumber daya manusia dengan tetap berpedoman pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Mimika

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :

a. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
d. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

a. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dan
b. Karakteristik wilayah kabupaten;
c. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :

a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan
b. ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;

c. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada
d. Wilayah kabupaten bersangkutan;
e. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
f. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Mimika terdiri atas:

a. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, dan satu sektor pendukung yaitu pariwisata;
c. Pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan; dan
e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Mimika

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
b. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :

a. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
b. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya; dan
c. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
b. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dan Provinsi Papua;
c. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
d. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang.Mengacu pada klausul kebijakan

yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mimika.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Mimika sebagai berikut :

a. Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perkampungan untuk mendukung pengembangan wilayah, mengurangi kesenjangan intra-wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, terdiri atas:
   1). Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara;
   2). Mengembangkan sarana dan prasarana pembangkit energi;
   3). Mengembangkan sarana dan prasarana irigasi;
   4). Mengembangkan sarana dan prasarana pos, telekomunikasi dan informasi;
   5). Mengembangkan sarana dan prasarana air bersih;
   6). Mengembangkan sarana dan prasarana permukiman;
   7). Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan publik ; dan
   8). Mengembangkan skema kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan dengan kabupaten disekitarnya.

b. Strategi pengembangan sektor ekonomi unggulan yang berbasis sumber daya alam, yaitu: pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan, serta sektor pendukung yaitu pariwisata, terdiri atas:
   1). Mengembangkan sentra kawasan industri;
   2). Mengembangkan sentra kawasan pertanian dan perkebunan;
   3). Mengembangkan sentra kawasan perikanan di sepanjang pesisir selatan;
   4). Mengelola kawasan hutan produksi;
   5). Mengelola sentra kawasan pertambangan dan pengendalian limbah pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta peningkatan nilai tambah;
   6). Mengembangkan pusat-pusat obyek pariwisata daerah; dan
   7). Mengembangkan skema kerjasama antar daerah untuk peningkatan kegiatan perekonomian.

c. Strategi pengelolaan kawasan lindung, budidaya, dan kawasan rawan bencana secara harmonis dan berkelanjutan, terdiri atas:
   1). Menjaga dan melindungi kelestarian Taman Nasional Lorentz;
   2). mengelola dan menjaga kelestarian suaka margasatwa dan cagar alam;
   3). Mengelola dan menjaga kelestarian kawasan lindung seperti hutan lindung, hutan rawa bakau di kawasan pesisir pantai dan kawasan daerah aliran sungai;
   4). Mengembangkan pola-pola mitigasi bencana, khususnya bencana banjir, longsor, gempa bumi; dan

5). Menjaga keharmonisan pemanfaatan kawasan budidaya dengan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

d. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten sebagai modal utama pembangunan yang berkelanjutan, terdiri atas:

1). Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

2). Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan tenaga medis;

3). Mengembangkan balai-balai latihan kerja dengan berorientasi pada sektor-sektor ekonomi unggulan daerah;

4). Mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas :

1). Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;

2). Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;

3). Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan

4). Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

f. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian yang produktif, efisien, dan

mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional, terdiri atas :

1). Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;

2). Menetapkan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi;

3). Mendorong perkembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi melalui pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada kawasan tersebut;

4). Menciptakan iklim investasi yang kondusif;

5). Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan

6). Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

4. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Mimika

a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi sumber-sumber pendapatan ekonomi bagi pemerintah dan masyarakat. Fungsi kawasan diarahkan untuk kegiatan budidaya, dengan mengembangkan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki kecenderungan pada :

1) Optimalisasi potensi ekonomi cepat tumbuh.
2) Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
3) Potensi ekspor.

4) Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
5) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :

1) Kawasan Pertanian Terpadu di Distrik Kuala Kencana, Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Timur;
2) Kawasan perikanan di Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat dan Distrik Mimika Barat Jauh; dan
3) Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi Poumako di Distrik Mimika Timur.

b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya merupakan kawasan yang memiliki niai strategis dari sudut kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya dan adat istiadat, prioritas peningkatan kualitas sosial budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial, hasil cipta karya budaya masyarakat yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda budaya (*focal point, landmark*).

Penetapan kawasan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial budaya termasuk pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang dapat menjadi ciri khas kota, serta sebagai daya tarik atraksi wisata budaya. Kawasan strategis kepentingan sosial budaya di Kabupaten Mimika, adalah :

2) Kawasan pelestarian sosial budaya Suku Kamoro, di seluruh Distrik;

3) Kawasan pelestarian sosial budaya Suku Amungme di Distrik Mimika Baru dan Distrik Agimuga; dan
4) Kawasan pelestarian sosial budaya masyarakat kampung di dalam Taman Nasional Lorentz yang tersebar di Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Jita dan Distrik Tembagapura.

c. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis terhadap :

1) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
2) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah dan atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
4) Kawasan rawan bencana alam
5) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung dan lingkungan di Kabupaten Mimika ditujukan untuk memberikan ruang bagi perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta mencegah terjadinya dampak akibat daya dukung lingkungan yang mengalami degradasi. Kawasan strategis ini adalah :

1) Kawasan DAS Urumuka di Distrik Mimika Barat Tengah.



2) Kawasan DAS Wania di Distrik Mimika Timur.
3) Kawasan DAS Iwaka di Distrik Kuala Kencana.
4) Kawasan DAS Wania Selamat Datang di Distrik Mimika Baru.

BAB III
KONDISI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. LETAK GEOGRAFIS DAN ADMINISTRATIF KABUPATEN MIMIKA

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Secara geografis Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31' - 138°31' Bujur Timur dan 4°60' - 5°18' Lintang Selatan, dan secara administrasi wilayah Kabupaten Mimika memiliki batasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Arafuru
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kaimana

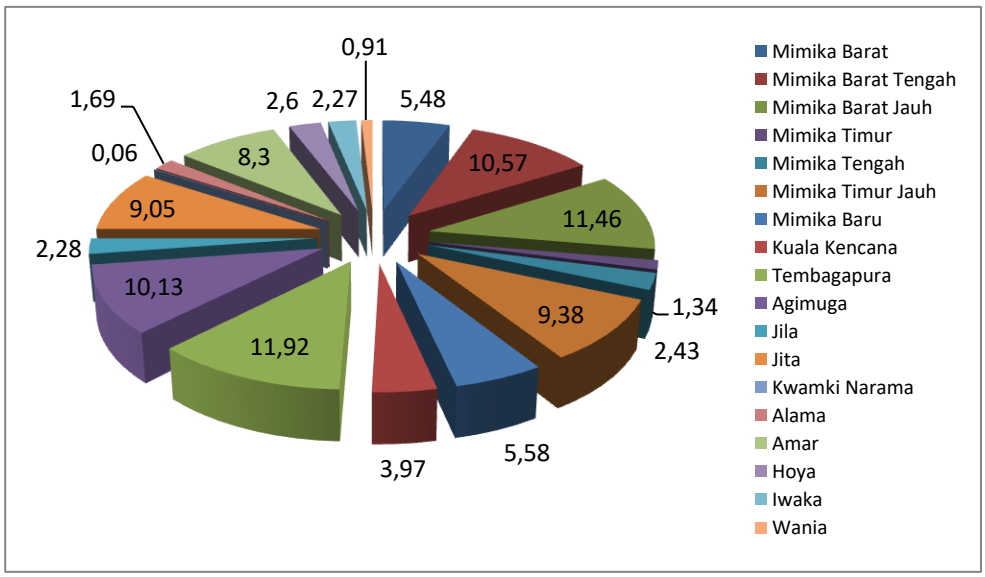
Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah sekitar 21.693,51 km^2 Kabupaten Mimika terbagi atas 18 Distrik dan 19 kelurahan serta 139 kampung. Secara terperinci luas dari masing-masing distrik di Kabupaten Mimika, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Mimika, Dirinci Tiap Distrik, Tahun 2020

No	Distrik	Luas Wilayah (Km²)	Persentase
1	Mimika Barat	1.187,85	5,48
2	Mimika Barat Tengah	2.292,46	10,57
3	Mimika Barat Jauh	2.485,89	11,46
4	Mimika Timur	290,48	1,34
5	Mimika Tengah	526,67	2,43
6	Mimika Timur Jauh	2.035,36	9,38
7	Mimika Baru	1.209,48	5,58
8	Kuala Kencana	860,74	3,97
9	Tembagapura	2.586	11,92
10	Agimuga	2.198,56	10,13
11	Jila	622,83	2,87
12	Jita	1.962,22	9,05
13	Kwamki Narama	12,86	0,06
14	Amar	1.801,50	8,30
15	Iwaka	492,73	2,27
16	Alama	365,91	1,69
17	Hoya	563,78	2,60
18	Wania	197,32	0,91
	Jumlah	**21.693,50**	**100,00**

Sumber: Hasil Analisis SIG Peta RTRW Kab. Mimika, Tahun 2020

Gambar 3.1.
Grafik Perbandingan Luas Wilayah Distrik
di Kabupaten Mimika Tahun 2020



B. SEJARAH KABUPATEN MIMIKA

Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di ProvinsiPapua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Timika. Di kabupaten ini terletak Kecamatan Tembagapura di mana tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia berada. Terdapat sebuah bandar udaranasional di kabupaten ini, yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Timika. Serta pelabuhan Nasional, di Poumako.

Awalnya Mimika merupakan sebuah kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika menjadi Kabupaten Otonom. Melihat kondisi pemerintahan saat itu dengan jumlah pegawai perwakilan Distrik yang sangat sedikit serta luasnya wilayah pelayanan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Fak-Fak memandang perlu untuk melakukan pemekaran wilayah pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah Mimika yang tentunya membutuhkan perhatian dan pelayanan dari Pemerintah. Hal ini di wujudkan dengan pembentukan Kantor Pembantu Bupati di Timika yang di tetapkan sebagai Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-Fak wilayah Mimika oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Fak-Fak.

Memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan meningkatnya tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan, maka di pandang perlunya pembentukan Pemerintahan Kabupaten Administratif sehingga pemerintahan Pembantu Bupati Fak-Fak wilayah Mimika di tetapkan sebagai Kabupaten Administratif pada tanggal 8 Oktober 1996 oleh Menteri

Dalam Negeri di Jayapura. Setelah terbentuk menjadi Kabupaten Administratif maka ditetapkan wilayah Distrik yang terdiri dari : Distrik Mimika Timur, Mimika Barat, Agimuga dan wilayah pemekaran Distrik Mimika Baru yang berkedudukan di Timika.Setelah kurang lebih 4 (empat) tahun pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Administratif, maka pada tanggal 18 Maret tahun 2000 di resmikan perubahan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Definitif oleh Gubernur Provinsi Papua Drs. J.P. Salossa, M.Si berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 1999.

Setelah resmi menjadi Kabupaten Definitif, maka pada tanggal 18 Juni 2001 Pemerintah Daerah secara resmi menetapkan 12 Distrik yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Mimika. Distrik tersebut adalah : Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Agimuga, Jila dan Jita dan bertambah distrik Kwamki Narama.Dan pada tahun 2012 dilakukan pemekaran kembali wilayah distrikbaru yang bertambah menjadi 18 distrik, terdiri dari distrik Iwaka, Wania, Amar, Hoya dan Alama.

C. KONDISI FISIK KABUPATEN MIMIKA

1. Topografi

Topografi dan bentang alam wilayah Kabupaten Mimika meliputi lempeng selatan ujung barat pegunungan tengah Papua sampai daerah berawa di pantai selatan. Pegunungan tengah terdiri dari 6 (enam) pegunungan yang terpisahkan oleh 5 (lima) sungai utama. Rangkaian pegunungan yang memanjang dari barat ke timur adalah sebagai berikut:

- Pegunungan Charles Louis di sebelah utara Aindua;
- Pegunungan Yamapoa diantara Sungai Edere dan Sungai Yawee;
- Pegunungan Hannekam di sebelah timur Sungai Kamora;
- Pegunungan Maire di sebelah timur Sungai Mamoa; dan
- Pegunungan Lineaus di sebelah timur Agimuga.

Sedangkan bagian selatan pegunungan merupakan daerah dengan relief permukaan dari bergelombang landai hingga dataran yang luas dan langsung berhubungan dengan Laut Arafuru. Berdasarkan relief permukaan, Kabupaten Mimika, terbagi 6 (enam) wilayah bentang alam yaitu:

a. Bentang alam dataran pantai

Bentang alam dataran pantai terletak di bagian selatan, dan berhubungan langsung dengan Laut Arafura. Kemiringan <2% dan banyak dijumpai gumuk pantai yang tersusun oleh endapan pasir pantai. Kokonao sebagai ibukota Distrik Mimika Barat terletak pada daerah bentang alam ini.

b. Bentang alam rawa bakau estuarium

Bentang alam rawa bakau estuarium, terletak dibagian tenggara dan memanjang sejajar garis pantai ke arah barat. Mempunyai kemiringanlereng ,2% dan ketinggian mencapai 3 Mdpl. Sungai-

sungai yang mengalir di daerah ini menunjukkan pola aliran yang tidak beraturan *(anastomic)*. Lebar sungai mencapai 150 m, dan pada umumnya dipengaruhi pasang surut air laut.

c. **Bentang alam dataran rendah berawa**

Bentang alam dataran rendah berawa, terletak dibagian Utara bentang alam rawa bakau estuarium, dan masih dijumpai pula rawa-rawadidalamnya. Umumnya mempunyai kemiringan lereng <2% dengan ketinggian dari 3 m hingga 20 Mdpl. Pola aliran sungai yang ada didalamnya semi dendritik dan semi paralel, serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mapurujaya sebagai ibukota Distrik Mimika Timur dan Kiliarma sebagai ibukota Distrik Agimuga terletak pada daerah ini.

d. **Bentang alam dataran kipas aluvial**

Bentang alam dataran kipas aluvial terdapat pada bagian tengah Kabupaten Mimika yang memanjang dari barat ke timur sejajar dengan garis pantai. Kemiringan lereng dari 2%-8% dengan ketinggian mencapai 100 Mdpl. Pola aliran sungai umumnya dendritik, dengan lebar sungai yang bervariasi dan mutu airnya cukup baik. Kota Timika dan Kuala Kencana merupakan pusat permukiman terletak di daerah bentang alam ini.

e. **Bentang alam kipas aluvial**

Bentang alam kipas aluvial merupakan daerah bergelombang dibagian selatan lereng kaki pegunungan.Kemiringan lerengnya 2%-15% setempat mencapai 50% dan ketinggian mencapai 300 Mdpl. Pola aliran sungai dendritik dengan lebar sungai bervariasi dan mutu air cukup baik.

f. Bentang alam pegunungan

Bentang alam pegunungan merupakan batas utara Kabupaten Mimika yang tersusun oleh rangkaian pegunungan dari barat ke timur. Kemiringan lereng 40%-50%, dapat dijumpai dinding lereng yang hampir tegak dengan relief permukaan yang umumnya tinggi.Ketinggian lebih dari 300 Mdpl. Kota Tembagapura (1836 Mdpl) terletak pada daerah pegunungan ini. Pola aliran sungai dendritik dengan lembah sungai sempit, dan setempat dijumpai jeram serta mutu airnya baik.



Gambar 3.2
Bentang Alam Kabupaten Mimika

2. Kemiringan Lereng

Kondisi kemiringan lereng Kabupaten Mimika ditandai dengan 5 (lima) kelas kemiringan lereng, yaitu: 0 - 3%, 3 - 8%, 8 - 15%, 15 - 25%, dan >40%. Lereng dengan kemiringan >40% menyebar memanjang di sebelah Utara Kabupaten Mimika. Sedangkan kelas kemiringan lereng 3 - 8%, 8 - 15%, 15 - 25% menyebar di wilayah bagian tengah Kabupaten Mimika. Sementara kelas kemiringan lereng 3 - 8% menyebar di bagian selatan sampai ke wilayah bagian tengah Kabupaten Mimika.

3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Mimika terdapat beberapa jenis batuan. Setidaknya ada 25 jenis batuan yang tersebar di Kabupaten Mimika, namun yang dominan adalah jenis batuan alluvium. Batuan ini tersebar banyak karena melihat keadaan geografis Kabupaten Mimika yang memiliki banyak aliran sungai. Batuan aluvium ini merupakan batuan sedimen yang dibentuk atau diendapkan oleh sungai-sungai. Batuan ini dapat kita lihat di tepi-tepi sungai di muara sungai, misalnya pasir dan tanah di tepi sungai.

Tabel 3.2
Kondisi Geologi di Kabupaten Mimika

No	Jenis Geologi	Luas (Ha)
1	Alluvium Terbiku	10680.75
2	Aluvium	969920.85
3	Batuan Malihan Derewo	57475.11
4	Batugamping Yawee	90205.23
5	Batulumpur Piniya	7926.44
6	Batupasir Emkai	23398.27
7	Batupasir Woniwogi	1442.20
8	Dolomit Modio	35306.11
9	Endapan Aliran Rombakan	2912.05
10	Endapan Aluvium Dan Litoral	635.35
11	Endapan Danau	268358.19
12	Endapan Glasial	2390.05
13	Fanglomerad	2563.04
14	Formasi Otomona	33712.56
15	Formasi Tuaba	62450.02
16	Formasi Aiduna	125605.36
17	Formasi Buru	211499.75
18	Formasi Kopai	4929.48
19	Formasi Tipuma	68819.30
20	Formasi Waripi	14521.20
21	Hancuran Tanah Longsor	5714.64
22	Intrusi Ilaga	2341.86
23	Kelompok Besar Batu Gamping New Guinea	12113.10
24	Kelompok Kembelangan	19739.28
25	Kelompok Paniai	34140.58
26	Kipas Aluvium	99391.14
Jumlah		**2169350,92**

Sumber: Pusat Lingkungan Geologi Bandung Tahun 1989-1995

4. Kondisi Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Mimika diklasifikasikan dalam 5 (lima) tipe:

- Litosol merupakan tanah mineral hasil pelapukan batuan induk, berupa batuan beku (intrusi) dan/atau batuan sedimen yang menempati daerah perbukitan intrusi dengan sudut lereng < 70%. Kenampakan sifat fisik berwarna coklat kemerahan, berukuran lempung, lempung lanauan, hingga pasir lempungan, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, solum dangkal, tebal 0,2-4,5 m. Jenis tanah ini tersebar dengan luas 904.730,61 Ha atau 41,71 % dari luas Kabupaten Mimika.
- Mediteran merupakan tanah yang berasal dari pelapukan batu gamping yang menempati daerah perbukitan karst, dengan sudut lereng > 70%. Kenampakan fisik yang terlihat berwarna coklat kehitaman, berukuran lempung pasiran, plastisitas sedang-tinggi, agak padu, permeabilitas sedang, rentan erosi, tebal 0,1-1,5 m. Jenis tanah ini tersebar dengan luas 77.058,56 Ha atau 3,55 % dari luas Kabupaten Mimika.
- Tanah Podsolik adalah tanah yang terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan suhu udara rendah. Tanah ini berada di daerah yang memiliki iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun. Tanah podsolik memiliki kesuburan sedang, bercirikan warna merah atau kuning, memiliki tekstur yang lempung atau berpasir, memiliki pH rendah, serta memiliki kandungan unsure aluminium dan besi yang tinggi. Tanah ini juga memiliki daya simpan air yang sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Jenis tanah ini tersebar dengan luas 55.080,62 Ha atau 2,54 % dari luas Kabupaten Mimika.

- Tanah renzina adalah tanah hasil pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Tanah renzina memiliki warna hitam dan miskin unsur hara. Tanah renzina banyak terdapat di daerah bergamping. Jenis tanah ini tersebar dengan luas 194.978,94 Ha atau 8,99% dari luas Kabupaten Mimika.
- Tanah Glei merupakan tanah endapan alluvial. Tanah ini terdapat pada topografi datar dengan banyak cekungan. Tanah ini terbentuk pada iklim basah sampai iklim musim yang mempunyai curah hujan lebih dari 1.500 mm/tahun. Tanah ini jenuh dengan kandungan air serta produktivitasnya rendah. Pada umumnya, tanah ini digunakan untuk persawahan pasang surut, persawahan rawa san sebagian besar merupakan hutan rawa. Jenis tanah ini tersebar dengan luas 937.500,21 Ha atau 43,22% dari luas Kabupaten Mimika.



Gambar 3.3
Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

5. Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Mimika terdapat ribuan sungai membentang dari potowaiburu - Jita. Terdapat sungai-sungai besar dan kecil, seperti: Sungai Omba, Sungai Aykwa, Sungai Minajerwi, Sungai Otakwa, Sungai Sipu-Sipu, Sungai Pika/Wania, Sungai Mioko, Sungai Iwaka, Sungai Kamora, Sungai Kapiraya, Sungai Umar, Sungai Omba dan ribuan anak sungai yang tersebar yang bermuara ke laut Arafura. Lebar sungai di bagian hilir berkisar antara 100 - 150 m dengan kedalaman pada musim kemarau anatar 3 - 6 m atau 5 - 8 m pada musim hujan. Di wilayah Kabupaten Mimika terdapat 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Omba, Aindua, Taparomae - Awaruka, Tuuga, Ukemupuke, Mimika, Kamoro, Wania, Ajkwa, Minajerwi, Mawati, Otakwa, Akimuga dan Cemara.

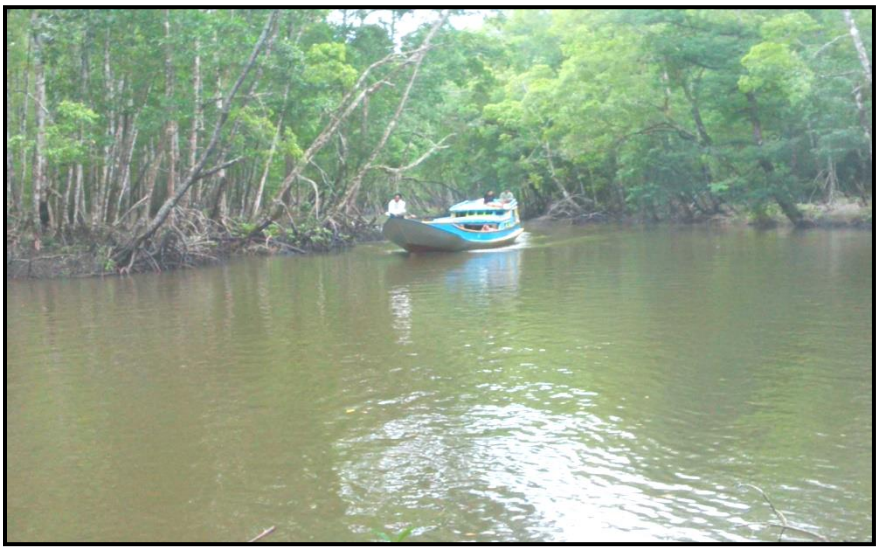
Potensi sumberdaya air di Kabupaten Mimika selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan. Potensi sumberdaya air tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan sumber air baku untuk kebutuhan lainnya.

Potensi air tanah dapat dimanfaatkan sebagai air baku untuk berbagai kepentingan kegiatan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk menunjang kegiatan ekonomi mayarakat. Potensi air tanah yang terdapat di Kabupaten Mimika ditunjang oleh keberadaan aliran sungai. Selain itu potensi air di Kabupaten Mimika juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan sumber air bersih.

Tabel 3.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pemanfaatannya di Kabupaten Mimika

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Fungsi/ Manfaat	Daerah yg Dilalui
1	Aikimiugah	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila, Jita dan Mimika Timur Jauh
2	Anindua	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
3	Bunga	Perikanan	Distrik Agimuga, Alama, Jila dan Jita
4	Cemara	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Jila dan Jita
5	Iape	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
6	Jera	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
7	Kamura	Perikanan	Distrik Iwaka, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Wania dan Tembagapura
8	Maakwe	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat
9	Mimika	Perikanan	Distrik Amar, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Barat dan Mimika Tengah
10	Mukumuga	Perikanan	Distrik Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania
11	Murpurka	Perikanan	Distrik Amar dan Mimika Barat Tengah
12	Omba	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
13	Otokwa	Perikanan	Distrik Agimuga, Hoya, Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Tembagapura
14	Peter	Perikanan	Distrik Alama
15	Potewal	Perikanan	Distrik Mimika Barat Jauh
16	Umari	Perikanan	Distri Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah
17	Umuk/Wamuka	Perikanan	Distrik Mimika Barat Tengah
18	Wamaro	Perikanan	Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh dan Tembagapura
19	Warenai	Perikanan	Distrik Tembagapura

Sumber : BPDAS PS Kemen. Kehutanan Tahun 2011



Gambar 3.4
Kondisi Sungai Kabupaten Mimika

6. Keadaan Ikim

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2014 sebesar 22,18°C dan maksimum 33,43°C. sedangkan rata-rata tekanan udara minimum di wilayah Mimika selama tahun 2014 sebesar 1.006,1 Mbs dan maksimum 1.015,5 Mbs. Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 87% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Agustus. Kecepatan angin di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 4,67 knot dengan kecepatan angin terendah sekitar bulan mei hingga Desember. Selanjutnya curah hujan tertinggi di Kabupaten Mimika tahun 2014 terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 934,7mm dan terendah pada bulan Maret sebesar 229,8 mm.

Jumlah hari hujan di Kabupaten Mimika menurut pantauan stasiun BMKG Timika mempunyai jarak (rentang) antara 24-30 hari pada 2010 dan 16-31 hari pada 2014. Jumlah hari hujan sebesar 16 hari terjadi pada bulan Oktober, sedangkan jumlah hari hujan 31 hari terjadi pada bulan Mei, Juli dan Agustus 2014. Hampir setiap hari di Timika turun hujan, hal ini dapat terlihat dari rentang waktu dari hujan yang berada pada kisaran 16-31 hari hujan. Curah hujan yang tinggi di Kabupaten Mimika, sangatlah bermanfaat bagi mayoritas masyarakatnya, karena air hujan digunakan untuk air minum.

D. KONDISI PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan masa kini (*present or current land use*). Tutupan lahan yang menggambarkan konstrukasi vegetasi dan buatan yang menutup permukaan lahan. Konstruksi tersebut seluruhnya tampak secara langsung dari citra penginderaan jauh. Tiga kelas data secara umum yang tercakup dalam penutup lahan; struktur fisik yang dibangun oleh manusia, fenomena biotik seperti vegetasi alami, tanah pertanian dan kehidupan binatang, dan tipe pembangunan.

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Mimika didominasi oleh hutan primer dengan luas 12.195,54 Km^2 dan hutan rawa primer 4.535,80 Km^2. Adapun penggunaan lahan di Kabupaten Mimika sesuai dengan peruntukannya yakni terdiri dari perumahan dan kawasan permukiman, bangunan umum, rawa, kebun, tambang, hutan, pertanian dan lain-lain. Adapun luas lahan masing - masing pemanfaatan lahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 3.5 Hutan di Kabupaten Mimika



Tabel. 3.4.
Penggunaan Lahan kabupaten Mimika Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2020

No	Tutupan Lahan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1	Hutan Sekunder	1.206,21	5,56
2	Tanah Terbuka	402,31	1,86
3	Pertanian Lahan Kering + Semak	69,11	0,31
4	Pertanian Lahan Kering	15,50	0,07
5	Hutan Rawa Sekunder	296,50	1,37
6	Hutan Mangrove Primer	2.089,38	9,64
7	Semak Belukar Rawa	46,23	0,21
8	Hutan Mangrove Sekunder	78,06	0,36
9	Hutan Rawa Primer	4.535,80	20,92
10	Pelabuhan	0,18	0,00083
11	Savana	0,18	0,00086
12	Tubuh Air	561,42	2,59
13	Rawa	97,20	0,45
14	Tambang	14,16	0,07
15	Kebun Campuran	28,67	0,13
16	Bandar Udara	3,70	0,02
17	Pelabuhan	0,25	0,0011
18	Hutan Primer	12.195,54	56,26
19	Permukiman	26,61	0,07
Jumlah		**21.693,50**	**100,00**

Sumber: Hasil Digitasi Citra Satelit & Peta RTRW Kab. Mimika, Th. 2020

E. KONDISI SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

1. Pertumbuhan Penduduk

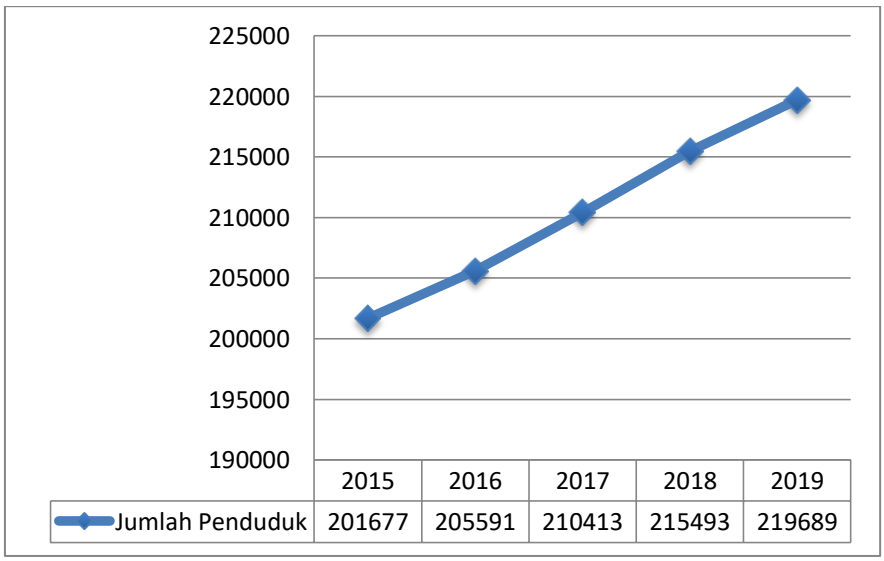
Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Mimika tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan banyak penduduk yang menetap di Kabupaten Timika yang merupakan pusat perekonomian, pendidikan dan pemerintahan. Rata-rata Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika yaitu sebesar 3.526 Jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Mimika

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (Jiwa)
1.	2015	201.677	-
2.	2016	205.591	3.914
3.	2017	210.413	4.822
4.	2018	215.493	5.080
5.	2019	219.689	4.196
Rata-rata		**196.991**	**3.233**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 3.6
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mimika



2. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika berdasarkan pertumbuhan penduduknya. Jumlah Penduduk terbesar terdapat di Distrik Mimika Baru dengan jumlah 109.553 jiwa yang merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.6
Kepadatan Penduduk Menurut Distrik
di Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Distrik	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Wilayah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Agimuga	1.050	2.198,56	0,48
2	Amar	2.103	1.801,50	1,17
3	Alama	1.924	365,92	5,26
4	Hoya	1.361	563,78	2,41
5	Iwaka	7.590	492,73	15,40
6	Jila	1.345	622,83	2,16
7	Jita	1.697	1.962,33	0,86
8	Kuala Kencana	18.017	860,74	20,93
9	Kwamki Narama	7.552	12,86	587,25
10	Mimika Barat	2.778	1.187,85	2,43
11	Mimika Barat Jauh	2.203	2.485,89	0,89
12	Mimika Barat Tengah	2.438	2.292,46	1,06
13	Mimika Baru	109.553	1.509,48	72,58
14	Mimika Tengah	3.640	526,67	6,91
15	Mimika Timur	7.847	290,48	27,01
16	Mimika Timur Jauh	3.737	2.035,36	1,84
17	Tembagapura	20.007	2.586,86	7,73
18	Wania	24.847	197,32	125,92
Jumlah		219.689	21.693,51	10,13

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

3. Komposisi Kependudukan

a. Struktur Penduduk Menurut Jenis kelamin

Dari sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan) tahun 2019 penduduk Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah sex ratio pada Distrik Tembagapura yaitu

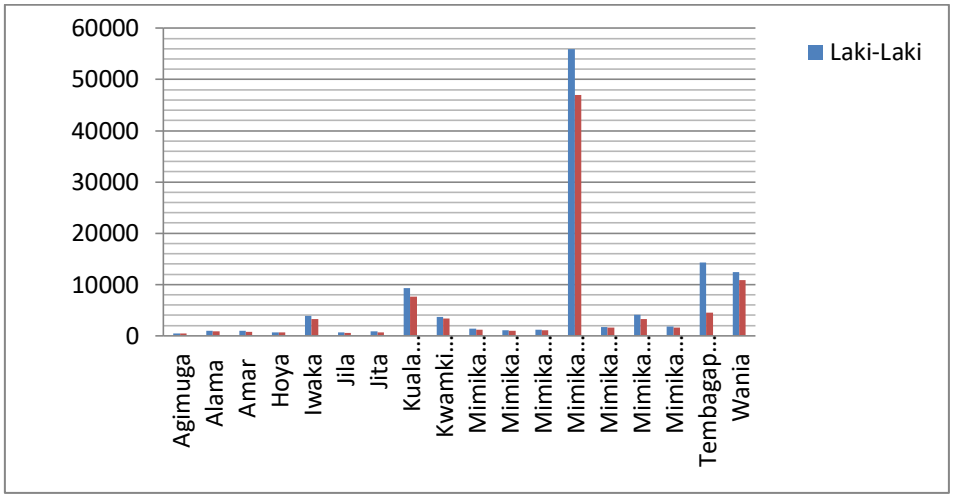
309,73. Artinya, jumlah penduduk laki-laki di distrik ini tiga kali lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Perbedaan yang sangat besar tersebut dikarenakan pada Distrik Tembagapura terdapat usaha pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Sedangkan yang terkecil adalah Distrik Hoya dengan rasio sebesar 91,15.

Tabel 3.7
Jumlah penduduk Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Mimika

No	Distrik	Jenis Kelamin (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Agimuga	525	473	998	103,09
2	Amar	1.047	976	2.023	102,02
3	Alama	1.008	842	1.850	113,07
4	Hoya	641	659	1.300	91,15
5	Iwaka	3.997	3.408	7.405	114,29
6	Jila	649	636	1.285	95,21
7	Jita	922	704	1.626	123,00
8	Kuala Kencana	9.660	8.016	17.676	118,63
9	Kwamki Narama	3.854	3.515	7.369	106,68
10	Mimika Barat	1.434	1.246	2.680	109,82
11	Mimika Barat Jauh	1.124	995	2.119	107,05
12	Mimika Barat Tengah	1.189	1.162	2.351	96,93
13	Mimika Baru	58.311	49.692	108.003	117,18
14	Mimika Tengah	1.823	1.702	3.525	102,56
15	Mimika Timur	4.230	3.421	7.651	120,30
16	Mimika Timur Jauh	1.863	1.748	3.611	102,55
17	Tembagapura	14.930	4.712	19.642	309,73
18	Wania	12.896	11.483	24.379	111,00
Jumlah		120.103	95.390	215.493	124,19

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

Gambar 3.7
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Distrik
di Kabupaten Mimika Tahun 2019





Gambar 3.8
Penduduk di Kabupaten Mimika

F. BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

Secara umum Kabupaten Mimika didiami oleh 2 suku asli, yaitu suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan suku Kamoro di wilayah pantai.

1. Suku Amungme



Gambar 3.9 Penduduk Suku Amungme

Suku Amungme adalah salah satu suku yang ada di daerah Papua selain suku Dani yang kita kenal, sebagian besar berasal dari Kabupaten Mimika. Kata Amungme dibagi menjadi dua yaitu "amung" yang artinya utama dan "mee" yang artinya manusia. Amungme berasal dari derah Pagema (lembah baleim) Wamena. Hal ini dapat ditelusuri dari kata kurima yang artinya tempat orang berkumpul dan hitigima yang artinya tempat pertama kali para nenek moyang orang-orang Amungme mendirikan Honai dari alang alang.



Gambar 3.10 Masyarakat Amungme dengan Tradisinya

Masyarakat Amungme dan Pegunungan tengah papua pada umumnya dalam aktivitas kesehariannya selalu membawa anak panah. Tujuan menggunakan anak panah bukan untuk maksud jahat, tetapi menjadi tuntutan budaya. Namun beberapa peristiwa perang antar suku dan marga dalam suku Amungme selalu menggunakan sejarah tradisional ini. Selain anak panah juga digunakan untuk keperluan berburuh hewan dihutan.

Pembuatan kerangka rumah dalam Suku Amungme berbeda dengan masyarakat daratan tinggi lain di Papua, hunian suku Amungme dibuat berbentuk panggung mengerucut untuk mencegah banjir atau binatang buas.

Seorang pemimpin (menagawan) dalam suku Amungme dapat menentukan untuk memiliki istri lebih dari satu, hal ini dimaksudkan untuk memperbayak marga atau mungkin sebagai gengsi social. Para pemuda yang menjadi pengikut seorang menagawan akan mendapatkan jaminan social seperti pembayaran upah maskawan bila kelak akan menikah, mendapatkan perlindungan bila terjadi perselisihan dengan kelompok lain dan sebagainya.



Gambar 3.11 Perempuan Suku Amungme

Perang adat atas nama harga diri, disusun yang dirampas perseoalan perempuan dan lainnya sering dilakukan oleh masyarakat suku Amungme ketika dalam tingkat diplomasi tidak mencapai hasil kesepakatan. Perang adat berakhir ketika jatuh korban yang berimbang. Selama prosesi perjanjian damai tidak ada istilah "pembayaran kepala atau bayar darah" yang dikenal saat ini. Istilah bayar kepala dan bayar darah kemungkinan bagi Suku Amungme diadopsi oleh suku Dani-Lani. Perang adat dalam suku Amungme akan semakin sulit untuk dihentikan bila kedua pihak korban belum dapat berimbang. Setiap musuh yang menjadi korban dari perang adat dalam kebudayaan suku Amungme dilarang untuk diperlakukan secara sadistis karena akan menjadi dendam secara turun temurun.



Gambar 3.12 Perang Adat Suku Amungme

Amung-kal adalah bahasa yang digunakan oleh orang Amungme yang hidup disebelah selatan. Sedangkan Damal-kal untuk orang Amungme yang hidup di sebelah utara. Maka dari itu dalam suku Amungme terdapat dua bahasa. Selain itu suku Amungme juga

memiliki bahasa simbol yang berbeda dengan bahasa komunikasi sehari-hari yaitu Aro-a-kal adalah jenis bahasa simbol yang paling sulit dimengerti dan dikomunikasikan, serta Tebo-a-kal sebagai jenis bahasa simbol yang hanya diucapkan sewaktu berada di wilayah tertentu yang dianggap keramat.

2. Suku Kamoro



Gambar 3.13 Penduduk Suku Kamoro

Suku Kamoro adalah salah satu suku yang berada di Papua, tepatnya di wilayah pesisir pantai Kabupaten Mimika Agats sampai Jita. Suku Kamoro adalah salah satu kelompok etnik, penduduk, asal di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, mereka berdiam di sekitar aliran sungai Opa dan sungai Mukamuga, teluk Etna, di pantai selatan Papua Barat itu. Desa-desa tempat pemukiman mereka antara lain di desa Torja, Middle, Kamoro, Western, Wania, dan Mukamuga. Desa-desa itu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Mimika Timur dan Mimika Barat.

SukuKamoro terkenal pandai berburu, dan juga terkenal akan ukiran, nyanyian, topeng-topeng roh dan tariannya. Suku Kamoro juga memiliki ritual di mana dibuat gendang yang menggunakan darah. Orang Kamoro dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keterampilan dalam membuat seni ukir atau patung. Hasil karya mereka terkesan lebih abstrak dibandikan dengan karya-karya orang Asmat. Ekspresi seni dituangkan misalnya pada tongkat (ote-

kapa) dengan motif sirip ikan (eraka waiti), latau tulang sayap kelelawar (tako-ema). Ini berarti bahwa pemilik tongkat yang membuat motif itu percaya berasal dari ikan atau kelelawar. Orang yang tidak bisa mengukir, maka ia dapat memesanmotif tertentu sesuai dengan asal usulnya kepada seorang pengukir.



Gambar 3.14 Seni Ukir Patung Suku Kamoro

Ketergantungan pada kekayaan alam menjadikan mereka sering disebut sebagai suku peramu atau pengumpul. Pola menetapnya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Berburu di hutan, khususnya hutan bakau (mangrove), membuat sagu dan memancing ikan disungai atau laut, merupakan ciri yang melekat padahidup mereka. Perahu atau kano dekat dengan keseharian mereka, terutama sebagai sarana transporatasi dan komunikasi.

G. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN

1. Produk Domestik Regional Bruto

Lapangan usaha ini mencakup Sublapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sublapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sublapangan Usaha Perikanan.

Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2016 Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Mimika sebesar 1,99 persen. Dari besaran kontribusi terhadap PDRB tersebut, Sublapangan usaha Perikanan merupakan penyumbang terbesar yaitu tercatat sebesar 67,49 persen dari seluruh nilai tambah Lapangan usaha Pertanian. Nilai kontribusi ini meningkat secara terus menerus dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir. Tercatat kontribusi tersebut sebesar 63,83 persen pada tahun 2012, pada tahun 2013 sebesar 64,80 persen, tahun 2014 sebesar 63,83 persen dan tahun 2015 sebesar 67,49 persen.

Tabel 3.8
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kab. Mimika, 2015-2019

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.239.283,72	1.370.746,22	1.426.846,37	1.476.217,00	1.502.392,38
Pertambangan dan Penggalian	45.294.171	54.678.693,93	62.871.974,69	73.079.806,92	41.605.557,70
Industri Pengolahan	95.960,80	108.311,29	122.549,82	136.198,43	132.373,94
Pengadaan Listrik dan Gas	8.608,80	9.868,56	11.492,97	12.311,26	13.265,75
Pengasaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.265,95	6.513,85	6.773,74	7.078,18	7.192,60
Konstruksi	1.602.856,68	1.938.749,72	2.172.158,91	2.391.005,09	2.795.274,49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.499.862,78	1.735.881,25	1.963.340,38	2.116.575,12	2.252.329,34
Transportasi dan Pergudangan	838.662,35	966.366,56	1.081.194,96	1.169.553,90	1.273.956,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	182.904,29	205.429,51	231.411,98	249.689,06	270.917,21
Informasi dan Komunikasi	1.161.677,96	1.279.124,51	1.437.214,29	1.531.064,59	1.611.292,38
Jasa Keuangan dan Asuransi	306.348,08	329.936,58	352.387,27	358.577,61	364.382,09
Real Estate	436.507,02	500.993,07	577.877,81	607.409,34	657.062,30
Jasa Perusahaan	283.674,36	305.348,78	330.742,93	380.317,15	392.614,45

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	908.868,06	1.095.845,49	1.162.900,75	1.305.307,97	1.397.854,30
Jasa Pendidikan	118.270,51	128.660,46	140.457,44	148.757,63	157.521,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.449,30	125.530,54	138.779,22	150.126,97	162.667,89
Jasa Lainnya	157.955,49	177.005,68	199.165,54	213.878,80	235.102,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**54.248.327,96**	**64.963.006,00**	**74.227.269,06**	**85.333.875,01**	**54.831.757,54**

Sumber : Kabupaten Mimika dalam angka tahun 2020

Tabel 3.9
Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan menurut lapangan usaha di Kab. Mimika, 2015-2019

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.092.923,9	1.161.649,48	1.193.674,56	1.202.076,81	1.203.353,00
Pertambangan dan Penggalian	49.510.078,5	56.648.911,59	58.598.049,05	65.086.334,12	36.029.230,23
Industri Pengolahan	86.823,2	93.498,91	100.987,02	107.530,20	101.482,13
Pengadaan Listrik dan Gas	7.596,4	7.834,71	8.177,62	8.522,86	8.992,93
Pengasaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.151,4	6.300,30	6.457,80	6.494,77	6.355,27
Konstruksi	1.306.343,2	1.464.410,73	1.569.790,84	1.677.841,07	1.900.994,44
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda Motor	1.259.813,8	1.350.489,62	1.438.864,35	1.514.183,61	1.589.502,87
Transportasi dan Pergudangan	654.532,2	704.249,97	754.850,51	793.976,19	836.907,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	158.233,3	168.032,58	179.027,69	189.292,28	198.598,70
Informasi dan Komunikasi	1.059.641,1	1.108.914,44	1.163.555,09	1.210.813,69	1.231.090,61
Jasa Keuangan dan Asuransi	273.345,2	288.718,09	296.372,35	289.093,09	291.444,91
Real Estate	377.408,1	397.033,29	418.313,35	430.528,94	460.513,11
Jasa Perusahaan	268.903,5	279.121,83	290.134,30	310.478,12	314.349,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	814.018,2	901.932,15	936.092,84	1.020.802,69	1.055.512,54
Jasa Pendidikan	109.241,7	113.939,07	119.088,12	124.007,70	129.681,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.074,7	103.294,01	109.737,98	116.011,70	122.045,50
Jasa Lainnya	135.391,9	144.056,98	153.440,34	161.692,36	172.173,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	**57.214.520,4**	**64.942.379,7**	**67.336.613,8**	**74.249.680,2**	**45.652.227,3**

Sumber : Kabupaten Mimika dalam angka tahun 2020

a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Di bidang pertanian, tanaman pangan yang cukup banyak ditanam di kabupaten Mimika yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan sayur-sayuran. Produksi tanaman pangan yang terbesar di Kabupaten Mimika adalah Ubi jalar yaitu 384 ton. Produksi masing-masing tanaman pangan di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Produksi Tanaman Pangan menurut Distrik di Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Distrik	Produksi (ton)					
		Padi Sawah	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Ubi Kayu	Ubi Jalar
1	Agimuga	-	1	-	-	4	11
2	Amar	-	-	-	-	2	5
3	Alama	-	-	-	-	3	8
4	Hoya	-	-	-	-	3	9
5	Iwaka	67	71	5	-	17	42
6	Jila	-	1	-	-	3	17
7	Jita	-	2	-	-	3	13
8	Kuala Kencana	-	107	17	-	34	71
9	Kwamki Narama	-	6	2	-	8	20
10	Mimika Barat	-	3	-	-	3	7
11	Mimika Barat Jauh	-	3	-	-	3	6
12	Mimika Barat Tengah	-	3	-	-	4	7
13	Mimika Baru	-	173	22	-	41	89
14	Mimika Tengah	-	3	-	-	3	5
15	Mimika Timur	15	75	3	-	9	23
16	Mimika Timur Jauh	-	-	-	-	3	5
17	Tembagapura	-	1	-	-	2	15
18	Wania	-	83	5	-	10	31
Jumlah		**25**	**532**	**54**	**-**	**155**	**384**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

b. Sektor Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura yang diusahakan adalah jenis tanaman sayuran. Berdasarkan data Badan Pusat Stratistik (BPS) tahun 2020, jenis tanaman sayuran yang banyak diusahakan adalah bawang daun, petsai, kacang panjang, cabai, tomat, terong dan bayam. Produksi terbanyak adalah petsai yaitu sebanyak 173,93 Ton.

Tabel 3.11
Produksi Tanaman Sayuran menurut Distrik di Kabupaten Mimika
Tahun 2019

No	Distrik	Cabai	Kubis	Petsai	Tomat
1	Agimuga	2,07	-	5,99	1,85
2	Amar	2,91	1,29	7,22	2,69
3	Alama	0,50	3,42	8,85	2,69
4	Hoya	1,96	1,57	3,47	1,85
5	Iwaka	12,66	4,2	10,98	10,92
6	Jila	3,53	6,72	8,62	3,08
7	Jita	6,22	-	5,49	4,76
8	Kuala Kencana	6,16	3,64	8,57	3,69
9	Kwamki Narama	1,74	-	3,14	3,47
10	Mimika Barat	1,46	-	4,03	2,18
11	Mimika Barat Jauh	4,42	-	15,12	4,93
12	Mimika Barat Tengah	2,07	-	6,72	3,36
13	Mimika Baru	60,2	31,19	50,01	45,53
14	Mimika Tengah	1,34	-	4,31	2,58
15	Mimika Timur	7,45	1,18	7,89	4,82
16	Mimika Timur Juah	2,29	-	6,94	2,97
17	Tembagapura	2,41	2,52	2,8	3,31
18	Wania	5,32	5,26	13,78	3,86
Jumlah		**124,71**	**60,99**	**173,93**	**108,04**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

c. Sektor Perikanan

Sektor perikanan Kabupaten Mimika terdiri atas perikanan laut dan perikanan umum. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Distrik dan Subsektor di Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Distrik	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
1	Agimuga	5	147	152
2	Amar	1.085	85	1.170
3	Alama	-	-	-
4	Hoya	-	-	-
5	Iwaka	334	8	342
6	Jila	-	-	-
7	Jita	6	169	175
8	Kuala Kencana	-	-	-
9	Kwamki Narama	-	-	-
10	Mimika Barat	973	91	1.064

No	Distrik	Perikanan Laut	Perairan Umum	Jumlah
11	Mimika Barat Jauh	707	54	761
12	Mimika Barat Tengah	750	94	844
13	Mimika Baru	-	-	-
14	Mimika Tengah	855	133	988
15	Mimika Timur	1.003	114	1.117
16	Mimika Timur Jauh	950	154	1.104
17	Tembagapura	-	-	-
18	Wania	89	4	93
Jumlah		**6.758**	**1.052**	**7.810**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

d. Sektor Peternakan

Di bidang peternakan, populasi ternak yang paling banyak di Kabupaten Mimika adalah jenis ternak babi yaitu sebesar 22.688.

Tabel 3.13
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Mimika Tahun 2018

No	Distrik	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Agimuga	202	-	-	-	-	-
2	Amar	-	-	-	-	-	-
3	Alama	-	-	-	-	-	-
4	Hoya	-	-	-	-	-	-
5	Iwaka	425	-	-	782	21	1028
6	Jila	-	-	-	-	-	-
7	Jita	-	-	-	-	-	-
8	Kuala Kencana	318	-	-	316	-	6953
9	Kwamki Narama	-	-	-	-	-	3197
10	Mimika Barat	-	-	-	-	-	-
11	Mimika Barat Jauh	-	-	-	-	-	-
12	Mimika Barat Tengah	-	-	-	-	-	-
13	Mimika Baru	180	-	-	285	-	6.810
14	Mimika Tengah	-	-	-	-	-	-
15	Mimika Timur	47	-	-	195	-	1.044
16	Mimika Timur Jauh	-	-	-	-	-	68
17	Tembagapura	-	-	-	-	-	2484
18	Wania	235	-	-	388	-	1104
Jumlah		**1.307**	**-**	**-**	**1.966**	**43**	**22.688**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2019

BAB IV
KABUPATEN MIMIKA
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

A. POTENSI WISATA KABUPATEN MIMIKA

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dapat disimpulkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Pariwisata adalah perpindahan sementara orang-orang kedaerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-harinya, kegiatan yang dilakukannya adalah fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya (Fandeli, 1995: 47).

Pariwisata merupakan salah satu industri baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor produktivitas lainnya. Pariwisata dipandang sebagai industri yang kompleks karena dalam industri pariwisata terdapat industri-industri yang berkaitan seperti kerajinan tangan, cindera mata, penginapan dan transportasi.

Pada hakekatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan baik kepentingan sosial maupun kebudayaan. Kegiatan wisatawan dalam berwisata tentulah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik faktor penarik maupun faktor pendorong dalam melakukan kegiatan perjalanan pariwisata.

Kabupaten Mimika dengan luas wilayah mencapai 21.693,50 Km2, yang meliputi wilayah daratan dan pesisir/kepulauan. Kondisi ini tentunya menyimpan banyak obyek wisata menarik untuk dikunjungi, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan. Potensi obyek wisata ini sebagian besar belum dikelola, baik oleh Pemerintah Daerah, maupun Swasta/Investor. Terbatasnya infrastruktur dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk pengembangan/ pengelolaan obyek wisata menjadi salah satu kendala sehingga banyaknya obyek-obyek wisata di wilayah ini tidak dikelola. Faktor lain tentunya menyangkut masalah daya tarik serta promosi wisata yang tidak dilakukan secara massif sehingga wisatawan, baik mancanegara maupun lokal belum tertarik untuk berkunjung ke berbagai obyek wisata di Kabupaten Mimika.

Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata, jenis Industri Pariwisata yang berbasis pada aktivitas pemanfaatan flora dan fauna atau wisata budaya dan wisata sejarah dapat dijadikan sebagai sumber devisa di masa-masa mendatang. Jadi jenis wisata yang memungkinkan untuk dikembangkan pada tingkat awalnya adalah wisata alam dan wisata budaya di masa mendatang. Salah satu yang mendukung pengembangan wisata budaya adalah adanya festival yang diadakan tiap tahun yaitu Festival Kesenian Rakyat (Kamoro

Kakuru). Sedangkan obyek dan daya tarik wisata yang telah ada dan dapat dimanfaatkan adalah Taman Nasional Lorentz. Sektor pariwisata di kabupaten Mimika saat ini belum berkembang secara optimal, dibanding dengan kekayaan obyek wisata yang ada. Potensi pariwisata yang ada dapat dilihat pada pembahasan berikut :

1. Potensi Objek Wisata Alam

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Berdasarkan pengertian diatas, Wisata Alam memiliki pengertian wisata (obyek wisata) yang daya tarik utamanya adalah bersumber kepada keindahan alam, sumber daya alam dan tata lingkungannya, dengan demikian maka pengertian Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam.

Daya tarik wisata alam di wilayah Kabupaten Mimika, cukup bervariasi, seperti wisata pantai, wisata pegunungan, dan berbagai obyek wisata alam lainnya. Berdasarkan data RTRW Kabupaten Mimika jumlah obyek wisata alam di Kabupaten Mimika sebanyak 10 obyek wisata dan semuanya belum terkelola dengan baik. Daya tarik wisata tersebut tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Mimika. Daya tarik wisata alam di Kabupaten Mimika ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, beberapa diantaranya memiliki ciri khas dan

keunikan tersendiri dibandingkan obyek wisata yang sama di daerah lainnya, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk dikunjungi. Berikut adalah berbagai objek wisata alam yang ada di Kabupaten Mimika :

Tabel 4.1
Potensi Objek Wisata Alam di Kabupaten Mimika

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Pulau Bidadari	Distrik Mimika Timur Jauh
2.	Pulau Puriri	Distrik Mimika Timur Jauh
3.	Pantai Kampus Biru	Distrik Mimika Tengah
4.	Pantai Kawar	Distrik Amar
5.	Pantai Ipaya	Distrik Amar
6.	Pantai Keakwa	Distrik Mimika Tengah
7.	Ekowisata Mangrove Keakwa	Distrik Mimika Tengah
8.	Pantai Mikapi	Distrik Mimika Barat Tengah
9.	Kali Iwaka	Distrik Iwaka
10.	Kali Mayon	Distrik Kuala Kencana
11.	Kali Kiura	Distrik Mimika Barat
12.	Taman Nasional Lorentz	Distrik Agimuga
13.	Cartenz	Distrik Tembagapura
14.	Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu	Distrik Mimika Timur
15.	Ekowisata Mangrove Pelabuhan Perikanan	Distrik Mimika Timur
16.	Pulau Yapero	Distrik Mimika Timur Jauh
17.	Air Terjun Urumuka	Distrik Mimika Barat Tengah

Sumber : Hasil survey primer dan Sekunder tahun 2020

Dari tabel di atas, maka untuk mengetahui potensi daya tarik wisata alam dapat diuraikan beberapa DTW alam yang ada di Kabupaten Mimika sebagai berikut :

a. Pulau Bidadari



Gambar 4.1 Pulau Bidadari

Pulau Bidadari merupakan salah satu obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Timur Jauh. Jarak dari Kota Timika sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari pelabuhan Poumako. Pulau Bidadari memiliki obyek dan daya tarik wisata yang cukup indah, yaitu berupa pantai dengan panorama alam yang indah dan lekukan bibir pantai yang landai. Obyek dan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Pulau Bidadari, apabila tidak dilakukan penjagaan dan pelestarian lingkungan khususnya kebersihan pantai, maka akan menjadi kendala dalam pengembangan kawasan wisata ini. Sehingga perlu pembenahan dan pelestarian terhadap lingkungan disekitar pantai.

b. Pulau Puriri



Gambar 4.2 Burung Camar di Pulau Puriri

Pulau Puriri terletak di Distrik Mimika Timur Jauh yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) Menit dari Pelabuhan Poumako. Karena kecil, tidak perlu waktu lama untuk mengitari pulau ini. Di bagian utara, ada semenanjung pasir yang terbentuk akibat

pendangkalan air laut. Di tempat ini biasanya camar dan burung laut lainnya melakukan sun bathing.

c. Pantai Kampus Biru

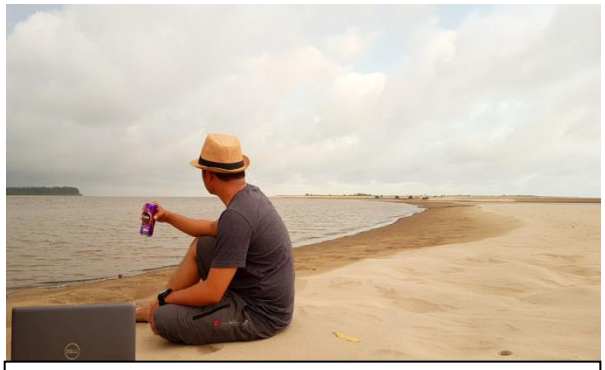


Gambar 4.3 Pantai Kampus Biru

Obyek wisata pantai kampus biru merupakan salah satu obyek wisata pantai di Kabupaten Mimika yang terletak di Distrik Mimika Tengah. Secara umum luas wilayah Kawasan Obyek Wisata Kampus Biru kurang lebih 105,13 Ha. Pantai kampus biru berbatasan langsung dengan laut arafuru sehingga yang menarik dari kawasan ini selain pasir pantainya yang putih adalah dimana pengunjung dapat melihat panorama matahari terbit (sunrise) dan matahari terbenam (sunset). Pada tepi pantai kampus biru terdapat beberapa rumah warga lokal/nelayan yang juga menyediakan ikan segar hasil melaut.

Nama kampus biru diberikan oleh penduduk setempat dikarenakan dulu ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Cendrawasih yang datang mencari tempat rekreasi, dan menemukan tempat tersebut. Selain itu, pulau kampus biru yang dapat ditempuh sekitar 90 menit dari pelabuhan poumako juga menyimpan sebuah keunikan dengan sumur air bersih (tawar).

d. Pantai Kawar



Gambar 4.4 Pantai Kawar

Pantai Kawar adalah Objek Wisata dengan Panorama Pantai berupa hamparan pasir putih yang luas dan pemandangan burung-burung camar yang berjemur pada sisi pantai yang menghadap ke laut arafuru. Pantai kawar berada di Distrik Amar Kabupaten Mimika yang berjarak + 13KM atau 30 menit. Jika ingin berkunjung ke Objek Wisata Pantai Kawar sebaiknya pada saat air surut sehingga hamparan pasir putihnya yang cukup luas dapat terlihat sambil menunggu matahari terbenam (sunset). Pantai kawar tidak hanya menyajikan pemandangan yang indah melainkan merupakan spot atau lokasi memancing yang banyak dikunjungi wisatawan.

e. Pantai Kekwa



Gambar 4.5 Pantai Kekwa

Pantai Kekwa merupakan salah satu obyek wisata Alam di Kabupaten Mimika dengan waktu tempuh 2 jam dari pelabuhan Amamapare. Pantai Kekwa memiliki pantai berpasir putih, bebas sampah dan pantainya cukup panjang. Pantai ini berhadapan langsung dengan Lautan Arafuru tanpa ada pulau lain di depannya sebagai penghalang.

f. Pantai Mikapi



Gambar 4.6 Pantai Mikapi

Pantai Uta/Pantai Mikapi dengan panorama pasir putih dan panorama sunset terletak di Kampung Uta dengan jarak dari pelabuhan poumako melalui sungai dan laut mencapai 128 Km. Pantai Mikapi merupakan obyek wisata alam pantai yang baru dan belum begitu populer bagi wisatwan di kabupaten Mimika, sehingga masih perlu upaya untuk mempromosikan dan melakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

g. Pantai Ipaya



Gambar 4.7 Pantai Ipaya

Pantai Ipaya merupakan salah satu obyek wisata pantai yang terletak di Distrik Amar dengan jarak dari pelabuhan poumako sekitar 62 Km. Ipaya merupakan singkatan dari nama 3 Kampung yakni Kampung Ipiri, Paripi dan Kampung Yaraya. Pantai Ipaya merupakan pantai dengan hamparan pasir putih yang luas. Selain itu ditempat ini terdapat potensi hasil pertanian dan perikanan yang cukup besar.

h. Kali Kiura



Gambar 4.8 Kali Kiura

Kali kiura adalah salah satu dari sekian banyak obyek wisata alam yang dituju warga untuk melepas kepenatan setelah melewati hari kerja. Kali yang terletak di Jalan Trans Nabire dengan jarak sekitar 71 Km dan waktu tempuh 2 hingga 3 jam selalu dipadati pengunjung khusunya dihari minggu. Pengunjung yang datang tidak hanya sekedar melihat bentangan air jernih dingin pegunungan atau sekedar mandi tetapi juga berkemah serta melakukan arung jeram. Dari sekian banyak kali di Mimika, Kiura merupakan kali asli dengan kondisi alam yang masih asri dan dilengkapi dengan bebatuan besar. Selain itu, air kali kiura tetap jernih meski musim hujan.

i. Kali Mayon



Gambar 4.9 Kali Mayon

Kali Mayon berjarak sekitar 45 menit dari Bandara Timika dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Kali Mayon biasanya dipenuhi pengunjung pada hari minggu. Pada hari-hari biasa, hanya beberapa orang saja yang menikmati kebeningan dan kesejukan disana. Selain mudah diakses karena

letaknya yang dipinggir jalan, tidak ada biaya untuk menikmati kali ini

Sebagai salah satu objek wisata alternatif di Kota Timika, Kali Mayon pernah didatangi oleh puluhan hingga ratusan warga Mimika yang hendak berekreasi. Namun kondisi tersebut tidak terjadi lagi setelah kali tersebut mengalami perubahan besar-besaran akibat dibuatnya jembatan beton oleh pemerintah. Tempat yang sebelumnya terkesan asri dengan rumput hijaunya, berubah menjadi gundukan pasir.

j. Kali Iwaka



Gambar 4.10 Kali Iwaka

Obyek wisata alam Kali iwaka terletak di daerah Kuala Kencana dan masih masuk dalam wilayah PT. Freeport, sekitar 30 menit dari kota Timika. Sungainya tidak terlalu besar dan kondisi air masih sangat jernih. Terdapat spot yang cukup dalam dengan pepohonan disekitarnya yang biasa dijadikan tempat lompat bagi para pengunjung yang hendak mandi.

k. Ekowisata Mangrove Keakwa

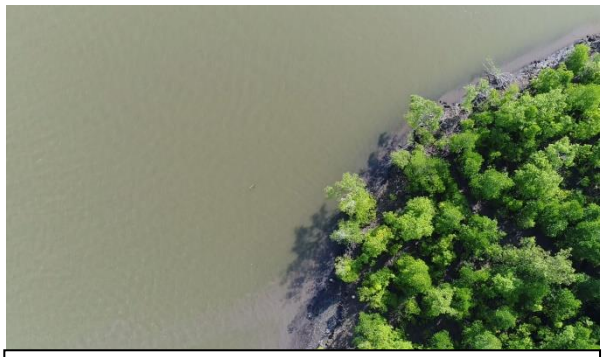


Gambar 4.11 Hutan Mangrove Keakwa

Obyek wisata alam berupa ekowisata hutan mangrove merupakan potensi wisata yang sangat potensial untuk

dikembangkan di Kabupaten Mimika. Apalagi hutan mangrove di Papua mencapai 1,3 juta Ha atau sekitar sepertiga dari luas hutan bakau di Indonesia. Taman Hutan Raya (Tahura) Mangrove yang ada di Kabupaten Mimika merupakan asset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik secara berkelanjutan. Pihak pemerintah, swasta dan berbagai pihak lainnya harus dapat melindungi kawasan hutan mangrove di Kabupaten Mimika sebab potensi tersebut tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian daerah tetapi juga dapat menjadi salah satu upaya mitigasi bencana di kawasan pesisir. Obyek ekowisata mangrove keakwa dapat ditempuh dengan jarak sekitar 42 Km dari pelabuhan Poumako.

1. Ekowisata Mangrove Pelabuhan Perikanan



Gambar 4.12 Hutan Mangrove Perikanan

Selain Obyek wisata mangrove di Kekwa terdapat juga potensi mangrove yang akan dikembangkan menjadi obyek wisata di Pelabuhan Perikanan Distrik Mimika Timur. Potensi mangrove yang terletak ditepi sungai dan mudah diakses melalui jalan poros Timika-Poumako dengan jarak sekitar 40 Km dari Kota Timika dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor diharapkan dapat mempermudah aksesibiltas bagi para wisatawan.

m. Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu



Gambar 4.13 Kampung Pigapu

Obyek wisata alam berburu terletak di Kampung Pigapu Distrik Mimika Timur. Dengan kondisi alam yang masih alami dan jarak yang dapat ditempuh hanya sekitar 30 Km dari kota Timika menggunakan kendaraan bermotor akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

n. Taman Nasional Lorentz



Gambar 4.14 Taman Nasional Lorentz

Taman Nasional Lorentz adalah sebuah taman nasional yang terletak secara geografis terbentang pada 3°41′ – 5°30′ LS, 136°56′ – 139°09′ BT. Kawasan Taman Nasional Lorentz meliputi beberapa wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Asmat Propinsi Papua, serta beberapa kabupaten pemekaran baru seperti Kabupaten Nduga, Kabupaten Lanni Jaya dan Kabupaten Puncak. Bagian pulau yang berbentuk kepala burung ini memiliki kehidupan alam liar yang luas dan belum terjamah manusia. Salah satu wilayah di Papua tempat berlangsungnya kehidupan alam yang menakjubkan adalah

Taman Nasional Lorentz di Provinsi Papua. Taman Nasional Lorentz merupakan salah satu tempat wisata terindah di Indonesia bagian Timur. Pada 1999 taman nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah satu di antara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Membentang dari puncak gunung yang diselimuti Salju (5.030 meter dpl), hingga membujur ke perairan pesisir pantai dengan hutan bakau dan batas tepi perairan Laut Arafura. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, terdapat pula beberapa kekhasan dan keunikan adanya gletser di Puncak Jaya dan sungai yang menghilang beberapa kilometer ke dalam tanah di Lembah Baliem. Sebanyak 34 tipe vegetasi di antaranya hutan rawa, hutan tepi sungai, hutan sagu, hutan gambut, pantai pasir karang, hutan hujan lahan datar/lereng, hutan hujan pada bukit, hutan kerangas, hutan pegunungan, padang rumput, dan lumut kerak.

Taman nasional ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan ditunjang keanekaragaman budaya dan merupakan tempat kediaman sekitar 9 kelompok suku, yaitu:

- Suku Asmat dengan sub suku Joerat dan Emariu Ducur, terdapat di sebelah selatan batas timur TN. Lorentz .
- Suku Nduga, ke arah utara batas timur TN. Lorentz
- Suku Somahai , ke arah timur batas timur TN. Lorentz
- Suku Dani (Hupla, Mukoko, Hiriakup), sebelah timur batas timur TN. Lorentz.

- Suku Dani Barat/Lani, di sebelah timur batas utara TN. Lorentz.
- Suku Moni/Dem, disebelah barat batas utara TN. Lorentz.
- Suku Amungme/Damal, di sebelah selatan batas utara TN. Lorentz.
- Suku Sempan, dibagian selatan TN. Lorentz ditepi pantai selatan Papua.
- Suku Komoro dengan 13 sub suku, di batas barat TN. Lorentz.

i. Gunung Cartenz



Gambar 4.15 Puncak Cartenz

Puncak Carstenz dengan ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Puncak Carstens termasuk dalam tujuh gunung tertinggi di dunia yang disebut (seven summits). Gunung cartenz mencakup 3 wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Mimika. Untuk mencapai puncak cartenz, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh para pendaki. Jalur yang paling populer adalah dengan melintas melalui jalur pertambangan PT Freeport Indonesia. Jalur melalui Tembagapura tersebut sering dinilai sebagai jalur paling ideal, karena pendaki bisa memanfaatkan moda transportasi milik PT Freeport Indonesia.

o. Pulau Yapero



Gambar 4.16 Pulau Yapero

Pulau Yapero merupakan salah satu obyek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Timur Jauh. Jarak dari Kota Timika sekitar 100 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam dari pelabuhan Poumako. Lokasi pulau yapero berdekatan dengan pulau puriri dan pulau bidadari.

p. Air Terjun Urumuka



Gambar 4.17 Air Terjun Urumuka

Air terjun urumuka merupakan potensi wisata alam berupa air terjun setinggi lebih dari 100 meter disekitar wilayah Kapiraya atas tepat di daerah perbatasan Kabupaten Mimika dengan Kabupaten Deiyai, yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat Papua. Sungai urumuka dalam bahasa kamoro atau dalam bahasa Mee/Paniai disebut sungai Yawei mengalir dari hulu di Danau Paniai ke selatan menuju laut arafura. Potensi air terjun urumuka tidak hanya sebagai wisata alam namun juga dapat menjadi sumber Energi listrik bagi yang ditaksir bisa mencapai 1.300 mega watt.

2. Potensi Objek Wisata Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wisata Budaya memiliki arti bepergian bersamasama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat. Beberapa contoh wisata budaya meliputi upacara adat, seni pertunjukan adat, ritual-ritual, peninggalan nenek moyang dan lain sebagainya. Wisata berbasis budaya adalah salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Pariwisata jenis ini dibedakan dari minatminat khusus lain, seperti wisata alam, dan wisata petualangan. Ada 12 unsur kebudayaan yang dapat menarik kedatangan wisatawan, yaitu:

- Bahasa (language);
- Masyarakat (traditions);
- Kerajinan tangan (handicraft);
- Makanan dan kebiasaan makan (foods and eating habits);
- Musik dan kesenian (art and music);
- Sejarah suatu tempat (history of the region);
- Cara kerja dan teknologi (work and technology);
- Agama (religion) yang dinyatakan dalam cerita atau sesuatu yang dapat disaksikan;
- Bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata (architectural characteristic in the area);
- Tata cara berpakaian penduduk setempat (dress and clothes);
- Sistem pendidikan (educational system); dan
- Aktivitas pada waktu senggang (leisure activities).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, diharapkan daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Mimika memiliki beberapa unsur yang ada tersebut, sehingga obyek wisata yang

ada diwilayah ini dapat berkembang dan menjadi daya tarik wisata yang handal untuk dikelola dan dikembangkan sebagai pariwisata unggulan. Berikut ini terdapat beberapa obyek wisata budaya yang ada di Kabupaten Mimika :

Tabel 4.2
Potensi Objek Wisata Budaya di Kabupaten Mimika

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Kampung Kekwa	Distrik Mimika Tengah
2.	Kamoro Kakuru	Kota Timika
3.	Tugu Eme-neme	Distrik Mimika Baru
4.	Taman Mapurupuwau	Distrik Mimika Timur
5.	Kota Tua Kokonao	Distrik Mimika Barat

Sumber : Hasil survey primer dan Sekunder tahun 2020

Dari tabel di atas, maka untuk mengetahui potensi dan kendala dalam pengembangan obyek wisata budaya sebagaimana pada pembahasan berikut :

a. Kampung Kekwa



Gambar 4.18 Kampung Kekwa

Pada saat berkecamuknya Perang Dunia II, Keakwa menjadi basis utama pertahanan tentara Jepang melawan sekutu di bagian selatan Papua dan merupakan pelabuhan utama untuk mobilisasi peralatan tempur Jepang. Di ujung kampung baru juga terdapat lapangan terbang yang dibangun Jepang. Bukti-bukti peninggalan tentara Jepang di Keakwa masih dapat dijumpai hingga saat ini, seperti

sebuah tank baja, dua buah meriam, dan sebuah puing pesawat sekutu yang jatuh tertembak pasukan Jepang.

Puing pesawat itersebut hingga kini masih ada tersembunyi di tengah hu tan belantara belakang Kampung Ke akwa. Adapun dua buah meriam anti pesawat tempur kini tidak bisa lagi dilihat dari dekat karena sudah terkubur dalam laut. Warga baru bisa mendekati dua meriam itu saat air laut sedang surut. Abrasi di Keakwa sangat tinggi sehingga membutuhkan perhatian dari Pemda Mimika.

b. Festival Kamoro Kakuru



Gambar 4.19 Suku Kamoro

Festival kamoro kakuru merupakan festival yang menunjukan nilai-nilai budaya masyarakat suku kamoro di Kabupaten Mimika. Seluruh karya seni penduduk akan dipamerkan dalam acara adat yang berlangsung selama lima hari. Ritual itu akan dibuka dengan pemancangan Patung Mbitoro, simbol pemujaan terhadap roh leluhur. Hal tersebut melambangkan tekad warga Suku Kamoro untuk menjaga tradisi nenek moyang. Kakuru kali ini, adalah pertemuan tahunan keempat yang melibatkan lebih 40 desa warga Kamoro.

Untuk ikut berpesta, kelompok masyarakat yang hidup menyebar di dataran rendah dan pesisir selatan Kabupaten Mimika ini meninggalkan desanya untuk tinggal di bifak-bifak darurat dengan membawa karya-karya budaya terbaik yang mereka ciptakan. Ukiran, pahatan, nyanyian hingga tarian

akan mereka pertontonkan dalam kegiatan tersebut. Para seniman asli Kamoro mencoba menunjukkan kekayaan budaya yang selama ini nyaris punah tergerus desakan peradaban asing yang merasuki kehidupan mereka.

Namun kini festival kamoro kakuru tidak lagi dalaksanakan, Adapun kendala digelarnya kembali Festival Kamoro Kakuru adalah permasalahan pendanaan.

c. Tugu Perdamaian Eme-neme



Gambar 4.20 Tugu Eme Neme

Tugu yang berada di Kota Timika Kabupaten Mimika ini merupakan sebuah tugu yang melambangkan perdamaian bagi masyarakat Mimika, Berdirinya tugu ini ditandai dengan penandat anganan kesepekatan perdamaian oleh semua suku di wilayah itu pada tahun 2004 di Timika Indah yang dikenal dengan nama tugu perdamaian Eme Neme Yauware. Tugu ini memeliki motif ukiran khas suku kamoro, salah satu suku asli yang mendiami daerah pesisir pantai Kabupaten Mimika.

Motto tersebut merupakan penggabungan 2 bahasa dari 2 suku besar penduduk asli Kabupaten Mimika yaitu suku amungme dan suku kamoro. Eme berarti Teman (bahasa suku amungme), sedangkan yauware berarti semangat (bahasa suku kamoro).

d. Taman Mapurupuwau



Gambar 4.21 Taman Mapurupuwau

Taman Mapurupuwau merupakan taman yang menunjukkan identitas masyarakat kamoro di Kabupaten Mimika. Taman yang dibangun untuk mencerminkan kearifan lokal masyarakat papua yang tinggal dipesisir. Taman Mappuruwau yang terletak di area kampong Mware Distrik Mimika Timur Tersebut menyajikan patung Mapuruppuwau yang merupakan tokoh sejarah peradaban suku Kamoro. Patung Mapuruppuwau atau yang lebih dikenal masyarakat setempat dengan nama Tete Mapuru tersebut telah dibangun Pememerintah Kabupaten sejak tahun 2006.

e. Kota Tua Kokonao



Gambar 4.22 Kokonao

Kokonao adalah kota sejarah yang memegang peranan penting dalam sejarah Kabupaten Mimika. Dulu Kokonao disebut-sebut sebagai kota yang besar dan menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal besar. Bukan hanya kapal dari Indonesia tapi juga kapal dari luar negeri. Kota ini lebih tua daripada kota Timika. Tahun 1927 Misionaris Katolik dari Belanda sudah mendirikan gereja, sekolah, rumah sakit dan asrama di Kokonao. Dua tahun

sebelumnya Pemerintah Belanda sudah hadir di sana. Timika baru mulai dibangun pada 1967.

Di masa lalu, Kokonao menjadi pusat pendidikan untuk masyarakat suku Kamoro dari berbagai kampung. Misionaris membawa guru-guru dari Kei untuk menjadi guru kampung. Sebagian pemuda Kamoro dikirim ke Merauke untuk meneruskan pendidikan mereka menjadi guru. Ada pula yang dilatih untuk menjadi tukang kayu yang terampil. Kaum wanitanya dididk untuk menjadi bidan dan perawat. Suster-suster dari Belanda pun melatih para putri agar memiliki keterampilan. Mereka diasramakan dan dididik di Sekolah Kepandaian Putri (SKP), yang kurikulumnya antara lain memasak dan menjahit. Predikat sebagai "Kota Tua" memang sudah melekat pada Kokonao. Selain di gapura Bandara Apuriyu, "Kota Tua" terukir pula pada prasasti peresmian lapangan sepak bola Kokonao yang ditandatangani oleh Freddy Numberi dan pada tugu selamat datang di Dermaga Utama.

3. Potensi Objek Wisata Buatan

Perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan, baik dari segi jumlah obyek wisata maupun jenis obyek wisata yang ditawarkan. Salah satu jenis wisata yang berkembang cepat adalah wisata buatan. Terdapat banyak jenis obyek-obyek wisata buatan, seperti agrowisata, kolam permandian/water boom, wisata kuliner, wisata belanja, dan masih banyak lagi jenis wisata buatan lainnya. Banyak sekali tempatempat wisata yang dibuat oleh tangan manusia yang hasilnya sangat menakjubkan dan layak untuk dikunjungi sebagai tempat wisata.

Saat ini terdapat beberapa obyek wisata buatan yang ada di Kabupaten Mimika, seperti agrowisata, wisata kuliner, pemandian, kolam renang, dll. Untuk lebih jelasnya jenis dan lokasi wisata buatan di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Potensi Objek Wisata Buatan di Kabupaten Mimika

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Padang Golf Rimba Irian	Distrik Kuala Kencana
2.	Gelanggang Renang	Distrik Kuala Kencana
3.	Waterboom Karang Senang	Distrik Kuala Kencana
4.	Wisata Air Pelangi	Distrik Wania
5.	Taman Rekreasi Kuala Kencana	Distrik Kuala Kencana
6.	Taman Rekreasi (Pemancingan)	Distrik Mimika Baru

Sumber : Hasil survey primer dan Sekunder tahun 2020

a. Padang Golf Rimba Irian



Gambar 4.23 Padang Golf Rimba Irian

Berlokasi di jalan Mawar no. 100, Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, padang golf istimewa ini menawarkan pesona rimba yang tertata rapi. Keindahan tersebut dapat terlihat dengan balutan hutan hijau berpadu dengan kekuatan karakter alam khas negeri Papua. Menghadirkan udara sejuk dengan kondisi lapangan di tengah rimba memang menjadi magnet tersendiri pada nuansa hutan yang bersahabat. Perpaduan antara padang golf dan kawasan hutan sehingga dapat meningkatkan minat para penikmat golf. Terdapat tiga tipe pepohonan utama yang tumbuh subur di sana, yakni matoa, beringin, dan kayu susu.

Keistimewaan course ini memang sesuai dengan namanya yakni Rimba Irian. Hutan-hutannya memang asli dengan curah hujan yang terbilang tinggi. Padang golf ini menawarkan driving range dengan pemandangan yang serba hutan, kemudian terdapat pula putting green, cheaping, bunker practice, gazebo, restoran, clubhouse, pro shop, playground, man+ladies loker, dan fasilitas lainnya. Coursescape jempolan milik PT Freeport Indonesia ini akan dipersiapkan untuk menyambut PON 2020 yang dimana, Klub Golf Rimba Irian akan menjadi tuan rumah dengan menyiapkan fasilitas terbaik di tanah Papua.

b. Gelanggang Renang



Gambar 4.24 Kolam Renang

Distrik Kuala Kencana adalah sebuah distrik di Kabupaten Mimika, Papua, Indonesia. Distrik ini dikelola sepenuhnya oleh PT. Freeport Indonesia. Kuala Kencana merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki sistem saluran air kotor yang lalu disalurkan ke pusat pengelolaan limbah. Terdapat fasilitas kolam/gelanggang renang didalam kawasan kuala kencana yang biasa dimanfaatkan untuk melepas penat.

c. Taman Kuala Kencana



Gambar 4.25 Taman Kuala Kencana

Selain Kolam Renang terdapat juga obyek wisata berupa taman rekreasi didalam kawasan kuala kencana, Taman yang tertata rapi dengan ciri khas patung dan ukiran papua membuat benyak orang datang berkunjung walau hanya sekedar berfoto.

d. Waterboom Karang Senang



Gambar 4.26 Waterboom Karang Senang

Waterboom Karang senang merupakan tempat permanidan bagi dewasa dan anak-anak. Waterboom karang senang terletak di Jl. Agimuga, Kelurahan Karang senang. Selain lokasinya yang mudah diakses waterboom ini berdekatan dengan Kantor Bupati Mimika.

e. Wisata Air Pelangi



Gambar 4.27 Wisata Air Pelangi

Selain Waterboom Karang senang terdapat juga sebuah permandian/wisata air pelangi km. 8 di kabupaten Mimika. Sarana rekreasi yang dekat dari perkotaan dan area yang mudah dijangkau serta terdapat berbagai fasilitas seperti pemancingan membuat tempat ini banyak dikunjungi terutama pada akhir pekan.

f. Taman Rekreasi Kota Timika (Pemancingan)



Gambar 4.28 Lokasi Taman Rekreasi

Potensi obyek wisata buatan yang terdapat di Kota Timika yaitu Taman Rekreasi yang merupakan lokasi bekas galian penambangan pasir di Kota Timika. Taman rekreasi yang memiliki luas sekitar 65,2 Ha masih dalam tahap pengembangan oleh pemerintah daerah sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu obyek wisata yang menarik banyak pengunjung dan wisatawan.

Beberapa fasilitas yang direncanakan di dalam kawasan taman rekreasi Kota Timika yaitu Kolam renang, Gazebo, Penangkaran burung, lapangan tenis, tempat pentas seni/budaya, restaurant dan jogging track.

B. KETERSEDIAAN AKOMODASI WISATA KABUPATEN MIMIKA

Akomodasi wisata adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang ketika berwisata. Akomodasi bisa berupa tempat dimana seseorang wisatawan bisa menginap, beristirahat, makan, minum, mandi dan sebagainya. Akomodasi Pariwisata Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa penginapan, Pelayanan serta Penyediaan kepada wisatawan selama melakukan perjalanan di daerah objek wisata. Ada beberapa jenis penginapan yang bisa disewa dan digunakan sebagai tempat menginap atau tinggal sementara berdasarkan fasilitas, pelayanan dan harga sewa. Berkaitan dengan penginapan (akomodasi) terdapat pengertian okupansi adalah jumlah unit kamar yang sudah dihuni atau sudah disewa di dalam sebuah penginapan.

1. Hotel

   Hotel adalah usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Hotel memiliki 2 jenis yaitu hotel berbintang dan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan data badan pusat statistik Kabupaten Mimika pada tahun 2016 terdapat 34 unit hotel yang yang berada di Distrik Kuala Kencana, Distrik Kwamki Narama dan Distrik Mimika Baru.

2. Resort

   Resort adalah jenis penginapan yang dibangun di daerah yang memiliki pemandangan alam yang indah seperti daerah pantai atau pegunungan dengan fasilitas yang mengedepankan unsur rekreasi berupa sarana olahraga, hiburan, taman bermain

anak ataupun tempat belanja. Hingga saat ini Belum terdapat akomodasi berupa Resort di Kabupaten Mimika.

3. Cottage (Bungalow)

   Cottage atau sering disebut bungalow mirip dengan resort yaitu akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai, danau atau pegunungan dengan bentuk bangunan – bangunan terpisah seperti pondok. Umumnya disewakan untuk keluarga dan dilengkapi dengan fasilitas rekreasi. Akomodasi berupa Cottage juga belum terdapat di Kabupaten Mimika.

4. Villa

   Villa adalah jenis penginapan berbentuk rumah hunian yang biasanya disewakan untuk tempat tinggal sekaligus berlibur. Villa umumnya berada di daerah yang jauh dari keramaian di daerah pegunungan atau pantai dengan hawa sejuk dan suasana asri. Hingga saat ini Belum terdapat akomodasi berupa Villa di Kabupaten Mimika

5. Hostel (Dormitory

   Hostel ini jenis penginapanyang mirip asrama dimana satu kamar bisa diperuntukkan bagi beberapa orang dengan beberapa tempat tidur. Hostel ini cocok untuk para backpacker atau rombongan yang benar-benar menghemat budget. Akomodasi berupa hostel belum terdapat di Kabupaten Mimika.

6. Restoran/Rumah Makan

   Restoran/Rumah Makan Merupakan perusahaan yang menyediakan jasa penyediaan makanan dan minuman bagi wisatawan. Di Kabupaten Mimika Rumah makan merupakan Industri Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman yang sangat pesat perkembangannya. Rumah Makan yang terdapat di

Kabupaten Mimika berjumlah 359 Unit yang tersebar di 6 Kecamatan yang berada di Kabupaten Mimika.

7. Biro Perjalanan wisata (Travel)

Travel Agent Merupakan badan usaha yang memberikan penerangan/informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia perjalanan. Di wilayah Kabupaten Mimika telah tersedia Biro Perjalanan Wisata yang tersebar di wilayah perkotaan Timika.

Tabel 4.4
Sebaran Hotel di Kabupaten Mimika

No.	Nama Hotel	Lokasi
1.	Hotel Kangguru	Jl. Cendrawasih SP 3
2.	Hotel Amole 2	Jl. Cendrawasih SP 2
3.	Hotel Kangguru	Jl. Cendrawasih SP 2
4.	Hotel De Resto 66	Jl. Cendrawasih SP 2
5.	Hotel Komorotame	Jl. Cendrawasih SP 2
6.	Hotel Noken Timika	Jl. Cendrawasih SP 2
7.	Hotel Timika Raya	Jl. Cendrawasih SP 2
8.	Banne Haritage Hotel	Jl. Yos Sudarso
9.	Hotel Serayu	Jl. Yos Sudarso
10.	Grand Tembaga Hotel	Jl. Yos Sudarso
11.	Hotel Intsia	Jl. Yos Sudarso
12.	Hotel Permata	Jl. Yos Sudarso
13.	Hotel Timika Indah	Jl. Ahmad Yani
14.	Hotel Grand Papua	Jl. Ahmad Yani
15.	Hotel Lawamene Timika Papua	Jl. Ahmad Yani
16.	Hotel Sawitto II	Jl. Bhayangkara
17.	Hotel Maspulindo	Jl. Elang
18.	Hotel Anggrek	Jl. Anggrek
19.	Rumah Sewa Pak Dom	Atuka
20.	Timika Golden Hotel	Jl. Yos Sudarso
21.	Hotel Oss de' Villa	Jl. Hasanuddin
22.	Rimba Papua Hotel	Jl. Bandara
23.	Hotel Bisnis	Jl. Perjuangan
24.	Hotel Horison	Jl. Hasanuddin

C. PENDUDUK SEBAGAI POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA

Pembangunan di Kabupaten Mimika sudah semestinya mengandalkan sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Sumber daya manusia pariwisata merupakan orang-orang yang berkecimpung di usaha jasa pariwisata, tidak hanya mengelola dan mengorganisasi tetapi juga memanfaatkannya sebagai mata pencaharian sehari-hari. Jumlah penduduk di Kabupaten Mimika yang tersebar di Lokasi wisata berada di 12 Distrik dengan sebaran jumlah penduduk sebagai berikut :

1. Distrik Agimuga

Pada tahun 2015 Distrik Agimuga mengalami pemekaran menjadi 8 Kampung. Pada tahun 2018 Jumlah penduduk mengalami peningkatan menjadi 998 oang yang terdiri atas 525 untuk penduduk laki-laki dan 473 untuk penduduk perempuan. Untuk Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Keadaan Penduduk Distrik Agimuga Berdasarkan Kampung Tahun 2018

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Fakafuku	106	104	210
2	Kiliarma	28	28	56
3	Amungun	43	39	82
4	Aramsolki	126	115	241
5	Masasimamo	47	46	93
6	Emogoma	63	63	126
7	Emkoma Halama	50	35	85
8	Hinat Untung	62	43	105
Jumlah		**525**	**473**	**998**

Sumber : Distrik Agumuga Dalam Angka Tahun 2019

2. Distrik Amar

Jumlah penduduk Distrik Amar pada tahun 2014 adalah 1.865 jiwa dan terjadi penambahan pada tahun 2018 berjumlah 2.023 jiwa, terdiri dari 1.047 orang laki-laki dan 976 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6
Keadaan Penduduk Distrik Amar Berdasarkan Kampung Tahun 2018

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Manuare	92	88	180
2	Kawar	169	131	300
3	Amar	225	220	445
4	Ipiri	198	189	387
5	Paripi	182	172	354
6	Yaraya	181	176	357
Jumlah		**1.047**	**976**	**2.023**

Sumber : Distrik Amar Dalam Angka Tahun 2019

3. Distrik Mimika Barat

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Distrik Mimika Barat adalah sebanyak 2478 jiwa, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 2680 jiwa dengan laju pertumbuhan 1%. Untuk lebih jelasnya pada table berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Distrik Mimika Barat Menurut Kampung Tahun 2018

No.	Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kokonao	255	177	432
2	Migiwia	395	325	720
3	Mimika	192	204	396
4	Kiyura	190	197	387
5	Aparuka	67	63	130
6	Apuri	191	133	324
7	Atapo	144	147	291
	Jumlah	1.434	1.246	2.680

Sumber : Distrik Mimika Barat dalam Angka 2019

4. Distrik Iwaka

Jumlah penduduk Distrik Iwaka pada tahun 2014 adalah 6.844 jiwa, terdiri dari 3.724 orang laki-laki (54,41 persen) dan 3.120 jiwa perempuan (45,59 persen). Sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 7.405 jiwa, terdiri dari 3.997 jiwa penduduk laki-laki dan 3.408 jiwa penduduk perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8
Keadaan Penduduk Distrik Iwaka Berdasarkan Kampung Tahun 2018

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Iwaka	499	392	891
2	Limau Asri	465	387	852
3	Limau Asri Barat	686	656	1.342
4	Naena Muktipura	876	678	1.554
5	Mulia Kencana	739	616	1.355
6	Wangirja	529	490	1.019
7	Pigapu	203	189	392
Jumlah		**3.997**	**7.405**	**7.405**

Sumber : Distrik Iwaka Dalam Angka Tahun 2019

5. Distrik Kuala Kencana

Jumlah penduduk Distrik Kuala Kencana pada tahun 2018 mencapa 17.676 jiwa. Rasio jenis kelamin secara keseluruhan di Distrik Kuala Kencana adalah 120,51 dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki sebanyak 9.660 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 8.016 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Distrik Kuala Kencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Jumlah Penduduk Distrik Kuala Kencana Menurut Kampung Tahun 2015

No.	Kampung/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuala Kencana	1.969	1.526	3.495
2	Pioka Kencana	1.060	823	1.883
3	Mimika Gunung	590	448	1.038
4	Karang Senang	1.760	1.520	3.280
5	Karya Kencana	1.056	913	1.969
6	Bhintuka	1.100	831	1.931
7	Jumbi	703	608	1.311
8	Utikini Baru	498	472	970
9	Utikini II	470	444	914
10	Utikini III	454	431	885
Jumlah		9.660	8.016	17.676

Sumber : Distrik Kuala Kencana dalam Angka 2016

6. Distrik Mimika Barat Tengah

Jumlah penduduk Dsitrik Mimika Barat Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 2.351 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kampung/kelurahan Mupuruka dengan jumlah penduduk mencapai 440 jiwa dan yang terkecil adalah 139 jiwa di kampung/kelurahan Wakia. Jumlah penduduk masing kampung/kelurahan di Distrik Mimika Barat Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Km)		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pronggo	157	190	347
2	Kipia	186	166	352
3	Mapar	116	112	228
4	Akar	147	131	278
5	Kapiraya	108	87	195
6	Uta	99	102	201
7	Mupuruka	217	223	440
8	Wumuka	85	86	171
9	Wakia	74	65	139
Jumlah		1.189	1.162	2.351

Sumber : Distrik Mimika Barat Tengah dalam Angka 2019

7. Distrik Mimika Baru

Penduduk Distrik Mimika Baru pada tahun 2018 di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kampung/kelurahan yang memiki jumlah penduduk terbanyak adalah Koperapoka sedangkan Kampung/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit adalah Nayaro.

Tabel. 4.11
Jumlah Penduduk Distrik Mimika Baru
menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Koperapoka	11.379	9.678	21.057
2	Otomona	8.721	7.119	15.840
3	Perintis	2.049	1.751	3.801
4	Pasar Sentral	3.007	2.453	5.460
5	Sempan	3.697	3.192	6.889
6	Kwamki	5.915	5.241	11.156
7	Timika Indah	5.378	4.485	9.863
8	Dingonarama	4.297	3.840	8.137
9	Kebun Sirih	5.608	4.770	10.378
10	Timika Jaya	2.804	2.424	5.228
11	Wanagon	2.243	1.939	4.1828
12	Ninabua	1.201	1.038	2.239
13	Hangatji	1.763	1.523	3.286
14	Nayaro	249	238	487
Jumlah		**54.311**	**49.692**	**108.003**

Sumber: Distrik Mimika Baru dalam Angka 2019

8. Distrik Mimika Tengah

Penduduk Distrik Mimika Tengah pada tahun 2019 di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kampung/kelurahan yang memiki jumlah penduduk terbanyak adalah Keakwa sedangkan Kampung/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit adalah Tiwaka.

Tabel 4.12
Jumlah Penduduk Distrik Mimika Tengah dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Keakwa	416	395	811
2	Tiwaka	311	293	604
3	Atuka	406	349	755
4	Aikawapuka	327	316	643
5	Kamora	363	349	712
Jumlah		**1.823**	**1.702**	**3.525**

Sumber: Distrik Mimika Tengah dalam Angka 2019

9. Distrik Mimika Timur

Penduduk Distrik Mimika Timur pada tahun 2019 di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki. Kampung/kelurahan yang memiki jumlah penduduk terbanyak adalah Pomako sedangkan Kampung/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk sedikit adalah Tipuka.

Tabel. 4.13
Jumlah Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Pomako	1.415	1.011	2.426
2	Tipuka	273	254	527
3	Hiripau	937	713	1.650
4	Kaugapu	632	601	1.233
5	Wania	379	362	741
6	Mware	594	480	1.074
Jumlah		**4.230**	**3.421**	**7.651**

Sumber: Distrik Mimika Timur dalam Angka 2019

10. Distrik Mimika Timur Jauh

Jumlah Penduduk Distrik Mimika Timur Jauh pada tahun 2019, kampung yang memiliki penduduk tertinggi adalah Amamapare dengan jumlah penduduk 1.244 jiwa sedangkan kampung yang memiliki penduduk terendah adalah Ayuka dengan jumlah penduduk 405 jiwa.

Tabel. 4.14
Jumlah Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Fanamo	466	461	927
2	Ohotya	249	193	442
3	Omawita	287	306	593
4	Amamapare	652	592	1.244
5	Ayuka	209	196	405
Jumlah		**1.863**	**1.748**	**3.611**

Sumber: Distrik Mimika Timur Jauh dalam Angka 2019

11. Distrik Wania

Penduduk tertinggi di Distrik Wania adalah Inauga dengan jumlah penduduk 9.544 jiwa dan penduduk terendah di Distrik Wania adalah Mandiri Jaya dengan jumlah penduduk 458 jiwa. Sedangkan penduduk laki-lakinya lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Tabel. 4.15
Jumlah Penduduk Distrik Wania dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Kamoro Jaya	3172	2.770	5.942
2	Wonosari Jaya	1.812	1.627	3.439
3	Inauga	5.074	4.470	9.544
4	Nawaripi	1.051	976	2.027
5	Kadun Jaya	950	948	1.898
6	Mandiri Jaya	243	215	458
7	Monokau Jaya	594	477	1.071
Jumlah		**12.896**	**11.483**	**24.379**

Sumber: Distrik Wania dalam Angka 2019

12. Distrik Tembagapura

Jumlah Penduduk Distrik Tembagapura pada tahun 2018 mencapai 19.642 jiwa, kampung yang memiliki penduduk tertinggi adalah Tembagapura dengan jumlah penduduk 12.287 jiwa sedangkan kampung yang memiliki penduduk terendah adalah Baluni dengan jumlah penduduk 154 jiwa.

Tabel. 4.16

Jumlah Penduduk dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kampung/Kelurahan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Tembagapura	11.186	1.101	12.287
2	Waa	1.038	1.171	2.209
3	Arwandop	298	301	599
4	Tsinga	168	169	337
5	Jagamin	133	116	249
6	Opitawak	289	305	594
7	Dolinigokngin	167	151	318
8	Banigogom	106	102	208
9	Banti Il	130	115	245
10	Aingongin	106	102	208
11	Baluni	79	75	154
12	Noselanop	97	94	191
13	Minipogoma	93	92	184
14	Jongkogoma	1.040	819	1.859
Jumlah		**14.930**	**4.712**	**19.642**

Sumber: Distrik Tembagapura dalam Angka 2019

BAB V
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan perkembangan pariwisata yang baik, dibutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder kepariwisataan yang terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung di berbagai elemen baik instansi pemerintah, lembaga swasta maupun masyarakat. Hal tersebut merupakan prinsip pembangunan partisipatif, dimana di dalamnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyusunan berbagai program yang berkaitan dengan pariwisata. Keterlibatan seluruh elemen kelembagaan pariwisata dapat dijadikan modal dalam proses pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan, mengingat pengembangan ekowisata tidak dapat dilakukan tanpa dukungan berbagai pihak. Hal ini harus dipahami oleh semua pihak bahwa ekowisata tidak hanya dibangun untuk keberlangsungan keseimbangan lingkungan saja, tetapi juga melalui kegiatan ekowisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal serta turut menjaga dan melestarikan aspek seni dan kebudayaan masyarakat setempat. Kendala-kendala yang ditemui dalam pengembangan ekowisata dalam hal kelembagaan, antara lain yang berkaitan dengan :

1. Efektifitas fungsi dan peran masing-masing lembaga, ditinjau dari aspek koordinasi instansi terkait;

2. Keberadaan institusi dan kemampuan sumber daya manusia pendukungnya dalam pengelolaan kawasan pariwisata;
3. Mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, diperlukan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait untuk membangun atmosfer pariwisata, termasuk di dalammya upaya melakukan perlindungan ekosistem yang rapuh, mempertahankan integritas budaya, pengukuran dan penelitian pengaruh lingkungan terhadap daya dukung; mewajibkan pelatihan sumberdaya manusia untuk semua sumber daya manusia pelaku wisata; dan keterlibatan masyarakat lokal, bukan hanya di dalam aktifitas yang menghasilkan pendapatan saja tetapi juga didalam kegiatan konserfasi.

A. SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA

Sumber daya manusia pariwisata di Kabupaten Mimika dapat dilihat berdasarkan kondisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia serta kondisi jumlah penduduk menurut angkatan kerja. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan berikut :

1. Struktur Penduduk Menurut Jenis kelamin

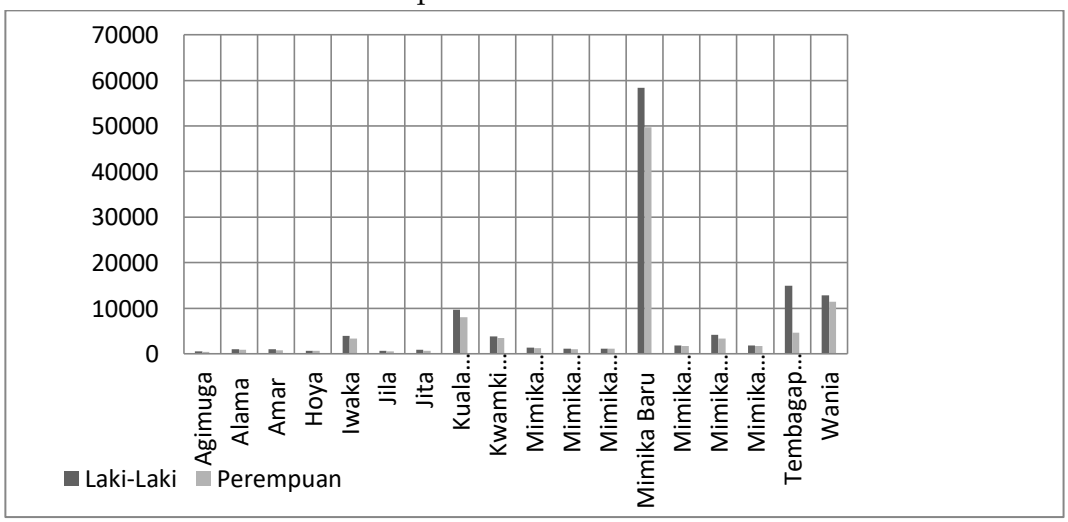
Dari sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan) tahun 2019 penduduk Kabupaten Mimika, yang terbesar adalah sex ratio pada Distrik Tembagapura yaitu 309,73. Artinya, jumlah penduduk laki-laki di distrik ini tiga kali lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Perbedaan yang sangat besar tersebut dikarenakan pada Distrik Tembagapura terdapat usaha pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki. Sedangkan yang terkecil adalah Distrik Hoya dengan rasio sebesar 91,15.

Tabel 5.1
Jumlah penduduk Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Mimika Tahun 2019

No	Distrik	Jenis Kelamin (Jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Agimuga	525	473	998	103,09
2	Amar	1.047	976	2.023	102,02
3	Alama	1.008	842	1.850	113,07
4	Hoya	641	659	1.300	91,15
5	Iwaka	3.997	3.408	7.405	114,29
6	Jila	649	636	1.285	95,21
7	Jita	922	704	1.626	123,00
8	Kuala Kencana	9.660	8.016	17.676	118,63
9	Kwamki Narama	3.854	3.515	7.369	106,68
10	Mimika Barat	1.434	1.246	2.680	109,82
11	Mimika Barat Jauh	1.124	995	2.119	107,05
12	Mimika Barat Tengah	1.189	1.162	2.351	96,93
13	Mimika Baru	58.311	49.692	108.003	117,18
14	Mimika Tengah	1.823	1.702	3.525	102,56
15	Mimika Timur	4.230	3.421	7.651	120,30
16	Mimika Timur Jauh	1.863	1.748	3.611	102,55
17	Tembagapura	14.930	4.712	19.642	309,73
18	Wania	12.896	11.483	24.379	111,00
Jumlah		**120.103**	**95.390**	**215.493**	**124,19**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

Gambar 5.1
Grafik Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Distrik
di Kabupaten Mimika Tahun 2019



2. Struktur Usia

Berdasarkan data kelompok umur penduduk Kabupaten Mimika, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur 25-29 merupakan yang terbesar dengan 26.421 jiwa. Hal ini menyatakan bahwa jumlah penduduk usia produktif merupakan dominan jika dibandingkan usia lansia dengan jumlah penduduk 1966 jiwa.

Tabel 5.2
Jumlah penduduk Jenis Kelamin dan Umur di Kabupaten Mimika
Tahun 2019

No.	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	12403	12912	25315
2	5-9	9633	9877	19510
3	10-14	8028	7843	15871
4	15-19	7864	7177	15041
5	20-24	12234	9899	22133
6	25-29	15216	11205	26421
7	30-34	13760	9362	23122
8	35-39	12149	8028	20177
9	40-44	10694	7059	17753
10	45-49	7072	4671	11743
11	50-54	5756	3457	9213
12	55-59	2787	1976	4763
13	60-64	1413	1004	2417
14	65+	1094	920	2014
Jumlah		**120103**	**95390**	**215493**

Sumber: Kabupaten Mimika Dalam Angka 2020

3. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Untuk melihat jumlah angkatan kerja di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Jumlah penduduk beruumur 15 Tahun ke atas menurut jenis Kegiatan Kabupaten Mimika Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	79.343	23.599	102.942
Berkerja	75.594	19.620	95.214
Pengangguran Terbuka	3.749	3.979	7.728
Bukan Angkatan Kerja	13.133	42.463	55.596
Sekolah	7.291	5.599	12.890
Mengurus Rumah Tangga	2.212	35.323	37.535
Lainnya	3.630	1.541	5.171
Jumlah	**92.476**	**66.062**	**158.538**

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2020

B. KELEMBAGAAN TERKAIT PARIWISATA

Kebijakan, peraturan dan regulasi yang jelas merupakan instrumen bagi sistem kepariwisataan agar dapat bekerja secara efektif. Norma dan nilai perlu dihargai, perlu diperjelas, perlu diketahui tidak hanya oleh penduduk lokal melainkan juga oleh pengunjung, termasuk mereka yang mau menanamkan modalnya, yang mungkin datang dari tempat berbeda dan dengan budaya berbeda. Situasi sosio-ekonomi suatu tempat wisata yang ada atau yang potensial dapat memengaruhi kesuburan pertumbuhan destinasi. Kondisi perkembangan sektor lain yang baik juga akan mendukung tumbuhnya pariwisata. Bila pariwisata diharapkan sebagai pembangkit, sektor lain juga harus dikembangkan secara simultan. Pariwisata tidak harus menggantikan sektor lain kecuali bila diartikan sebagai alternatif terhadap terjadinya praktek berbahaya atau ilegal seperti halnya pengrusakan lingkungan. Isunya adalah bagaimana fasilitasi dilakukan sedemikian rupa agar pariwisata dapat menghasilkan nilai tambah terhadap mata pencaharian yang ada.

Perbaikan kualitas produk lokal atau penyesuaian lain mungkin diperlukan, akses terhadap informasi dan peluang merupakan hal yang paling penting. Berbagai lembaga pendukung yang terdapat di Kabupaten Mimika memiliki tugas dan kewenangan yang saling terkait dan memberikan pengaruh pada kondisi perkembangan pariwisata. Lembaga-lembaga tersebut dapat berasal dari kalangan instansi pemerintah maupun masyarakat. Beberapa instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat yang dapat memberikan pengaruh pada perkembangan pariwisata di Kabupaten Mimika adalah :

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
B. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
C. Dinas Pekerjaan Umum;
D. Dinas Kelautan dan Perikanan;
E. Dinas Kehutanan;
F. Dinas Pertanian
G. Badan Lingkungan Hidup;
H. Balai Taman Nasional Lorentz;
I. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK);
J. Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa);
K. Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko);
L. United States Agency for International Development (USAID);
M. Komunitas;
N. dll.

BAB VI
PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

1. Tantangan dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika

Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang tidak mempunyai peluang pasar yang cukup tinggi namun juga memiliki tantangan yang cukup besar. =Sebagai daerah yang mempunyai potensi wisata dengan keunikan budaya dan keindahan alamnya, Kabupaten Mimika diharapkan mampu menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang pasar dan terus menerus berupaya meningkatkan pangsa pasar wisatanya. Beberapa tantangan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan potensi daya tarik wisata di Kabupaten Mimika belum optimal dikarenakan tidak adanya kelompok penggerak serta keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam pengembangannya.
b. Pelestarian Seni dan budaya melalui Program Pembinaan serta dukungan berbagai elemen masyarakat menjadi hal yang utama, Produk seni dan budaya ditempatkan sebagai upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebagai bagian dari atraksi wisata.

c. Berbagai potensi daya tarik wisata di Kabupaten Mimika tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana kepariwisataan yang dapat memudahkan aktifitas dan pelayanan untuk para wisatawan selama berada pada sebuah destinasi pariwisata.
d. Di Kabupaten Mimika atraksi wisata atau obyek wisata hanya dapat disaksikan pada acara-acara tertentu. Sampai saat ini atraksi wisata tersebut belum dikelola dengan baik. Atraksi-atraksi itu belum dipadukan menjadi tontonan menarik, artinya setiap ragam atraksi dibuat sedemikian rupa menjadi harmonis, mengagumkan dengan tetap menjaga kelestariannya serta mengindahkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.
e. Belum adanya penataan kawasan wisata, sementara kawasan yang telah dibangun pun kurang terawatt dan tidak terkelola.
f. Komunikasi dan informasi mengenai keberadaan dan kondisi objek wisata belum tersedia sehingga informasi bagi para wisatawan kurang optimal/akurat.
g. Masyarakat sekitar yang belum sadar wisata sehingga kesadaran dan keterbukaan untuk mensukseskan pariwisata masih kurang.
h. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum berkembang dengan baik.
i. Belum adanya paket-paket tour atau wisata yang disiapkan oleh para agen-agen wisata perjalanan sehingga para wisatawan yang berkunjung kesulitan untuk menentukan perjalanan wisata.
j. Keamanan Kabupaten Mimika menjadi salah satu apsek yang turut berdampak pada citra baik Kabupaten. Sehingga mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kabupaten Mimika

2. Isu strategis dalam pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika

Dari hasil survey data primer dan sekunder, telah di inventarisir beberapa isu strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika. isu-isu strategis utama tersebut adalah :

a. Hingga saat ini Kabupaten Mimika belum berhasil mengembangkan produk-produk wisata potensial yang dapat menarik minat para wisatawan berkunjung ke Kabupaten Mimika.

b. Pembangunan pariwisata pada awalnya dapat menerima dukungan awal dari masyarakat lokal yang berharap akan tersedianya lapangan kerja. Akan tetapi, dalam banyak kasus malah sebaliknya yang terjadi, pariwisata telah menggusur mata pencaharian/pekerjaan tradisional masyarakat sebelum lapangan kerja baru tercipta. dan bahkan bila pariwisata benar-benar menciptakan lapangan kerja, masyarakat lokal, termasuk perempuan, mungkin tidak memenuhi syarat untuk menduduki berbagai posisi yang ada.

c. Arus masuk investasi asing, termasuk dalam akomodasi sederhana dengan kualitas standard yang baik, mungkin akan memarginalkan akomodasi skala kecil yang sudah ada di di Kabupaten Mimika.

d. Penyamaan visi dan persepsi masyarakat serta aparat pemerintah terhadap pariwisata dan pengembangannya. Masyarakat masih banyak yang belum paham dan menyadari arti penting pariwisata, termasuk aparat pemerintah. Perbedaan pemahaman antar para pihak mengenai pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kepentingannya seringkali menimbulkan sikap yang bertentangan dan saling curiga terhadap pembangunan pariwisata di daerah. Sadar wisata

merupakan sesuatu yang belum dipahami oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat, tetapi juga aparat pemerintah.

e. Konsistensi dari komitmen yang diberikan pengambil kebijakan sangat diperlukan untuk mengarahkan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Mimika agar berkesinambungan. jangan sampai terjadi kebijakan yang berubah-ubah karena terjadinya pergantian pimpinan/kepala daerah.

f. Koordinasi antara masyarakat-pemda-privat-akademisi/praktisi (public private partnership) dalam pelaksanaan pembangunan. isu ini terkait pentingnya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan (stakeholders) kepariwisataan yang ditunjukkan melalui pembagian tugas dan fungsi berbagai instansi maupun pihak terkait lainnya sehingga dapat meminimasi ketumpangtindihan kebijakan pengelolaan pariwisata daerah, termasuk dengan masyarakat dan industry swasta maupun praktisi dan akademisi pariwisata.

g. Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi subjek pembangunan kepariwisataan. isu ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata yang dapat menghasilkan pemerataan pendapatan ekonomi, dimana kegiatan pariwisata didukung, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat sehingga dampak serta manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dukungan berupa program insentif maupun kredit mikro terhadap usaha yang layak dan ramah lingkungan serta ekonomi kreatif menjadi bagian penting dari skema input dan masukan pemerintah dalam rangka memberikan stimulus terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

h. Transparansi dan akuntabilitas dari berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di masyarakat seringkali memunculkan benih-benih konflik serta konflik kepentingan diantara masyarakat sendiri. Perancangan program yang transparan serta seoptimal mungkin melibatkan peran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan suatu nilai tawar yang tidak bisa dihindarkan. Program Pembangunan dan pemberdayaan yang hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur seringkali menyebabkan menurunnya kohesi dan nilai gotong royong pada masyarakat. Penguatan Kelompok dan Komunitas masyarakat menjadi agenda utama pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, tata kelola dan nilai-nilai luhur masyarakat.

i. Mitigasi bencana yang terencana untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. maka isu mitigasi bencana harus mendapatkan perhatian khusus sebagai upaya bagi keselamatan para wisatawan dan penduduk setempat. di dalamnya mencakup pemetaan ancaman dan resiko (risk and hazard assessment), serta sosialisasi/penyuluhan dalam upaya penyebarluasan informasi manajemen penanggulangan bencana dalam rangka menjaga aset mata pencaharian dan aset-aset wisata yang ada.

j. Perkembangan penyakit seperti malaria khususnya didataran rendah atau pesisir pantai Kabupaten Mimika yang merupakan daerah endemik malaria serta penyakit menular HIV/AIDS di Kabupaten Mimika yang merupakan daerah yang memiliki penderita HIV/AIDS tertinggi akan berdampak pada pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke

Kabupaten Mimika. Kondisi memerlukan upaya dan penanganan serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

k. Minimnya perhatian perguruan-perguruan tinggi terhadap problematika pembangunan pariwisata yang terlihat dari minimnya riset-riset aplikasi, riset performance maupun riset dasar yang dilakukan di Kabupaten Mimika.

Isu-isu tersebut merupakan isu yang saling terkait dan harus dipecahkan bersama sehingga pembangunan pariwisata di Kabupaten Mimika dapat memberi kontribusi dalam pembangunan.

B. PRINSIP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Membangun pariwisata berarti membangun perekonomian wilayahyang diakibatkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, maka perlu dipahami mengenai konsep membangun pariwisata. Ciri-ciri dari pariwisata yang tepat bahwa mereka memberdayakan masyarakat lokal untuk memfasilitasi pengalaman akan warisan asli untuk tamu mereka. Program pariwisata yang tepat dapat diciptakan pada berbagai level pembangunan pariwisata di area pariwisata umum dibangun dengan baik, atau pada daerah yang akan mengembangkan pariwisatanya.

Di Kabupaten Mimika terdapat berbagai ragam jenis obyek dan daya tarik wisata, yang menurut pengamatan mempunyai potensi untuk berkembang, terutama obyek wisata bahari dan budaya. Untuk itu perlu diperhatikan prinsip-prinsip membangun sektor pariwisata, sebagai berikut:

1. Secara aktif mendorong kelangsungan peninggalan di suatu daerah kebudayaan, sejarah, bahari, dan alam;
2. Menekankan dan menampilkan identitas daerah sebagai sesuatu yang berkarakter dan unik;
3. Dilakukan berdasarkan pada keterampilan interpretasi peninggalan yang ada;
4. Memberdayakan masyarakat lokal untuk menginterpretasikan warisan mereka sendiri kepada para tamu;
5. Membangun rasa bangga masyarakat lokal akan warisan mereka dan meningkatkan hubungan dengan wisatwan serta keterampilan pelayanan;
6. Membantu memelihara gaya hidup dan nilai-nilai sosial budaya setempat;
7. Memberdayakan masyarakat lokal untuk merencanakan dan memfasilitasi pengalaman berdimensi ganda yang otentik dan bermakna kepada pengunjung;
8. Menampilkan pendekatan "bernilai tambah" terhadap pariwisata, yang berarti meningkatkan kedalaman dan level pelayanan yang diberi kepada wisatawan; dan
9. Menampilkan suatu pendekatan kearah pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena menekankan dan menghormati peninggalan suatu daerah serta memberdayakan penduduknya sebagai basis pembangunan pariwisata yang sejati.

C. KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Konsep pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika merupakan kerangka dan kebijaksanaan mengenai pengaturan elemen-elemen kegiatan yang menjadi dasar perencanaan kepariwisataan yang lebih kongkrit sekaligus sebagai dasar dalam menentukan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika saat ini maupun dimasa mendatang, sehingga hasil perumusan konsep dapat berdaya guna dan implementatif.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah untuk mendorong dan meningkatkan daya tarik suatu daerah tujuan wisata (DTW) yang diharapkan dapat memberikan konstribusi baik masyarakat sekitar obyek maupun pemerintah setempat serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Disamping itu, perencanaan dan pembangunan pariwisata diharapkan untuk memperoleh dampak positif terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika dilaksanakan agar dapat mendorong dan mengusahakan agar hasil kegiatan pariwisata dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal seoptimal mungkin, namun tetap memelihara dan menjaga identitas lokal sehingga tidak hilang dan mencegah terjadinya kerusakan alam dan warisan budaya yang dimiliki daerah.

Secara umum konsep pembangunan sektor pariwisata, adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan kepariwisataan didasarkan kepada suatu sistem perencanaan yang terpadu, terarah, dan terencana dalam menopang pembangunan kepariwisataan nasional yang terpadu dan utuh;

2. Penyelarasan produk dengan pasar (market oriented). Dalam perencanaan kepariwisataan harus dipertimbangkan sisi permintaan, sehingga pasar pariwisata tidak hanya tergantung pada sumberdaya yang ada (supplay oriented), tetapi permintaan pelanggan (demand oriented) merupakan sisi yang harus dikedepankan;
3. Pemerataan penataan kewilayahan merupakan salah satu tujuan keterkaitan secara nasional dalam rangka mengangkat unggulan-unggulan wilayah yang dapat dipadu dengan yang lain untuk mendapatkan diversifikasi obyek, sehingga pariwisata merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan;
4. Pemerintah hanya sebagai pengarah dan fasilitator yang fleksibel, sehingga kepariwisataan akan bersifat lebih dinamis dan luwes terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengarah dan bukan pelaksana, hanya menyiapkan infrastuktur pariwisata dalam tahapan awal yang dapat ditumbuh-kembangkan oleh pihak masyarakat dan swasta;
5. Pengembangan kepariwisataan Indonesia yang rentan terhadap gangguan eksternal dan internal diperlukan suatu strategi khusus yang dirancang agar dapat menciptakan pengembangan pariwisata yang tidak bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi di wilayah-wilayah tertentu yang merupakan daerah tujuan wisata;
6. Penyiapan dan partisipasi masyarakat lokal di masing-masing tujuan wisata perlu dideteksi sedini mungkin yang dapat digunakan dalam pengembangan kepariwisataan dimana pengeksploitasian sumberdaya kepariwisataan dilaksanakan;

7. Penerapan pendekatan kombinasi antara ekonomi dan non ekonomi harus lebih dikedepankan sebagai suatu strategi dalam pengembangan khususnya pertimbangan sosio-politik dalam pemerataan pembangunan. Luasnya wilayah pengembangan yang dimiliki serta kesiapan sarana dan prasarana penunjang yang masih kurang memerlukan suatu perencanaan yang terkait dengan pintu-pintu masuknya wisatawan;
8. Peningkatan aksesibilitas untuk menunjang mobilitas wisatawan baik wisatawan lokal, nusantara maupun wisatawan mancanegara yang kemudian dapat meningkatkan kualitas perhubungan laut, udara, dan darat;
9. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada tujuan wisata (destinasi) yang mampu menghasilkan suatu produk yang multi aspek (compused product) menuntut kesiapan dan kombinasi antara berbagai aspek yang terkait dalam menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan berkesan bagi wisatawan;
10. Perencanaan dan pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan, sangat diperlukan agar munculnya suatu konsep keterpaduan dalam ekowisata (ecotourism) yang mempunyai kandungan melestarikan lingkungan, budaya masyarakat, dan meningkatkan kepedulian ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan; dan
11. Pemberdayaan kelompok usaha kecil dan menengah yang diikutsertakan dalam peningkatan dan pengembangan kepariwisataan dengan menitikberatkan pada kelompok usaha yang produktif dan mendukung usaha kepariwisataan.

1. Konsep Pembangunan Fisik DTW

Lingkungan suatu destinasi adalah merupakan faktor penentu pergerakan wisatawan dari suatu DTW ke DTW lainnya. Oleh karena itu, lingkungan harus menyenangkan dan menarik bagi wisatawan. Suatu lingkungan dengan ciri khas akan menimbulkan motivasi perjalanan. Tersedianya sumberdaya yang potensial dan keadaan iklim yang mendukung, akan tetapi itu saja masih tidak cukup untuk pengembangan pariwisata. Kawasan yang dipertimbangkan untuk dikembangkan harus mudah dicapai. Lokasi dan jarak dari rute pariwisata, tersedianya fasilitas transportasi dan lamanya waktu perjalanan akan mempengaruhi pengembangannya.

Konsep pembangunan fisik suatu DTW dilakukan untuk dapat menentukan lokasi yang paling optimal yang dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan unggulan, sehingga dapat diprioritaskan pembangunannya. Disamping itu, hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan biaya pengembangan suatu DTW guna mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin, baik keuntungan finansial maupun keuntungan fisik lingkungan dari suatu kawasan yang diprioritaskan. Untuk menyeleksi kawasan yang diprioritaskan, maka kriterianya adalah:

a. Keunikan dari atraksi wisata;
b. Konsentrasi dari atraksi wisata;
c. Tersedianya fasilitas, akomodasi, dan pelayanan lain; dan
d. Aksesibilitas dari semua moda transportasi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka strategi pembangunan fisik DTW adalah mengembangkan beberapa obyek yang mempunyai kriteria tersebut di atas. Adapun kawasan yang dapat diprioritaskan untuk dibangun, adalah:

a. Daya tarik wisata alam, terdiri dari: 15 daya tarik wisata;
b. Daya tarik wisata budaya, yaitu 5 daya tarik wisata. DTW ini diharapkan menjadi ikon bagi pengembangan wisata sejarah di Kabupaten Mimika dimasa yang akan datang; dan
c. Daya tarik wisata buatan, yaitu 6 daya tarik wisata.

D. RUMUSAN KONSEP KEPARIWISATAAN

Dalam memberikan arahan rencana penataan dan pengembangan setiap obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Mimika, maka harus dilakukan perencanaan dengan konsep dan metode yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan rencana pengembangan kepariwisataan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

1. Konsep Wisata Bahari

a. Membatasi berkembangnya permukiman dalam kawasan wisata, namun untuk permukiman yang sudah terlanjur berada dalam kawasan wisata dapat dilakukan revitalisasi atau penataan kembali sehingga keberadaannya tidak mengganggu aktivitas wisata atau view yang ingin ditonjolkan;
b. Perlu menetapkan buffer zone sebagai bagian dari mitigasi bencana mengingat kawasan pesisir sangat rentan terhadap abrasi pantai dan bencana air pasang (tsunami); dan
c. Tetap mempertahankan keberadaan hutan mangrove atau bahkan dapat dikembangkan sebagai ciri khas kawasan serta keberadaannya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ekosistem yang ada.

2. **Konsep Wisata Alam**
   a. Ke alamiah-an yang ditawarkan oleh obyek wisata alam harus tetap dipertahankan dan dilestarikan;
   b. Pembatasan alih fungsi lahan terhadap kawasan wisata dengan menetapkan batas kawasan secara tegas;
   c. Mendorong pengembangan infrastruktur untuk memudahkan akses terhadap kawasan wisata;
   d. Mengembangkan fasilitas penunjang kawasan berupa gazebo sebagai tempat istirahat dan bersantai bagi para pengunjung; dan
   e. Penataan dalam kawasan perlu mempertimbangkan kontur tanah untuk menimbulkan kesan alami dan tidak merusak lingkungan.
3. **Konsep Wisata Seni dan Budaya**
   a. Seni dan budaya perlu dilestarikan dengan melibatkan generasi mudah untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan rasa memiliki yang tinggi;
   b. Dengan keberagamaan budaya yang dimiliki Kabupaten Mimika, harus lebih diekspos, sehingga dapat memiliki nilai jual yang cukup tinggi;
   c. Obyek wisata yang dapat dijual atau sebagai icon kepariwisataan budaya di Kabupaten Mimika, perlu dibuatkan kalender dalam pelaksanaan kegiatannya, serta dapat dilakukan pelaksanaan festival budaya yang dapat digelar pada setiap tahunnya; dan
   d. Dalam pengembangan kebudayaan dimasa mendatang, maka dapat direncanakan pengembangan kebudayaan terpadu, yakni dengan pembangunan Cultural Center dan Taman Miniatur Kabupaten Mimika.

4. Konsep Pengembangan Makanan Khas

a. Kabupaten Mimika kaya akan berbagai makanan khas yang dimilikinya, sehingga dapat menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan, baik dari segi kualitas maupun aspek higienis dari makanan khas tersebut, sebaiknya disajikan atau disiapkan di restauran, hotel, rumah makan dalam nuansa sajian yang khas dan menarik bagi wisatawan.

b. Dengan beranekaragamnya makanan khas Kabupaten Mimika, maka pengembangannya kedepan dapat dijadikan sebagai "wisata Kuliner" bagi wisatawan.

E. KONSEP SPASIAL PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pada dasarnya, konsep spasial pengembangan pariwisata dapat merumuskan ide dan metode yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu kawasan wisata. Dalam mengembangkan konsep spasial pengembangan pariwisata di Kabupaten Mimika hal yang menjadi dipertimbangan utama adalah kestrategisan wilayah Kabupaten Mimika. Untuk menentukan konsep pengembangan spasial, maka kajian yang akan diuraikan dalam pengembangan spasial kepariwisataan ini, adalah:

1. Konsep satuan kawasan pengembangan pariwisata

Konsep Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) di Kabupaten Mimika didasarkan pada jenis obyek dan daya tarik wisata (DTW), serta ditinjau dari aspek karakteristik tiap obyek wisata, ragam jenis obyek serta daya tarik wisata. Dengan adanya Tourism Information Center (TIC) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kepariwisataan di Kabupaten Mimika. Adapun daerah pelayanan

sebagai pusat informasi/Tourism Information Center (TIC) yakni; terpusat di Kota Timika.

F. KONSEP PENGEMBANGAN SISTEM DESTINASI

1. Ciri-ciri Destinasi

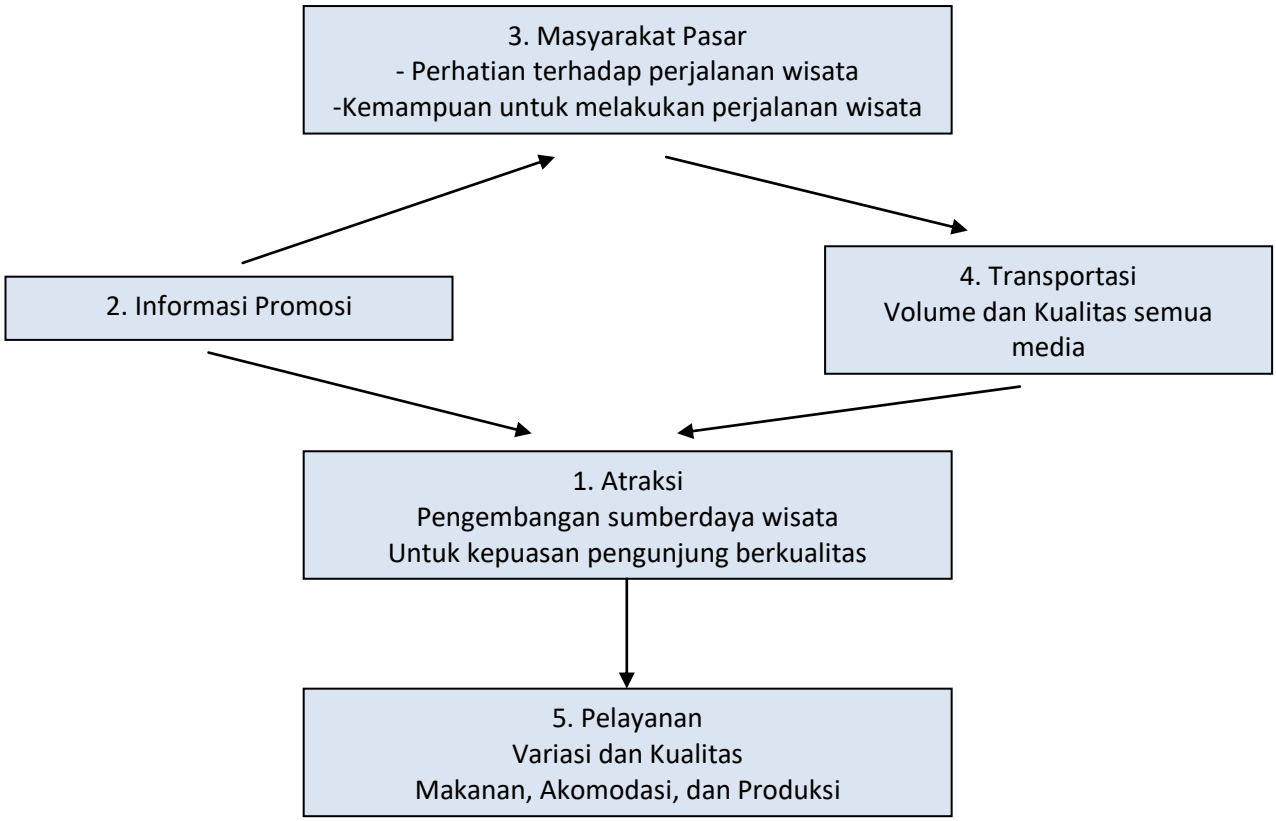
Atraksi dan ciri-ciri destinasi adalah penting untuk keperluan sight seeing, rekreasi, berbelanja, hiburan dan lain-lain dari suatu hiburan.Kuantitas dan kualitas atraksi sangat mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung khususnya kunjungan liburan. Sebaliknya, kunjungan bisnis atau ziarah tidak dapat dipengaruhi oleh usaha promosi pariwisata seperti kunjungan berlibur. Banyak destinasi memiliki bermacam-macam atraksi yang dapat menjadi daya tarik dari segmen pasar yang luas. Adapun yang dimaksud atraksi wisata adalah atraksi yang diidentifikasikan dalamsuatu penelitian dan telah dikembangkan menjadi atraksi wisata berkualitasdan memiliki aksesibilitas baik. Ciri-ciri destinasi adalah:

a. Sumberdaya alam seperti iklim, pantai, hutan;
b. Sumberdaya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater dan masyarakat lokal;
c. Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan;
d. Event seperti Pesta, Pasar Malam dan sebagainya; dan
e. Daya tarik psikologis seperti romantik, petualangan, keterpencilan.

2. Sistem fungsional Pariwisata

Studi pariwisata perlu dilakukan dengan menggunakan suatu system perencanaan pengembangan, karena pariwisata

adalah topik yang amat kompleks dan multi disipliner. Sistem perencanaan pariwisata dapat dilihat pada bagan alur dibawah ini:



Gambar 6.1 Sistem Perencanaan Pariwisata

Sistem perencanaan dan pengembangan pariwisata meliputi berbagai jenis jenis komponen, seperti:

a. Atraksi wisata;
b. Promosi dan pemasaran;
c. Pasar wisata (masyarakat pengirim wisatawan);
d. Sarana dan prasarana transportasi; dan
e. Masyarakat penerimaan wisatawan menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata.

Atraksi adalah penggerak pariwisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada pariwisata, tidak diperlukan transportasi, tidak diperlukan akomodasi danpelayanan jasa pendukung wisata.

3. Sistem Daerah Tujuan Wisata

Suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) meliputi berbagai jenis komponen, yaitu:

a. Gateway atau pintu masuk, pintu gerbang, jumlahnya adalah satu atau lebih, berupa pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan fery, terminal kereta api atau terminal bus;
b. Tourist Center, atau Pusat Pengembangan Pariwisata atau DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yang dapat berupa suatu atau beberapa kawasan wisata (resort) atau suatu bagian kota yang ada;
c. Attraction atau atraksi yang berkelompok satu atau lebih;
d. Tourist Corridor atau pintu masuk wisata yang menghubungkan gateway dengan tourist centre, dan dari tourist centre ke attractions; dan
e. Hinterland (daerah disekitar obyek dan daya tarik wisata).

Wisatawan lazimnya datang lewat gateway kemudian menuju ke Pusat Pengembangan Pariwisata, dimana ia menemukan akomodasi dan semua usaha jasa pelayanan pendukung wisata, seperti restoran, took cendramata biro perjalan, persewaan kendaraan dan lain-lain. Dari Pusat Pengembangan Pariwisata lalu mengadakan perjalanan wisata ke atraksi wisata melewati koridor wisata. Sambil berjalan di koridor wisata, ia menikmati pemandangan indah dan kehidupan rakyat yang disebut sebagai Hinterland. Hinterland ini tetap menarik, dan tidak diubah menjadi bangunan tinggi, pabrik dan sebagainya.

G. KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Kegiatan pembangunan dan pengembangan pariwisata sangat perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan (biotik dan abiotik) sekitarnya baik alam, fisik maupun budaya. Oleh karena itu, sangat perlu untuk memperhatikan aturan-aturan pembangunan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, antara lain:

1. Mempertimbangkan aspek lingkungan fisik dan sosial budaya, sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara fisik buatan dengan lingkungan alam;
2. Pemantauan roda lingkungan secara periodik, untuk melaksanakan pemantauan sedini mungkin terhadap dampak negatif yang mungkin terjadi;
3. Pengembangan kriteria ramah lingkungan, kriteria yang dimaksudkan adalah mencakup kriteria perencanaan sarana dan prasarana yang menyatu dengan lingkungan serta pengelolaan air limbah dan lainnya;
4. Pengembangan pendidikan cinta lingkungan melalui pariwisata, memanfaatkan kegiatan-kegiatan pariwisata tertentu untuk dijadikan sebagai wahana pendidikan lingkungan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
5. Peningkatan kualitas lingkungan berwahana pariwisata, pada daerah-daerah tertentu dimana terdapat lokasi yang menarik dan dapat dipadukan dengan daya tarik yang unik dan eksotik;
6. Pelembagaan konsep-konsep daya dukung dan biaya lingkungan, kemampuan daya dukung suatu lokasi atau fasilitas akan mengalami penurunan kualitas bila telah terlampaui. Oleh karena penentuan ambang batas bagi suatu lokasi antara sentra pengembangan pariwisata dan mempertimbangkan biaya pemeliharaan lingkungan; dan

7. Penetapan zona-zona khusus, zona-zona tersebut perlu diperlihatkan agar tidak melewati kemampuan daya dukung. Zona ini cukup zona-zona alami, budaya maupun zona-zona khusus.

H. KONSEP PENGEMBANGAN EKOWISATA (ECOTOURISM)

Ekowisata adalah pariwisata yang tergantung dari atraksi alam, yaitu kondisi dan suasana alam yang masih alami dan belum tercemar. Di dalam pengembangan pariwisata, terjadi interaksi antara lingkungan alam dan pariwisata, jadi pengembangan ekowisata dapat berarti mengembangkan pariwisata tetapi tidak merusak lingkungan bahkan menjaga dan melestarikan lingkungan apabila direncanakan dan dikelola dengan baik.

Obyek wisata alam di Kabupaten Mimika cukup banyak dan mempunyai karakteristik alam yang berbeda-beda serta sebagian besar masih menampakkan panorama alam yang indah dan alami. Untuk itu, maka konsep untuk mengembangkan obyek wisata alam tersebut adalah konsep ekowisata. Dalam pengembangan konsep ekowisata, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan, antara lain:

1. Ekowisata skala kecil akan menguntungkan dalam pembangunannya karena tidak memerlukan prasarana dan investasi yang besar;
2. Ekowisata dapat menambah pendapatan daerah dan dana untuk konservasi kawasan lindung, karena kelanjutan kelestarian alam juga merupakan dasar dari wisata alam;
3. Pembangunan ecolodge dengan menggunakan eco-engeneering termasuk penggunaan teknik pembangunan masyarakat setempat, bahan lokal, dan arsitektur lokal, akan menambah kesempatan kerja dan menambah pendapatan masyarakat sekitar kawasan ekowisata; dan

4. Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan.

I. KONSEP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Di dalam pemasaran pariwisata diperlukan adanya pemahaman yang mendalam terhadap produk yang dimiliki dan dijual. Demikian pula persepsi dan preferensi wisatawan atau calon wisatawan. Persepsi dan preferensi wisatawan ini akan menimbulkan perilaku yang mendorong proses pembelian. Konsep pemasaran, yang dapat dipergunakan untuk menjual produk pariwisata di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1. Konsep Pemasaran

a. Konsep produksi

Konsep ini menempatkan pertimbangan bahwa konsumen hanya mau membeli barang yang bisa dibeli dengan harga murah dan mudah didapat. Untuk pariwisata yang memenuhi dua criteria ini adalah produk pariwisata buatan atau kemasan baru dan untuk mass production. aman rekreasi, resort wisata buatan, souvenir buatan pabrik dan event olahraga dan convention dapat menggunaan pendekatan produksi ini.

b. Konsep produk

Konsep produk ini menggunakan asumsi bahwa konsumen hanya akan membeli barang yang memiliki keunikan, inovatif dan superioritas. Produk pariwisata yang dapat dijual dengan pendekatan ini adalah pariwisata minat khusus yang bertemakan budaya (heritage dan living culture),

alam (ekowisata, wisata pendidikan dan penelitian) dan souvenir kerajinan tangan.

c. Konsep penjualan

Pemasaran yang yang bertjuan untuk menjual produk untuk mendapatkan laba dari penjualan yang banyak volumenya an dengan promosi yang agresif. Produk pariwisata yang dapat dijual dengan pendekatan ini adalah bentuk pariwisata profane misalnya taman rekereasi, souvenir produksi masal buatan pabrik, event olah raga, exhibition dan convention.

d. Konsep pemasaran

Konsep yang diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa keuntungan akan dicapai melalui upaya memberikan kepuasan pada konsumen yang terlebih dahulu melakukan pengidentifikasian kebutuhan dan keinginan wisatawan. Seluruh produk wisata seharusnya menggunakan pendekatan ini.

e. Konsep pelanggan

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep pemasaran, dimana kepuasan konsumen harus diusahakan tercapainya kepuasan setiap pelanggan secara individual. Seluruh produk wisata hendaknya menggunakan konsep ini dalam pemasaran pariwisata.

f. Konsep Ekologikal dan Humanistik

Konsep yang mempertimbangkan adanya profit dicapai melalui kepuasan konsumen dengan cara pengidentifikasian kebutuhan wisatawan dengan pengintegrasian kegiatan pemasaran dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemasaran yang demikian

ini diperankan oleh pemerintah untuk produk produk pariwisata kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah seperti halnya kawasan taman nasional dan taman hutan raya.

g. Konsep Sistem Informasi Pemasaran

Di dalam pemasaran pariwisata peran dari sistem informasi pariwisata (Marketing Information System atau isingkat MIS) ini sangat penting. Sebab perilaku calon wisatawan sagat dinamis perkembangannya dari waktu ke waktu. Keputusan harus dapat cepat diambil untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Sistem informasi pemasaran yaitu dengan Mengembangkan informasi. Pengembangan informasi ini terdiri atas: pencatatan informasi, membuat analisis informasi, menyusun suatu strategi dan membuat penelitian untuk pemasaran.

J. KONSEP PENGEMBANGAN PRODUK

Untuk menciptakan produk unggulan terhadap suatu daerah tujuan wisata, maka perlu dilakukan pengembangan produk dalam bentuk pengembangan DTW dan pengembangan kawasan wisata.

1. Pengembangan DTW

Dalam mengembangkan suatu DTW, maka yang perlu diperhatikan antara lain; karakteristik permintaan dan penawaran konsumen, daya tarik dan kemampuan lokal, pelayanan terhadap wisatawan dan lain-lain. Secara khusus prinsip pengembangan DTW, adalah:

a. Mempertimbangkan karakteristik permintaan dan penawaran berdasarkan kecenderungan pasar (market oriented) dengan melibatkan peran serta masyarakat. Pengembangan suatu produk harus mempertimbangkan keinginan dari para

konsumen (user oriented) sehingga produk yang dihasilkan atau direncanakan dapat dinikmati;

b. Menggarisbawahi kepentingan ekonomi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan suprastruktur kepariwisataan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat dapat berperan aktif didalamnya;
c. Meningkatkan dan memantapkan kualitas pelayanan untuk kepuasan wisatawan agar peningkatan daya saing dapat dipertahankan, hal tersebut sangat dipentingkan sebagai pertanda kesiapan dari daerah dalam menyambut wisatawan;
d. Pengembangan produk yang syarat dengan muatan keingintahuan dan lokal genius merupakan segment produk yang sangat mengesankan bagi wisatawan;
e. Mewujudkan kolaborasi sinerjik dalam pengembangan produk pariwisata yang mencakup berbagai aspek dari komponen yang ada, sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dari keterkaitan antar komponen-komponen tersebut;
f. Pencerminan dari aspek lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya yang berperan dan mampu mempertahankan suatu produk berkelanjutan di suatu daerah, keadaan itu merupakan suatu kondisi yang kondusif dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga dapat tercipta suatu suasana lingkungan yang asri dan ramah lingkungan; dan
g. Bertumpu pada hubungan setara antara tuan rumah, pelaku dan wisatawan, dalam hal ini pihak pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta untuk mengelola produk wisata tanpa membedakan sumber daerah asal wisatawan.
h.

2. Pengembangan Kawasan Wisata

Dalam suatu daerah tujuan wisata (DTW) mempunyai beragam jenis obyek dan daya tarik wisata, yang mempunyai karakteristik dan spesifikasi yang berbeda, sehingga mempunyai daya tarik yang menarik berbeda pula, ada obyek dan daya tarik wisata yang mempunyai daya tarik yang relative kuat dan ada pula yang mempunyai daya tarik yang lemah, atau suatu obyek dan daya tarik yang mempunyai potensi daya tarik yang berbeda, misalnya; obyek alam, obyek bahari, obyek sejarah, seni dan budaya mapun agro wisata, namun diantara obyek dan daya tarik wisata tersebut, letaknya relatif dekat satu sama lainnya, sehingga untuk mengembangkan suatu daerah tujuan wisata seperti demikian, maka obyek dan daya tarik wisata tersebut dipadukan dalam bentuk suatu kawasan wisata. Atraksi berkelompok memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Mungkin Ia mendatangi kelompok atraksi dengan kendaraan, lalu di dalam kelompok atraksi melakukan walking tours (berjalan kaki), sehingga secara keseluruhan wisatawan dapat menikmatinya.

Dengan menawarkan "touring tourism" naik kendaraan maka wisatawan hanya akan melihat atraksi utama saja, dan akan tinggal tidak terlampau lama di DTW. Tujuan dilakukannya penggabungan beberapa obyek dan daya tarik wisata dalam suatu kawasan adalah;

a. Meningkatkan dan menambah daya tarik suatu obyek wisata.
b. Memberikan pelayanan dan suguhan atraksi wisata kepada pengunjung dengan berbagai ragam aktraksi.
c. Melestarikan dan menjaga lingkungan dalam kawasan wisata.

d. Memudahkan dalam membangun infrastruktur dan supraktruktur pendukung dan penunjang dalam kawasan wisata yang terbentuk.

K. VISI MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA

1. Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika

Visi pembangunan pariwisata di Kabupaten Mimika merupakan gambaran ideal mengenai kondisi kepariwisataan seperti apa yang akan diwujdkan pada masa yang akan datang. Penetapan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika tidak akan terlepas dari kerangka visi pengembangan pariwisata nasional serta pengembangan wilayah Kabupaten Mimika secara keseluruhan.

Visi pembangunan pariwisata di Kabupaten Mimika adalah : "Mendorong pariwisata Alam Kabupaten Mimika yang berdaya saing global berbasis kebudayaan lokal masyarakat Suku Amungme dan Kamoro"

2. Misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika

Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Hal ini berarti misi yang akan dilaksanakan disusun dalam kerangka visi pengembangan pariwisata dan pengembangan wilayah Kabupaten Mimika secara keseluruhan dengan mempertimbangkan karakteristik potensi yang ada.

Misi pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika antara lain sebagai berikut :

a. Mendorong Budaya Lokal sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan;
b. Mengembangkan produk wisata yang variatif dan memiliki ciri khas Kabupaten Mimika;
c. Mengembangkan pariwisata yang mampu berperan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
d. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai kegiatan untuk lebih mengenalkan potensi wisata Kabupaten Mimika;
e. Mengembangkan infrastruktur wisata yang dapat memudahkan wisatawan dalam melakukan berbagai aktifitas wisata;
f. Mengembangkan pariwisata yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal;
g. Mengembangkan pariwisata yang dapat berperan sebagai agen pelestari budaya dan lingkungan;
h. Membentuk kesadaran dari stakeholder, pengusaha di bidang pariwisata, dan masyarakat untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat dan pariwisata yang ramah lingkungan baik fisik maupun non fisik sehingga pengembangan pariwisata dapat diterima secara sosial dan ekologis.

L. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA

Tujuan merupakan suatu gambaran mengenai kondisi pariwisata yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan suatu penjabaran dari tujuan secara terukur yang hendak dicapai selama masa perencanaan (jangka pendek dan menengah) Adapun tujuan pembangunan pariwisata Kabupaten Mimika adalah mengembangkan produk wisata berbasisi kebudayaan lokal yang mampu menarik kunjungan

wisatawan, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan sasaran pembangunan pariwista Kabupaten Mimika antara lain sebagai berikut :

a. Terciptanya kegiatan wisata yang variatif sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan dan menambah lama tinggal wisatawan di Kabupaten Mimika.
b. Tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang wisata yang dapat meningkatkan aksesibilitas ke Kabupaten Mimika dan ke kawasan wisata.
c. Terciptanya bentuk pemasaran pariwisata yang dapat memperkenalkan pariwista di Kabupaten Mimika di pasar pariwista lokal, Provinsi dan Nasional.
d. Terciptanya kegiatan ekonomi lokal (kerajinan rakyat, pertanian, perikanan) yang dapat menunjang kegiatan pariwisata.
e. Terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi masyarakat lokal dalam rangka mempersiapkan tenaga terampil yang akan berperan dalam kegiatan parwisata.
f. Terciptanya iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha/investasi di sektor pariwisata.

BAB VII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

A. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi ; daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Kebijakan pembangunan daya tarik wisata di Kabupaten Mimika sebagai berikut :

1. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dalam perwilayahan pariwisata;
2. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan;
3. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.

Strategi untuk perintisan pembangunan daya tarik wisata bagi DTW yang bukan unggulan dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Kabupaten adalah dengan mengembangkan daya tarik wisata baru diwilayah pengembangan destinasi pariwisata. Strategi Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada adalah dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan

kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata kabupaten yang dibentuk. Strategi Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas adalah dengan melalui pengembangan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.

B. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA KABUPATEN

Aktivitas kepariwisataan banyak tergantung pada transportasi dan komunikasi karena faktor jarak dan waktu yang sangat mempengaruhi keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Unsur yang terpenting dalam aksesibilitas adalah transportasi, maksudnya yaitu frekuensi penggunaannya, kecepatan yang dimilikinya dapat mengakibatkan jarak seolah-olah menjadi dekat.

1. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Kebijakan Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagai berikut :

a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Strategi pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata sebagai berikut:

a. Mengembangkan sarana moda transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar perwilayahan pariwisata kabupaten;

b. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat, dan laut, yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar perwilayahan pariwisata kabupaten; dan
c. Mengembangkan sistem transportasi darat, laut, angkutan sungai dan penyeberangan, dan transportasi udara yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar perwilayahan pariwisata kabupaten.

2. Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata di Kabupaten Mimika

Bertujuan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dan pergerakan wisatawan dalam kawasan pariwisata, meliputi:

a. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, dengan arah kebijakan meliputi :
   - Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi menuju, antar dan dalam kawasan pariwisata.
   - Pengembangan dan peningkatan kenyamanan serta keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata.

   Sedangkan strategi :
   - Meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan

wisatawan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;dan

- Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

b. Pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata, dengan arah kebijakan meliputi :

- Peningkatan kemudahan mendapatkan informasi aksesibilitas kepariwisataan;dan
- Pemanfaatan media cetak dan elektronik dalam pengembangan informasi aksesibilitas kepariwisataan.
  - Mengembangkan ketersediaan informasi yang aktual melalui media cetak dan elektronik; dan
  - Meningkatkan kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana media informasi kepariwisataan.

  Sedangkan strateginya adalah :
- Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata;
- Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasiberbagai jenis moda transportasi;dan
- Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

c. Optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan, dengan arah kebijakan meliputi :

- Peningkatan regulasi sistem pelayanan transportasi kepariwisataan daerah;dan
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola transportasi yang mendukung pembangunan kepariwisataan.
  - membentuk kelompok/organisasi pengelola transportasi pendukung kepariwisataan daerah;dan
  - meningkatkan kemampuan ketrampilan pengelola kepariwisataan melalui kursus dan magang.

Sedangkan strateginya adalah :

- Menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah;dan
- Menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.

3. Pengembangan Konsep Wisata Lintas Pulau

Pembangunan infrastruktur transportasi mempunyai peran penting dalam pengembangan suatu wilayah serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan antar wilayah. Transportasi merupakan industri jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan khususnya didaerah, yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator pendukung pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan wilayah di sektor pariwisata.

Beberapa kendala dalam mewujudkan kepulauan Mimika sebagai tujuan wisata. Kendati pada beberapa pulau di kawasan ini



sudah terdapat fasilitas seperti resort, dan fasilitas lainnya namun kendala tetap muncul khususnya pada sistem transportasi laut, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, penginapan yang representatif, restoran, hingga infrastruktur. Akses transportasi laut menjadi persoalan utama. Untuk mengakses beberapa pulau di Kabupaten Mimika wisatawan membutuhkan waktu yang cukup lama serta belum adanya dermaga wisata yang representatif yang dapat digunakan sebagai pelabuhan wisata antar pulau di Kabupaten Mimika, karena itu, perlu ada system transportasi laut khusus yang dapat memobilasi wisatawan antar kepulauan di Kabupaten Mimika dalam mengunjungi dan berwisata diseluruh DTW alam bahari dan kepulauan sebagai paket wisata. Olehnya diperlukan arah kebijakan pembangunan sistem transportasi wisata lainnya yang terkait peningkatan daya saing sektor pariwisata, antara lain adalah :

a. Membangun dermaga wisata berdasarkan kajian sistem transportasi pelayanan wisata dengan dermaga di DTW Pulau dan DTW Pantai.
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi laut untuk mendukung kelancaran perjalanan wisata;
c. Membangun fasilitas wisata untuk kepentingan wisatawan lintas pulau.

C. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi:

1. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata;
2. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata;dan
3. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampui ambang batas daya dukung.

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata :

1. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata;
2. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta di Kabupaten Mimika;dan
3. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi

D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAN

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

1. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
2. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
3. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata;
4. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat, yaitu dengan :

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi

1. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
2. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;dan
3. Menguatkan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarustamaan gender dalam pengembangan pariwisata;dan
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah.
6. Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;dan

7. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
8. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di daerah;
9. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
10. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;dan
11. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

E. INVESTASI BIDANG PARIWISATA KABUPATEN

Kebijakan pengembangan investasi dibidang pariwisata di Kabupaten Mimika berdasarkan kondisi yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata;
2. Meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
3. Meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Strategi pengembangan investasi bidang pariwisata Kabupaten Mimika, sebagai berikut :

1. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;
2. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
3. Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata;

4. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata didalam dan diluar negeri; dan
5. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

F. PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan pemasaran pariwisata di Kabupaten Mimika dilaksanakan melalui pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sesuai dengan arahan pembagian perwilayahan/zona dalam pengembangan kawasan pariwisata, yaitu:

1. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
2. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata dan dinamika pasar;
3. Pengembangan dan pemantapan citra Mimika sebagai destinasi wisata dalam skala nasional;
4. Pengembangan citra kepariwisataan Mimika sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
5. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan, yaitu dengan :

Strategi pemasaran pariwisata di Kabupaten Mimika dilakukan dengan :

1. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;

2. Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran
3. bertanggungjawab (responsible marketing);
4. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
5. Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki Kabupaten Mimika.
6. Memfokuskan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan lead destination baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus.
7. Melakukan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang.
8. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar (niche market).
9. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu.
10. Melakukan akselerasi pergerakan wisatawan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.
11. Mengembangkan dan memantapkan positioning citra Kabupaten Mimika di antara para pesaing; dan
12. Mengembangkan dan memantapkan positioning kawasan pariwisata Mimika.
13. peningkatan kehadiran media (media presence) dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Mimika.

14. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata Kabupaten Mimika; dan
15. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

G. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan devisa, produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggungjawab terhadap lingkungan. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten Mimika meliputi :

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Rencana Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata diwujudkan dalam bentukpenguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata. Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi :

a. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
b. Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

2. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Peningkatan daya saing produk pariwisata meliputi :

a. Daya saing Daya Tarik Wisata;

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata. Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi :

- Mengembangkan manajemen atraksi;
- Memperbaiki kualitas interpretasi;
- Menguatkan kualitas produk wisata; dan
- Meningkatkan pengemasan produk wisata.

b. Daya saing Fasilitas Pariwisata; dan

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal. Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi :

- Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
- Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

c. Daya saing aksesibilitas.

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan

perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata. Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

3. **Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

Rencana Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi :

a. Mengembangkan pola–pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
b. Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

4. **Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

Rencana Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas. Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi :

a. Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
b. Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
c. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha–usaha di kawasan pariwisata.

5. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Rencana Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di kabupaten; dan
b. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

H. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan di Kabupaten Mimika meliputi :

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Rencana Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan meliputi :

a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat kabupaten;
b. Optimalisasi Koordinasi Antar Dinas terkait dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan dengan kabupaten lain serta provinsi dalam pengembangan paket-

paket wisata lintas kabupaten dan provinsi yang terkait dengan Kabupaten Mimika;

c. Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan Swasta dan Masyarakat Di Tingkat kabupaten; dan
d. Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah,Swasta dan Masyarakat.

Strategi penguatan Organisasi Kepariwisataan meliputi ;

a. Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
b. Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
c. Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Public-private Partnership (PPP);
d. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
e. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
f. Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

2. Pembangunan SDM Pariwisata

Rencana Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata meliputi :

a. Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah;
b. Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisataan;
c. Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik; dan
d. Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.

Strategi untuk pembangunan SDM pariwisata meliputi :

a. Optimalisasi kapasitas SDM di kabupaten dan Distrik dalam menunjang SDM pada tiap perwilayahan pariwisata;

b. Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM;
c. Mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
d. Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
e. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen);
f. Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
g. Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata;
h. Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
i. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

3. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Rencana Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;

b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Mimika;
c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Mimika;
d. Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten Mimika;
b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
c. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Mimika secara global.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi padapengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :

a. Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;

b. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
d. Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata meliputi :

a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisataan; dan
b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VIII
RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Pariwisata menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting pada abad ke-21. Dalam perekonomian suatu negara, bila dikembangkan secara berencana dan terpadu, peran sektor pariwisata akan melebihi sektor minyak dan gas alam (migas) serta industri lainnya. Sektor pariwisata hadir sebagai katalisator pembangunan, sekaligus akan mempercepat proses pembangunan itu sendiri, antara lain melalui :

1. Peningkatan perolehan devisa negara.
2. Memperluas dan mempercepat proses kesempatan berusaha.
3. Memperluas kesempatan kerja
4. Mempercepat pemerataan pendapatan.
5. Meningkatkan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan pendapatan daerah
7. Memperkuat posisi neraca pembayaran.
8. Mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi alam yang terbatas.

Selain itu, dampak positif dari industri kepariwisataan jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari selama dua dekade terakhir, seperti misalnya :

1. Tumbuh dan berkembangnya usaha makanan dan minuman yang bersifat local yang banyak diminati wisatawan.
2. Tumbuh dan berkembangnya industry kecil yang menghasilkan produk cinderamata khas daerah yang juga sekaligus telah meningkatkan pangsa ekspor bersifat lokal.
3. Tumbuh dan berkembangnya restoran, restoran, kafe, dan bar yang bersifat lokal tapi diminati wisatawan.
4. Tumbuh dan berkembang usaha agen perjalanan dan biro perjalanan wisata lokal untuk melayani wisatawan pada hampir setiap daerah tujuan wisata.
5. Banyaknya perusahaan lokal yang menyelenggarakan acara kebudayaan untuk konsumsi wisatawan maupun masyarakat lokal pada masing-masing daerah tujuan wisata.
6. Tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata, mulai dari SMIP (Sekolah Menengah Industri Pariwisata), akademi, dan sekolah tinggi dan kursus-kursus yang tidak tercatat serta balai latihan.
7. Tumbuh dan berkembangnya toko-toko yang biasa disebut dengan istilah "shop for tourist need" yang menjual film, tissue, majalah, Koran, drugstore, baju renang, perangko, dan kartu pos.
8. Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang disebut sebagai decorative materials for hotel and resort dengan memunculkan berbagai benda-benda seni tradisional etnis lokal.

Peningkatan dan pembangunan industri kepariwisataan, dapat dilakukan dengan pembangunan daya tarik wisata, baik dalam bentuk mengembangkan daya tarik wisata yang sudah ada maupun membuat daya tarik wisata baru sebagai obyek wisata. Penyelengaraan kepariwisatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian

dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta daya tarik wisata itu sendiri. Di dalamnya juga melibatkan berbagai komponen, yaitu pemerintah, badan-badan usaha, dan masyarakat, karena Pengembangan Pariwisata pada hakekatnya secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, yang pada akhirnya akan membawa berbagai dampak terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Pengembangan Pariwisata dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, maka pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan.

Berkembang tidaknya dan meningkat tidaknya Pengembangan Pariwisata sangatlah tergantung dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan di bidang kepariwisataan, baik itu peraturan - peraturan yang berhubungan dengan aspek administrasi pemerintahan (mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas, melindungi obyek-obyek tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, dan sebagainya) maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau bisnis (perdagangan dan jasa-jasa pariwisata).

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan, sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antar bangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap

menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang yuridis, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan bahwa kecenderungan perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu disebabkan, antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Selain itu, kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam rumusan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menggambarkan bahwa pembangunan pariwisata melalui (i) Pembangunan Destinasi Pariwisata, (ii) Pemasaran Pariwisata, (iii) Industri Pariwisata, dan (iv) Kelembagaan Kepariwisataan, yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan merupakan amanat dari penyelenggaraan kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

A. RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA

Perwilayahan destinasi pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Mimika adalah merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah. Perwilayahan Destinasi Pariwisata di ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kabupaten dan/atau lintas kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
2. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
3. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
5. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Sedangkan Kawasan Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Mimika ditentukan dengan potensi dan kriteria spesifik sebagai berikut :

1. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. Memiliki potensi pasar, baik skala regional maupun khususnya nasional;
4. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
6. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

7. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
8. Memiliki kekhususan dari wilayah;
9. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial kabupaten dan provinsi; dan
10. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Perwilayahan pariwisata merupakan manifestasi dari struktur tata ruang pariwisata Kabupaten Mimika yang di pola dalam bentuk zona kawasan pengembangan kawasan pariwisata terbentuk sebagai akibat adanya sinergis sistem yang terjadi dalam setiap daya tarik kawasan wisata. Tahapan pembentukan dalam strukturnya dipengaruhi oleh sistem aktivitas, system transportasi, sistem infrastruktur dan sistem prasarana wisata lainnya, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi wisata Kabupaten Mimika yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing setiap daya tarik wisata dalam wilayah Kabupaten Mimika. Rencana Kawasan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Mimika juga dibagi berdasarkan kelompok paket wisata dengan pertimbangan arah perjalanan wisata yang efektif dan efisien dengan tetap menikmati beberapa jenis daya tarik wisata dalam tiap paket perwilayahan yang akan dikembangkan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat aksesibilitas dan karakter budaya yang menyebar di Kabupaten Mimika. Rencana Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Mimika yang dirumuskan dalam satuan kawasan pembangunan pariwisata kabupaten meliputi:

1. DPK Timika dan Sekitarnya

Pusat Pembangunan Kepariwisataan Wilayah di Kabupaten Mimika; DPK Timika adalah Pusat informasi pariwisata/Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Mimika. Terletak di Ibukota Kabupaten Mimika. Arahan rencana pembangunan pada daya tarik wisata utamanya adalah wisata kuliner, sedangkan obyek wisata lainnya pusat pelayanan lokal. Lebih jelasnnya dapat dilihat pada penjelasan dan tabel berikut :

- Pusat informasi pariwiata/Tourism Information Center (TIC) Kabupaten Mimika.
- Pengembangan akomodasi pariwisata berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana hotel, dan penginapan dalam melayani pengunjung.
- Peningkatan kualitas akomodasi pariwisata melalui evaluasi status akomodasi yang dilakukan oleh dinas pemuda olahraga dan pariwisata bersama dengan lembaga kepariwisataan lainnya.
- Pembangunan pusat kuliner di Kota Timika.
- Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata. Dan
- Pembangunan daya tarik wisata lainnya sebagai pusat pelayanan.

Tabel 8.1
Pembangunan DTW Pada DPK Timika

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Arahan Rencana	Ket.
1.	Kali Iwaka	Alam	Iwaka	• Penataan Sempadan sebagai daya tarik tersendiri • Pembangunan Sarana DTW	Penunjang
2.	Kali Mayon	Alam	Kuala Kencana	• Penataan Sempadan sebagai daya tarik tersendiri • Pembangunan Sarana DTW	Penunjang
3.	Festival Kamoro Kakuru	Budaya	Kota Timika	• Penentuan Lokasi Pelaksanaan Festival	Unggulan
4.	Tugu Eme Neme Yauware	Budaya	Mimika Baru	• Penataan DTW • Mengembangkan Wisata Kuliner disekitar DTW	Penunjang
5.	Padang Golf Rimba Irian	Buatan	Kuala Kencana	• Peningkatan fungsi DTW	Unggulan
6.	Gelanggang Renang	Buatan	Kuala Kencana	• Peningkatan fungsi DTW	Penunjang
7.	Waterboom Karang Senang	Buatan	Kuala Kencana	• Peningkatan fungsi DTW	Penunjang
8.	Wisata Air Pelangi	Buatan	Wania	• Peningkatan fungsi DTW	Unggulan
9.	Taman Kuala Kencana	Buatan	Kuala Kencana	• Peningkatan fungsi DTW	Unggulan
10.	Taman Rekreasi	Buatan	Mimika Baru	• Pembangunan Sarana dan Prasarana DTW • Pengembangan Wisata Kuliner	Penunjang

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

2. DPK Mimika Tengah dan Sekitarnya

Yaitu Sub Pusat Pengembangan Destinasi Wisata Mimika Tengah dan sekitarnya; "KEUNGGULAN DPK" adalah pengembangan ekowisata. Pusat pelayanan di Ibukota Distrik Mimika Tengah, serta wilayah pelayanan di Distrik Mimika Barat dan Mimika Timur. Rencana pembangunan daya tarik wisata utamanya adalah ekowisata mangrove keakwa dan wisata budaya kota tua kokonao, dan wisata alam bahari/kepulauan. Secara umum, penjelasannya pada uraian berikut:

1) Pusat pengembangan ekowisata, yang didukung dengan peranan lembaga pariwisata dan lembaga kehutanan dalam pembinaan ekowisata.
2) Pengembangan sistem transportasi laut lintas dan pantai sebagai paket wisata alam bahari dan kepulauan.
3) Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata. dan
4) Pembangunan daya tarik wisata lainnya sebagai pusat pelayanan pariwisata lokal.

Tabel 8.2
Pembangunan DTW Pada DPK Mimika Tengah dan Sekitarnya

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Arahan Rencana	Ket.
1.	Pantai Kampus Biru	Alam	Mimika Tengah	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Unggulan
2.	Pantai Keakwa	Alam	Mimika Tengah	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai	Unggulan

				• Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	
3.	Ekowisata Mangrove Keakwa	Alam	Mimika Tengah	• Peningkatan peranan lembaga pariwisata dan lembaga kehutanan dalam pembinaan ekowisata. • Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. • Pembangunan sarana DTW.	Unggulan
4.	Kampung Keakwa	Budaya	Mimika Tengah	• Penataan DTW • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Unggulan
5.	Kota Tua Kokonao	Budaya	Mimika Barat	• Penataan DTW • Pembangunan fasilitas akomodasi	Penunjang
6.	Kali Kiura	Alam	Mimika Barat	• Penataan Sempadan sebagai daya tarik tersendiri • Pembangunan Sarana DTW • Peningkatan Aksesibiltas	Unggulan
7.	Taman Mapurupuwau	Budaya	Mimika Timur	• Penetapan batas kawasan DTW untuk pelestarian Taman • Pembangunan sarana DTW • Peningkatan fungsi DTW	Unggulan
8.	Ekowisata Mangrove Perikanan	Alam	Mimika Timur	• Peningkatan peranan lembaga pariwisata dan lembaga kehutanan dalam pembinaan ekowisata. • Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. • Pembangunan sarana DTW.	Penunjang
9.	Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu	Alam	Mimika Timur	• Penetapan batasan DTW • Pembangunan sarana DTW • Peningkatan peranan lembaga pariwisata dan lembaga kehutanan dalam pembinaan kawasan	Penunjang

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

3. DPK Amar dan Sekitarnya

Yaitu Sub Pusat Pengembangan Destinasi Wisata Amar dan sekitarnya; "KEUNGGULAN DPK" adalah pengembangan daya tarik wisata alam bahari/pantai. Pusat pelayanan di Ibukota Distrik Amar, serta wilayah pelayanan di Distrik Mimika Barat Tengah dan Distrik Mimika Barat Jauh. Rencana pembangunan daya tarik wisata utamanya adalah pantai kawar.

1) Pengembangan konsep wisata lintas pantai di Kabupaten Mimika dan daerah sekitarnya sebagai paket wisata.
2) Pengembangan sistem transportasi laut lintas kepulauan sebagai paket wisata alam bahari dan kepulauan.
3) Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata pada DTW alam bahari/pantai. dan

Tabel 8.3
Pembangunan DTW Pada DPK Amar dan Sekitarnya

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Arahan Rencana	Ket.
1.	Pantai Kawar	Alam	Amar	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Unggulan
2.	Pantai Ipaya	Alam	Amar	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Penunjang
3.	Pantai Mikapi	Alam	Mimika Barat Tengah	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Penunjang
4.	Air Terjun Urumuka	Alam	Mimika Barat Tengah	• Peningkatan akses menuju lokasi. • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Penunjang

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

PETA 8.3

PETA PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA AMAR DAN SEKITARNYA

4. DPK Agimuga dan Sekitarnya

Sub Pusat Pengembangan Destinasi Wisata Agimuga dan sekitarnya; "KEUNGGULAN DPD" adalah Wisata Pelestarian aneka flora dan fauna sebagai daya tarik wisata di Taman Nasional Lorentz. Arahan pengembangan pada daya tarik wisata utamanya adalah DTW Taman Nasional Lorentz, sedangkan obyek wisata lainnya pusat pelayanan lokal. Secara umum pada uraian berikut:

1) Pelestarian aneka flora dan fauna sebagai daya tarik wisata di Taman Nasional Lorentz.
2) Pengembangan konsep wisata lintas kepulauan di Kabupaten Mimika dan daerah sekitarnya sebagai paket wisata.
3) Pengembangan sistem transportasi laut sebagai paket wisata alam bahari dan kepulauan.
4) Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata.

Tabel 8.4
Pembangunan DTW Pada DPK Agimuga dan Sekitarnya

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Arahan Rencana	Ket.
1.	Taman Nasional Lorentz	Alam	Agimuga	• Pelestarian Aneka Flora dan Fauna sebagai daya tarik wisata. • Mengembangkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan • Peningkatan Aksesibilitas	Unggulan
2.	Pulau Puriri	Alam	Mimika Timur Jauh	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Penunjang
3.	Pulau Puriri	Alam	Mimika Timur Jauh	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi • Pembangunan sarana DTW	Penunjang
4.	Pulau Yapero	Alam	Mimika Timur Jauh	• Peningkatan akses untuk menunjang konsep wisata bahari/ lintas pulau. • Pengembangan atraksi wisata pantai • Pembangunan fasilitas akomodasi	Penunjang

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

5. DPK Tembagapura dan Sekitarnya

Yaitu Sub Pusat Pengembangan Destinasi Wisata Tembagapura dan sekitarnya; "KEUNGGULAN DPK" adalah pengembangan daya tarik wisata alam pegunungan. Pusat pelayanan di Ibukota Distrik Hoya, jila dan Alama. Rencana pembangunan daya tarik wisata utamanya adalah Puncak Cartenz. Secara umum, penjelasannya pada uraian berikut:

1) Peningkatan Aksesibilitas untuk memudahkan para wisatawan.
2) Pembangunan Fasilitas DTW
3) Peningkatan fungsi DTW melalui pembangunan daya tarik baru dalam kawasan wisata.
4) Pembangunan daya tarik wisata lainnya sebagai pusat pelayanan pariwisata lokal.

Tabel 8.5
Pembangunan DTW Pada DPK Tembagapura dan Sekitarnya

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Arahan Rencana	Ket.
1.	Puncak Cartenz	Alam	Tembagapura	• Peningkatan Aksesibilitas • Pembangunan sarana dan prasarana DTW	Unggulan

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

B. RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Rencana kawasan pengembangan pariwisata merupakan arahan pembangunan kawasan pariwisata yang menurut hasil analisis dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pengembangan kepariwisataan daerah.

Kawasan pengembangan pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika ditetapkan di :

1. DTW Pulau Bidadari
2. DTW Pulau Puriri
3. DTW Pantai Kampus Biru
4. DTW Pantai Keakwa
5. DTW Pantai Mikapi
6. DTW Pantai Ipaya
7. DTW Kali Kiura
8. DTW Kali Iwaka
9. DTW Kali Mayon
10. DTW Tugu Perdamaian Eme Neme
11. DTW Kampung Keakwa
12. DTW Kampung Berburu Pigapu
13. DTW Taman Mapurupuawu
14. DTW Taman Rekreasi
15. DTW Kamoro Kakuru
16. DTW Taman Kuala Kencana

17. DTW Ekowisata Mangrove Perikanan
18. DTW Padang Golf Rimba Irian
19. DTW Waterboom Karang Senang
20. DTW Wisata Air Pelangi
21. DTW Gelanggang/Kolam Renang Kuala Kencana
22. DTW Pulau Yapero
23. Air Terjun Urumuka

Rencana kawasan strategis pariwisata merupakan arahan pengembangan kawasan pariwisata yang dianggap strategis untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan wilayah dan atau pembangunan kepariwisataan. KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Kawasan Strategis Pariwisata ditetapkan di :

1. DTW Puncak Cartenz;
2. DTW Ekowisata Mangrove Keakwa
3. DTW Pantai Kawar
4. DTW Taman Nasional Lorentz
5. DTW Kota Tua Kokonao

Tabel 8.6
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) dan
Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)
Kabupaten Mimika

No.	Nama DTW	Jenis DTW	Distrik	Ket.
Kawasan Strategis Pariwisata (KSP)				
1.	Puncak Cartenz	Alam	Tembagapura	Unggulan
2.	Ekowisata Mangrove Keakwa	Alam	Distrik Mimika Tengah	Unggulan
3.	Pantai Kawar	Alam	Distrik Amar	Unggulan
4.	Taman Nasional Lorentz	Alam	Distrik Agimuga	Unggulan
5.	Kota Tua Kokonao	Budaya	Distrik Mimika Barat	Penunjang
Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)				
1.	Pulau Bidadari	Alam	Distrik Mimika Timur Jauh	Penunjang
2.	Pulau Puriri	Alam	Distrik Mimika Timur Jauh	Penunjang
3.	Pantai Kampus Biru	Alam	Distrik Mimika Tengah	Unggulan
4.	Pantai Keakwa	Alam	Distrik Mimika Tengah	Unggulan
5.	Pantai Mikapi	Alam	Distrik Mimika Barat Tengah	Penunjang
6.	Pantai Ipaya	Alam	Distrik Amar	Penunjang
7.	Kali Kiura	Alam	Distrik Mimika Barat	Unggulan
8.	Kali Iwaka	Alam	Distrik Iwaka	Penunjang
9.	Kali Mayon	Alam	Distrik Kuala Kencana	Penunjang
10.	Tugu Perdamaian Eme Neme Yauware	Budaya	Distrik Mimika Baru	Penunjang
11.	Kampung Keakwa	Budaya	Distrik Mimika Tengah	Unggulan
12.	Taman Mapurupuwau	Budaya	Distrik Mimika Timur	Unggulan
13	Taman Kuala Kencana	Buatan	Distrik Kuala Kencana	Unggulan
14.	Taman Rekreasi	Buatan	Distrik Mimika Baru	Penunjang
15.	Kamoro Kakuru	Budaya	Kota Timika	Unggulan
16.	Ekowisata Mangrove Perikanan	Alam	Distrik Mimika Timur	Penunjang
17.	Padang Golf Rimba Irian	Buatan	Distrik Kuala Kencana	Unggulan
18.	Waterboom Karang Senang	Buatan	Distrik Kuala Kencana	Penunjang
19.	Wisata Air Pelangi	Buatan	Distrik Wania	Unggulan
20.	Kolam Renang Kuala Kencana	Buatan	Distrik Kuala Kencana	Penunjang
21.	Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu	Alam	Distrik Mimika Timur	Penunjang
22.	Pulau Yapero	Alam	Distrik Mimika Timur Jauh	Penunjang
23.	Air Terjun Urumuka	Alam	Distrik Mimika Barat Jauh	Penunjang

Sumber : Hasil Rencana Tim tahun 2020

BAB IX
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Indikasi program dimaksudkan untuk memberikan strategi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu dan tahapan tertentu, sehingga setiap program yang akan dan selesai dilaksanakan akan memberikan dampak terhadap pengembangan sektor kepariwisataan di Kabupaten Mimika. Indikasi program pengembangan pariwisata Kabupaten Mimika dalam kurung waktu (15) tahun (2018 - 2032). Penyusunan indikasi program dilakukan dengan skala prioritas kebutuhan, meliputi program sebagaimana tertuang dalam rumusan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menggambarkan bahwa pembangunan pariwisata melalui, sebagai berikut;

1. Program Pengembangan Produk Pariwisata Kabupaten Mimika;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pemasara Pariwisata;
4. Program Pengembangan Pengembangan Industri Pariwisata;
5. Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata;

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah juga dimungkinkan dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali apabila dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam dan/atau perubahan batas territorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

A. LOKASI, SUMBER DANA DAN INSTANSI PELAKSANA

1. Lokasi

Lokasi merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.

2. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan/atau masyarakat.

3. Instansi Pelaksana

Instansi pelaksana merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah seperti organisasi perangkat daerah (OPD), dinas teknis terkait, dan/atau kementerian/lembaga, swasta, dan/atau masyarakat.

B. WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Program direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 15 (lima belas) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan dan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan program prioritas disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan Rencana Pembangunan Pariwisata Kabupaten Mimika.

C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MIMIKA

Perwujudan Rencana Pembangunan Pariwisata Kabupaten Mimika, pada dasarnya dilakukan dalam berbagai program pemanfaatan sumberdaya pariwisata atau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan rencana. Untuk menyusun program-program

pembangunan kepariwisataan kabupaten, sesuai dengan arahan rencana, maka diperlukan suatu indikasi program pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen rencana yang lebih rinci. Di dalamnya ercakup program-program pembangunan yang bersifat indikatif, tahapan pelaksanaan, lokasi kegiatan serta institusi pelaksananya. Dalam perumusan indikasi program pembangunan kepariwisataan, dipertimbangkan beberapa hal, meliputi:

1. Adanya komponen-komponen rencana yang perwujudannya membutuhkan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program pembangunan fisik baik berupa rencana pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata maupun pembangunan kelembagaan.
2. Adanya kebutuhan untuk melakukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan di daerah; dan
3. Adanya kebutuhan pembiayaan atau sumber dana yang berbeda serta perlunya dukungan kelembagaan untuk melaksanakan program pembangunan kepariwisataan.

Program-program yang akan disusun tersebut pada dasarnya masih bersifat indikatif dan diharapkan menjadi suatu indikator di dalam penyusunan program pembangunan kepariwisataan oleh instansi untuk jangka menengah. Susunan program pembangunan kepariwisataan tersebut, tidak dapat terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMD dan RPJPD) Kabupaten Mimika, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika yang terindikasi dalam program pembangunan daya tarik wisata, dan

rencana yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

1. Nama program dari usulan program dan proyek rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika, meliputi: pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, pembangunan industry pariwisata maupun pembangunan kelembagaan;
2. Sasaran dari usulan program rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika merupakan target yang ingin dicapai, terdiri atas kesesuaian dengan tujuan, visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mimika, kesesuaian dengan tujuan pembangunan daya tarik wisata dan peningkatan kualitas SDM;
3. Komponen kegiatan pada setiap sub program yang bersifat untuk memelihara/peningkatan fungsi berbagai item pembangunan kepariwisataan serta berbagai fasilitas pelayanan yang ada lebih didahulukan untuk menjamin tetap operasionalnya pembangunan kepariwisataan tersebut;
4. Jangka waktu dan tahapan pelaksanaan program dari rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika didasarkan prioritas pembangunan dan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Mimika pada sektor pariwisata;
5. Skala prioritas program mengacu kepada permasalahan pengembangan dan kebutuhan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Mimika seperti telah diuraikan di atas, dengan menggunakan metode matriks, skoring dengan pembobotan sederhana, dapat disusun secara indikatif skala prioritas program dan proyek-proyek pembangunan untuk disusun secara indikatif

skala prioritas program dan proyek-proyek pembangunan dalam perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Kriteria penilaian yang digunakan untuk penyusunan skala prioritas tersebut adalah:

1. Kesesuaian dengan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Mimika;
2. Kesesuaian dengan tujuan mengembangkan/mewujudkan sektor pariwisata yang telah direncanakan dan kesesuaiannya dengan upaya pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup;
3. Kesesuaian dengan tujuan membuka akses dan mengembangkan system transportasi wilayah; dan
4. Program dan kegiatan yang bersifat khusus dan atau mendesak seperti misalnya berkenaan dengan masalah bersifat meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata dan lainlain, maka pada prinsipnya akan lebih diprioritaskan.



Tabel 9.1
Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Mimika Tahun 2021-2035

No.	Judul Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035		
A. Perwujudan Pembangunan Destinasi Pariwisata											
1.	Penyusunan Masterplan Seluruh Daya Tarik Wisata Unggulan	Seluruh DTW Unggulan								APBDK	• Bappeda • Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.	Pembangunan Pusat Informasi Daya Tarik Wisata	DPK Timika								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.	Pembangunan Sub Pusat Informasi Daya Tarik Wisata	DPK Tembagapura, Amar, Agimuga dan DPK Mimika Tengah								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
3.	Peningkatan Akses Jaringan Jalan menuju DTW									APBDK/P	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Pengembangan wisata lintas pulau/pantai	DPK Agimuga, Mimika Tengah dan DPK Amar								APBDK	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Dinas Kelautan dan Perikanan
5.	Pembangunan Dermaga Wisata	Seluruh DTW Alam Pantai/Bahari								APBDK	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Dinas Kelautan dan Perikanan
6.	Pengembangan atraksi wisata pantai	Seluruh DTW Alam Pantai/Bahari								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

7.	Penetapan kawasan Ekowisata Mangrove									APBDK/P	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Dinas Kehutanan
8.	Peningkatan kualitas akomodasi pariwisata melalui evaluasi status akomodasi (hotel dan penginapan)	DPK Timika								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
8.	Pembangunan Pusat Wisata Kuliner	DPK Timika								APBDK	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
B. Perwujudan Pemasaran Pariwisata											
1.	Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, dan sinergis dengan daerah sekitar	Skala Regional								APBDK/P	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
2.	Pembentukan badan atau forum pariwisata kabupaten sebagai badan konsultatif dinas pariwisata kabupaten	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
3.	Mengembangkan pasar domestic dengan penyesuaian produk wisata yang ada	Skala Nasional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
4.	Menetapkan dan mengembangkan bentuk kebijakan tentang even tahunan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta

C. Perwujudan Pembangunan Pariwisata											
1.	Pembentukan organisasi industri pariwisata	Skala Regional									• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
2.	Peningkatan Kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
3.	Peningkatan Fasilitas, regulasi dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
4.	Penguatan kemitraan usaha pariwisata	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
D. Perwujudan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata											
1.	Pengembangan organisasi kepariwisataan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
3.	Revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta

4.	Pemetaan Kualifikasi kompetensi SDM	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
5.	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industry pariwisata	Skala Regional								APBDK/P	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta
6.	Pemetaan dan pengadaan SDM Industri di tiap-tiap sub pusat kawasan wisata	Skala Regional								APBDK/P	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
7.	Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan	Skala Regional								APBDK/P SWASTA	• Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata • Swasta

Sumber : Hasil rencana tim tahun 2020

wonderful
indonesia

Kabupaten Mimika

Snow in The Tropics

